



Profil Statistik  
**GENDER**  
Kota Denpasar  
Tahun 2023

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR

# **PROFIL STATISTIK GENDER KOTA DENPASAR TAHUN 2023**

Oleh

**WIDHIANTHINI  
NYOMAN AYU SUKMA PRAMESTISARI  
NI MADE WIASTI  
AAA WULANDIRA SAWITRI DJELANTIK**

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA**

**PROFIL STATISTIK GENDER  
KOTA DENPASAR  
TAHUN 2023**

Oleh

**WIDHIANTHINI  
NYOMAN AYU SUKMA PRAMESTISARI  
NI MADE WIASTI  
AAA WULANDIRA SAWITRI DJELANTIK**

Cetakan Pertama:

2023, xxx + 203 hlm, 16 x 23 cm, Arial, 12

**Hak Cipta pada Penulis.**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang :**

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.



## SAMBUTAN

**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kota Denpasar**



### **Om Swastyastu,**

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widi Wasa karena berkat asung kertha wara nugraha-nya penyusunan buku Profil Statistik Gender Kota Denpasar tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi persoalan gender dan pemberdayaan perempuan, namun sampai saat ini ketimpangan gender pada berbagai bidang pembangunan masih tampak cukup menonjol, seperti di bidang ekonomi, pendidikan, dan politik. Oleh karena itu, hal penting yang perlu dilakukan secara serius dan konsisten adalah penerapan strategi pengarusutamaan gender (PUG). Sementara ini masih ada dugaan bahwa, salah satu penyebab sulitnya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah karena belum maksimalnya pengintegrasian gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai akibat lemahnya kondisi data gender yang ada sehingga kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang dihasilkan belum sepenuhnya berperspektif gender. Padahal data terpilah berdasarkan jenis

kelamin atau yang sering disebut data gender sangat penting artinya dalam setiap penyusunan perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Data ini dapat dikatakan sebagai dasar utama dalam menyusun perencanaan yang responsif gender karena atas dasar inilah kita bisa mengidentifikasi isu-isu gender yang masih terjadi di masyarakat.

Tersusunnya buku Profil Statistik Gender Kota Denpasar Tahun 2023, tidak lepas dan adanya komitmen dari pemerintah Kota Denpasar untuk mempublikasikan data terpilih berdasarkan jenis kelamin dalam berbagai aspek pembangunan dan secara berkala memperbaharui data tersebut. Tujuan publikasi ini adalah untuk menunjukkan secara lebih nyata tentang kesenjangan dan isu gender yang masih terjadi pada berbagai aspek pembangunan yang pada gilirannya dapat memberikan petunjuk secara lebih jelas kepada para penentu kebijakan dan penyusun program/kegiatan sehingga penanganan isu gender dapat dilakukan secara lebih cermat dan tepat.

Oleh Karena itu, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Walikota Denpasar serta semua pihak yang telah memfasilitasi sampai terwujudnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kepentingan pembangunan di Kota Denpasar.

**Om, Shanti, Shanti, Shanti, Om**

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana Kota Denpasar



**Dra. I Gusti Agung Sri Wetrawati, M.Si**  
NIP. 19660311 199503 2 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan karena berkat asung kerta wara nugraha Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa Buku Statistik Gender Kota Denpasar Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Tujuan penyusunan buku Statistik Gender ini adalah untuk menyajikan data statistik yang terpilah berdasarkan jenis kelamin di berbagai aspek pembangunan, seperti aspek pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, serta masalah sosial lainnya.

Melalui buku Profil Statistik Gender Kota Denpasar diharapkan para perencana dapat menggunakan data-data ini sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan isu-isu gender terutama yang menjadi salah satu permasalahan di Kota Denpasar. Penyusunan buku ini diprakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar bekerja sama dengan Kajian Gender dan Perlindungan Anak Universitas Udayana.

Penyusunan buku profil ini merupakan kelanjutan dari buku profil tahun sebelumnya. Melalui kesempatan ini tim penyusun memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam buku ini. Tim penyusun menyampaikan banyak terima kasih kepada

semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam melakukan penyusunan buku ini.

Akhirnya kami berharap semoga buku ini bermanfaat bagi pembangunan Kota Denpasar khususnya dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan mengimplementasikan pengarusutamaan gender diberbagai bidang pembangunan.

Tim Penyusun

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesetaraan gender adalah prinsip hak asasi manusia, prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat dan merupakan tujuan itu sendiri (UNESCO, 2019), sehingga mencapai kesetaraan gender di berbagai level menjadi tujuan utama, dan menjadi perhatian dalam hal inisiatif pembangunan. Tujuan kelima dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menyerukan secara langsung untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di semua bidang masyarakat, serta memerangi segala bentuk diskriminasi yang mereka hadapi (United Nations, 2020).

Perempuan dapat memanfaatkan SDGs sebagai “alat tagih” kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak perempuan, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta memperkuat Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Tujuan ke-5 adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak. Ada 9 target dalam tujuan ke-5 sebagai syarat utama tercapainya tujuan ini. Dari 17 Goals, 169 Target dalam SDGs, ada 16 goals dan 91 target terkait dengan kesetaraan gender, hak asasi perempuan dan anak perempuan. Perempuan dapat berperan aktif untuk mengawal implementasi



dan capaian dari semua tujuan dan target dalam Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan.

Tuntutan untuk menyelesaikan berbagai macam tantangan serta permasalahan sosial dengan memanfaatkan inovasi informasi, teknologi, dan sains termuktahir menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rencana transformasi dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Perempuan memiliki potensi yang luar biasa untuk turut berkontribusi dalam kemajuan pembangunan era Society 5.0.

Kiprah perempuan dalam bidang Science Technology Engineering Math (STEM) adalah hal yang tidak bisa dianggap ringan hanya karena stereotip kultur maskulinitas di bidang STEM. Perempuan perlu mendapatkan akses yang sama dalam STEM, karena pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki potensi yang sama.

Dalam era Society 5.0, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah mengembangkan infrastruktur teknologi, roadmap, dan mindset dalam membangun percepatan pelaksanaan PUG di pusat dan daerah. Hal ini bertujuan mengembangkan cara berpikir networking atau saling keterkaitan, misalnya antara pusat dan daerah, daerah dengan SKPD/OPD terkait, Kementerian PPPA dengan Kementerian/lembaga lain.

Tujuan penyusunan buku Statistik Gender ini adalah untuk menyajikan data statistik yang terpilah berdasarkan jenis kelamin

di berbagai aspek pembangunan, seperti aspek pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, serta masalah sosial lainnya. Secara khusus manfaat dari penyusunan buku Statistik Gender Kota Denpasar ini antara lain adalah dapat memberikan petunjuk atau referensi bagi para penentu kebijakan dan penyusun program pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) terutama dalam menyusun kegiatan pembangunan sehingga kegiatan yang direncanakan dapat menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran. Ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin merupakan dasar dalam melakukan analisis gender sehingga para perencana mampu menyusun kebijakan/ program/kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Berdasarkan aspek pendidikan, ditinjau dari APS, anak usia 7-15 tahun hampir seluruhnya bersekolah, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara usia 16 tahun ke atas, untuk laki-laki berkisar antara 75 hingga 83 persen sementara untuk perempuan berkisar 68 hingga 87 persen. APS penduduk laki-laki cenderung mengalami penurunan pada semua kelompok umur sepanjang periode 2020-2022. APM SD pada penduduk laki-laki sebesar 98,79 persen sementara pada penduduk perempuan 95,75 persen. Artinya, pada tahun 2022 sekitar 98,79 persen penduduk laki-laki dan 98,79 persen penduduk perempuan yang berumur 7-12 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SD sederajat. Sama halnya dengan APM SD, APM SMP

untuk penduduk laki-laki angkanya juga lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Sebaliknya pada jenjang SMA, APM penduduk laki-laki lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. Siswa putus sekolah tingkat SD dan SMP masih terjadi. Di Kecamatan Denpasar Barat menduduki posisi paling tinggi. Ditinjau dari APK, target APK tingkat SD/MI tahun 2022 adalah 104 namun bisa terealisasi 102,49. Sementara itu untuk APK jenjang pendidikan SMP/MTs targetnya sama dengan jenjang SD yakni 104 namun hanya terapai 92,05, berarti masih jauh dari target. Berbeda dengan APK tingkat SMA/MA/SMK tercapai 106,92, melewati nilai target 103,33. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Dilihat dari jumlah siswa, terjadi pemerataan di jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Yang menarik kondisi saat ini sepertinya agak berbeda dengan tahun sebelumnya dimana semakin tinggi jenjang pendidikan maka jumlah siswa perempuan semakin sedikit, namun saat ini di Kota Denpasar tampak semakin tinggi jenjang pendidikan jumlah siswa perempuan semakin tinggi. Ini artinya tidak ada lagi diskriminasi terhadap anak perempuan di bidang pendidikan.

Berdasarkan aspek kesehatan, jumlah angka kelahiran bayi di Kota Denpasar berdasarkan jenis kelamin dan empat wilayah kecamatan pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan terjadi peningkatan. Peningkatan secara signifikan terjadi

khususnya pada bayi berjenis kelamin laki-laki. Dilihat dari jumlah balita terjadi peningkatan jumlah balita sebanyak 7.176 balita atau setara dengan 12%. Peningkatan atau bertambahnya jumlah balita di dominasi oleh daerah Denpasar Selatan baik pada tahun 2021 dan 2022. Adapun kecamatan dengan jumlah angka balita terendah ialah Denpasar Timur. Sejalan dengan angka kelahiran bayi, jumlah balita dengan jenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan balita jenis kelamin perempuan. ASI eksklusif dari tahun 2021 berjumlah 1.214 turun menjadi 1.019 pada tahun 2022. Penurunan tersebut mencapai angka 195 kasus atau setara dengan 16,1%. Status gizi di Kota Denpasar tergolong baik selama dua tahun terakhir ini. Cakupan imunisasi bayi di Kota Denpasar dari tahun 2021-2022 mengalami peningkatan 2.096 atau setara dengan 3,2 persen dalam satu tahun. Namun demikian data setiap kecamatan menunjukkan bahwa penurunan hanya terjadi di kecamatan Denpasar Selatan. Secara kuantitatif jumlah dokter umum berjenis kelamin perempuan meningkat sejumlah 34 dokter di tahun 2022 menjadi 55 dokter. Sedangkan untuk dokter umum berjenis kelamin laki-laki mengalami penurunan sejumlah 13 dokter di tahun 2022 menjadi 33 dokter. Ditinjau dari alat kontrasepsi, di Kota Denpasar jumlah laki-laki dan perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 61.560 orang. Penggunaan kontrasepsi terbanyak adalah AKDR/IUD/Spiral sebanyak 23.446 orang. Ditinjau dari pelayanan air bersih,

semua kecamatan terlayani air bersih diatas 50%. Kecamatan Utara menduduki posisi paling tinggi dalam pelayanan air bersih yaitu 79,07% pada tahun 2021 dan Kecamatan Denpasar Timur terlayani 73,63% pada tahun 2022.

Berdasarkan aspek ekonomi, terjadi ketimpangan gender terkait dengan jumlah penduduk usia produktif pada tahun 2021 dan 2022. Jumlah penduduk usia produktif perempuan untuk tahun 2021 dan 2022 lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia produktif laki-laki. Terjadi peningkatan hanya sebesar 0,64% untuk perempuan dan 0,48% untuk laki-laki. Ditinjau menurut status pekerjaan, secara umum pilihan masyarakat untuk menjadi buruh/karyawan/pegawai memiliki persentase tertinggi, yaitu sekitar 57,62 persen pada tahun 2021 dan 60,95 persen pada tahun 2022, dimana laki-laki masih mendominasi. Jumlah tenaga penyuluh pertanian lebih banyak didominasi oleh perempuan sehingga terjadi ketimpangan gender. Selama periode tahun 2019 hingga tahun 2021, TPAK laki-laki memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. Lebih rendahnya TPAK perempuan ini dinilai wajar, mengingat secara umum perempuan bukanlah tumpuan ekonomi keluarga, apalagi setelah menikah kebanyakan perempuan akan mengurus rumah tangga. Terkait dengan tenaga kerja asing, tidak terjadi ketimpangan gender yang signifikan. Jumlah tenaga kerja asing pendatang mengalami penurunan kecil sebesar 2,42% dari tahun 2021 ke tahun 2022.

Jumlah tenaga asing perempuan lebih sedikit dibandingkan tenaga asing laki-laki. Menurunnya jumlah tenaga asing di Kota Denpasar sebagai salah satu dampak dari pandemic Covid-19. Jumlah tenaga pada Dinas Lingkungan Hidup di Kota Denpasar masih didominasi oleh laki-laki sejumlah 917 orang. Kondisi yang sama terjadi pada jumlah juru parker dimana masih didominasi oleh laki-laki. Terjadi ketimpangan gender yang tinggi. Jumlah tenaga kerja yang terserap di usaha rekreasi dan usaha pariwisata di Kota Denpasar adalah 413 laki-laki dan 158 perempuan. Terjadi ketimpangan gender dalam sektor ini. Dilihat dari jumlah penanggung jawab usaha akomodasi, jenis usaha rumah makan paling banyak di Kota Denpasar. Terdapat 1.493 orang laki-laki dan 1.627 orang perempuan. Tidak terjadi ketimpangan gender yang besar antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan tenaga kerja yang diserap pada bidang usaha hotel dan restaurant, pekerja yang bekerja di hotel bintang masih didominasi laki-laki yaitu 3.432 orang dan 1.149 perempuan. Di bidang jasa, usaha salon kecantikan lebih didominasi perempuan yaitu 128 orang dan laki-laki sebanyak 23 orang. Usaha salon kecantikan lebih banyak diminati oleh perempuan.

Ditinjau dari sektor publik, di bidang eksekutif, jumlah ASN di Kota Denpasar secara keseluruhan selama dua tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 5,95%. Kondisi ini menunjukkan belum banyaknya penerimaan ASN selama masa pandemi dan diikuti dengan pegawai yang pensiun. Pada golongan II-IV telah

terjadi ketimpangan gender yang signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Ketimpangan yang tajam terjadi pada golongan III, dimana jumlah ASN perempuan lebih banyak dibandingkan ASN laki-laki. Berdasarkan unit kerja, terjadi ketimpangan yang signifikan di tingkat PAUD dan SD. Jumlah pegawai Non-ASN laki-laki pada tahun 2021 sebanyak 4.245 orang lebih banyak dibandingkan perempuan sebanyak 3.955 orang. Begitupula pada tahun 2022 baik pegawai Non-ASN laki-laki mengalami kenaikan, namun pegawai Non-ASN perempuan mengalami penurunan. Jumlah ASN yang sudah mengikuti diklat meningkat. ASN perempuan yang mengikuti Diklat lebih banyak dibandingkan ASN laki-laki dari tahun 2021-2022. Tercatat pada tahun 2021 jumlah ASN yang mengikuti Diklat adalah 2.080 orang laki-laki (39,73%) dan 3.155 orang perempuan (60,23%). Sedangkan pada tahun 2022 terdiri atas 2.178 laki-laki (36,93%) dan 3.719 orang perempuan (63,07%). Terjadi ketimpangan gender meskipun tidak terlalu signifikan. Berdasarkan persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kota Denpasar tahun 2021, paling banyak yang berpangkat Pembina Tk. I yaitu sebesar 18,10% pada tahun 2021 dan 11,72% pada tahun 2022. Sedangkan persentase terkecil berada pada posisi pangkat Juru yaitu 0,03% dan Pembina Utama yaitu 0,05%. Secara legislatif, menunjukkan kesenjangan gender yang amat sangat signifikan. Kondisi ini dikarenakan dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang ternyata hanya ada 4

orang perempuan saja dan berasal dari PDIP, Demokrat, Golkar, dan PSI. Terdapat 35 orang LO (Liaison Officer) di Kota Denpasar, yang terdiri dari 26 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Keterwakilan perempuan sebanyak 26%. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterwakilan ini masih dibawah 30%. Upaya go politics harus ditingkatkan. Dilihat dari jumlah Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) di Kota Denpasar, hanya 25% keterlibatan perempuan. Berbeda halnya dalam Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD), keterlibatan perempuan sudah mencapai 48,84%. Hal ini menunjukkan sudah terjadi ketimpangan gender di tingkat kelurahan/desa. Jumlah anggota KPU di Kota Denpasar sebanyak 5 orang, terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ini menunjukkan 40% sudah terwakilkan oleh perempuan. Jumlah PPK di Kota Denpasar pada tahun 2022 adalah 20 orang yang terdiri atas 17 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Masih dibawah 30% keterlibatan perempuan dalam PPK yaitu sebesar 15%. Ditinjau dari jumlah Panitia Pemungutan Suara, terjadi ketimpangan gender yang signifikan di setiap kecamatan. Secara keseluruhan terdapat 129 orang anggota PPS pada tahun 2022 yang terdiri atas 104 orang laki-laki dan 25 orang perempuan. Kaum perempuan lebih cenderung kecil untuk terlibat dalam PPS karena diperlukan fisik yang lebih besar untuk tugas ini. Keterlibatan perempuan sebagai PPS di masing-masing kecamatan adalah 24%



(Denpasar Barat); 22% (Denpasar Utara); 22% (Denpasar Timur) dan 17% (Denpasar Selatan). Jumlah Pantarlih di Kota Denpasar adalah 1.888 orang yang terdiri dari 1.206 laki-laki dan 682 perempuan. Keterwakilan perempuan sudah berada diatas 30%. untuk masing-masing kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar Barat sebanyak 36%, Kecamatan Denpasar Utara sebanyak 38%, Kecamatan Denpasar Timur sebanyak 39% dan Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 33%. Sedangkan berdasarkan perspektif yudikatif, persentase jumlah hakim, polisi, dan advokat masih didominasi oleh laki-laki. Terjadi ketimpangan gender. Untuk jumlah jaksa dan notaris tidak terjadi ketimpangan gender yang signifikan. Jumlah hakim di Kota Denpasar tahun 2022 adalah 0,58% laki-laki dan 0,13% perempuan. Jumlah jaksa laki-laki 0,45% dan 0,48% jaksa perempuan. Jumlah polisi di Kota Denpasar terdiri atas 75,80% laki-laki dan 8,39% perempuan. Terjadi ketimpangan gender pada profesi polisi. Jumlah advokat 5,79% laki-laki dan 1,73% perempuan. Jumlah notaris di Kota Denpasar terdiri atas 3,46% laki-laki dan 3,20% perempuan.

Ditinjau dari aspek lainnya, kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga masih menjadi kasus kekerasan paling tinggi. Terdapat 115 orang pada kasus kekerasan perempuan di tahun 2021 dan 166 orang pada tahun 2022. Untuk kasus korban kekerasan pada anak perempuan dan anak laki-laki mengalami peningkatan masing-masing sebesar 91,95% dan 66% dari

tahun 2021 sampai tahun 2022. Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di Kota Denpasar pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 55,56%, yang terdiri dari penanganan untuk korban anak perempuan dan anak laki-laki. Jumlah gepeng di Kota Denpasar pada tahun 2022 didominasi oleh kelompok umur 19 tahun keatas. Terdapat 81 orang laki-laki dan 49 orang perempuan. Jumlah lansia PPKS di Kota Denpasar pada tahun 2022 adalah 351 orang, terdiri dari 121 orang laki-laki dan 230 orang perempuan. Terjadi ketimpangan gender dalam jumlah lansia tersebut. Daya tahan hidup seorang perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Hasil kajian data tersebut, ada empat hal yang perlu ditekankan oleh para stakeholder dalam menguatkan kesetaraan gender untuk pembangunan berkelanjutan. Pertama, di bidang pendidikan. Pemerintah mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun serta menyediakan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin melalui Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan. Kedua, di sektor kesehatan, pemerintah fokus untuk memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu, anak, dan remaja, mengakselerasi usaha perbaikan nutrisi, mengintegrasikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum pendidikan, mendorong pengetahuan dan keterampilan berkeluarga, serta memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana. Ketiga, di bidang ketenagakerjaan,

pemerintah sebaiknya fokus untuk memperluas kesempatan kerja, mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja, menyesuaikan gaji dengan mekanisme pasar, memperbaiki keterampilan dan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan untuk perempuan, dan menguatkan implementasi kebijakan tenaga kerja yang mengakomodasi kesetaraan gender. Terakhir, yang keempat ialah terkait pencegahan kekerasan. pemerintah sebaiknya menargetkan peningkatan pemahaman atas definisi kekerasan dan penyelundupan perempuan, menyediakan perlindungan hukum bagi kasus kekerasan terhadap perempuan, dan meningkatkan efektivitas pelayanan bagi penyintas anak dan perempuan.

# DAFTAR ISI

<b>COVER</b>		i
<b>SAMBUTAN</b>		iii
<b>KATA PENGANTAR</b>		v
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>		vii
<b>DAFTAR ISI</b>		xix
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Tujuan	10
	1.3 Manfaat	11
	1.4 Jenis dan Sumber Data	11
	1.5 Analisis Data	12
<b>BAB II</b>	<b>DEFINISI BEBERAPA KONSEP</b>	14
	2.1 Statistik Gender	14
	2.2 Konsep Gender	15
	2.3 Kesetaraan Gender (KG)	17
	2.4 Pengarusutamaan Gender (PUG)	19
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM KOTA DENPASAR</b>	23
	3.1 Letak Geografis	23
	3.2 Sekilas Sejarah Berdirinya Kota Denpasar	28
	3.3 Lambang Kota Denpasar dan Penjelasannya	33
	3.4 Visi dan Misi	34
	3.5 Sistem Pemerintahan	36
	3.6 Kondisi Demografi	37
	3.7 Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	40
	3.8 Indek Pembangunan Gender (IPG)	41

<b>BAB IV</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	45
	4.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)	47
	4.2 Angka Partisipasi Murni (APM)	48
	4.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)	51
	4.4 Jumlah Siswa	52
	4.5 Guru	59
<b>BAB V</b>	<b>KESEHATAN</b>	69
	5.1 Angka Kelahiran Bayi	69
	5.2 Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 dan 2022	72
	5.3 ASI Eksklusif di Kota Denpasar menurut Kecamatan Tahun 2021 dan 2022	75
	5.4 Status Gizi di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022	78
	5.5 Pojok ASI di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022	82
	5.6. Cakupan Imunisasi Pada Bayi di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022	85
	5.7 Jumlah Dokter Umum Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar	89
	5.8. Keluarga Berencana (KB)	93
	5.9. Penduduk yang Terlayani Air Bersih Tahun 2020 dan 2021	99
<b>BAB VI</b>	<b>EKONOMI</b>	101
	6.1 Kegiatan Utama Penduduk	107
	6.2 Penduduk Usia 15-59 Tahun Menurut Jenis Kelamin	109
	6.3 Kegiatan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	111
	6.4 Tenaga Penyuluh Pertanian	113

6.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	115
6.6	Tenaga Kerja Asing Pendetang	118
6.7	Lingkungan Hidup dan Kebersihan	119
6.8	Juru Parkir	121
6.9	Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata	122
6.10	Pemilik Usaha Salon Kecantikan	125
<b>BAB VII</b>	<b>SEKTOR PUBLIK</b>	127
7.1	Eksekutif	128
7.2	Legislatif	141
7.3	Lembaga Yudikatif	161
<b>BAB VIII</b>	<b>LAIN-LAIN</b>	163
8.1	Kekerasan	163
8.2	Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)	181
8.3	Lansia (Lanjut Usia) PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	185
<b>BAB IX</b>	<b>PENUTUP</b>	189
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	201

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Luas Tanah di Kota Denpasar Dirinci per Kecamatan (Ha) Tahun 2022	27
Tabel 3.2	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan, 2018-2022	37
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2022 (ribu)	39
Tabel 4.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar 2021-2022	48
Tabel 4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar 2021-2022	49
Tabel 4.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan kota Denpasar Tahun 2022	51
Tabel 4.4	Jumlah PAUD berdasarkan jenis kelamin di Kota Denpasar pada Tahun 2022	53
Tabel 4.5	Jumlah Siswa SD menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2022	55
Tabel 4.6	Jumlah Siswa SMP menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2022	56
Tabel 4.7	Jumlah Siswa SMA menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2022	57
Tabel 4.8	Jumlah Guru SD menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022	60
Tabel 4.9	Jumlah Guru SD yang Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022	62
Tabel 4.10	Jumlah Guru SMP yang Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin Tahun 2022	63

Tabel 4.11	Jumlah Kepala Sekolah SD menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022	65
Tabel 4.12	Jumlah Kepala Sekolah SMP menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021	66
Tabel 4.13	Jumlah Kepala Sekolah SMA Negeri dan Swasta menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022	67
Tabel 5.1	Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 dan 2022	70
Tabel 5.2	Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 dan 2022	73
Tabel 5.3	ASI Eksklusif di Kota Denpasar menurut Kecamatan Tahun 2021 dan 2022	76
Tabel 5.4	Status Gizi di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022	79
Tabel 5.5	Pojok ASI di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022	84
Tabel 5.6	Cakupan Imunisasi Pada Bayi di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022	86
Tabel 5.7	Jumlah Dokter Umum menurut Jenis Kelamin di Kota Tahun 2021 dan 2022	90
Tabel 5.8	Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022	92
Tabel 5.9	Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB di Kota Denpasar Tahun 2022	94
Tabel 5.10	Jumlah Perempuan Pernah Nikah Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Nikah Menurut Alat/Cara KB yang Digunakan	97
Tabel 5.11	Presentase Penduduk yang Terlayani Air Bersih	100



Tabel 6.1	Jumlah Penduduk Usia Produktif (0 – 60 Tahun+) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022	110
Tabel 6.2	Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar, Tahun 2021 dan Tahun 2022	112
Tabel 6.3	Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kota Denpasar Tahun 2022	113
Tabel 6.4	Tenaga Penyuluh Pertanian Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022	114
Tabel 6.5	Tenaga Kerja Asing Pendetang Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022	119
Tabel 6.6	Jumlah Tenaga Pada Dinas Lingkungan Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022	120
Tabel 6.7	Jumlah Juru Parkir di Tepi Jalan Umum menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022	121
Tabel 6.8	Jumlah Petugas Parkir Gedung dan Pelataran menurut Jenis Kelamin	122
Tabel 6.9	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap di Sektor Pariwisata menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022	123
Tabel 6.10	Jumlah Penanggung Jawab Usaha Akomodasi di Kota Denpasar menurut Jenis Kelamin Tahun 2022	124
Tabel 6.11	Tenaga Kerja yang Diserap pada Bidang Usaha Hotel dan Restaurant menurut Jenis Kelamin Tahun 2022	125
Tabel 6.12	Usaha Salon Kecantikan menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022	126
Tabel 7.1	Komposisi PNS Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022	129

Tabel 7.2	Jumlah Pegawai Non ASN Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022	131
Tabel 7.3	Jumlah ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang Pernah Mengikuti Diklat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021 dan 2022	132
Tabel 7.4	Jumlah Pejabat Yang Sudah Mengikuti Diklat Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022	135
Tabel 7.5	Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin dan Unit Kerja di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022	137
Tabel 7.6	Komposisi ASN Menurut Golongan Kepegawaian dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022	139
Tabel 7.7	Jumlah ASN Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022	140
Tabel 7.8	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022	141
Tabel 7.9	Jumlah Anggota DPRD Kota Denpasar Periode 2019-2024 Berdasarkan Jenis Kelamin	145
Tabel 7.10	Jumlah Liaison Officer (LO) Menurut Nama Partai dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022	147
Tabel 7.11	Jumlah Pengurus (Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Pengurus Cabang) Menurut Nama Partai dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022	148
Tabel 7.12	Jumlah Anggota Bawaslu Pileg, Pilpres dan Pilkada Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022	150

Tabel 7.13	Jumlah Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022	150
Tabel 7.14	Jumlah Anggota Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022	150
Tabel 7.15	Jumlah Anggota KPU Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Periode 2018-	152
Tabel 7.16	2023 Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022	153
Tabel 7.17	Jumlah PPS di Kecamatan Denpasar Barat	155
Tabel 7.18	Jumlah PPS di Kecamatan Denpasar Utara	155
Tabel 7.19	Jumlah PPS di Kecamatan Denpasar Timur	156
Tabel 7.20	Jumlah PPS di Kecamatan Denpasar Selatan	156
Tabel 7.21	Jumlah Pantarlih di Kecamatan Denpasar Barat	159
Tabel 7.22	Jumlah Pantarlih di Kecamatan Denpasar Utara	159
Tabel 7.23	Jumlah Pantarlih di Kecamatan Denpasar Timur	160
Tabel 7.24	Jumlah Pantarlih di Kecamatan Denpasar Selatan	160
Tabel 7.25	Persentase Profesi Sektor Penegak Hukum Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022	162
Tabel 8.1	Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022	165

Tabel 8.2	Bentuk-bentuk Kekerasan di Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 dan 2022	171
Tabel 8.3	Persentase Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022	172
Tabel 8.4	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani oleh Dinas P3A Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022	173
Tabel 8.5	Jumlah KDRT di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022	177
Tabel 8.6	Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Tahun 2021 dan 2022	179
Tabel 8.7	Jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022	181
Tabel 8.8	Jumlah Gepeng Menurut Jenis Kelamin yang Terjaring dan Telah Dibina Dipulangkan ke Daerah Asal Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022	183
Tabel 8.9	Jumlah Lansia PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022	186

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Peta Kota Denpasar	25
Gambar 3.2	Lambang Kota Denpasar	31
Gambar 3.3	Indeks Pemberdayaan Gender Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2019-2021	41
Gambar 3.4	Indeks Pembangunan Gender Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2019-2021	43
Gambar 4.1	Persentase Angka Partisipasi Murni SD-SMA dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2022	50
Gambar 4.2	Persentase Siswa SD-SMA Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022	58
Gambar 4.3	Persentase Guru SD dan SMP Berdasarkan yang Sudah Tersertifikasi Tahun 2022 di Kota Denpasar	64
Gambar 4.4	Persentase Kepala Sekolah SD dan SMP, SMA berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022	68
Gambar 5.1	Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	71
Gambar 5.2	Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	71

Gambar 5.3	Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021	74
Gambar 5.4	Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	74
Gambar 5.5	ASI Eksklusif di Kota Denpasar menurut Kecamatan Tahun 2021 dan 2022	77
Gambar 5.6	Status Gizi di Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2021 dan 2022	80
Gambar 5.7	Status Gizi di Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2021 dan 2022	80
Gambar 5.8	Status Gizi di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021 dan 2022	81
Gambar 5.9	Status Gizi di Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022	81
Gambar 5.10	Cakupan Imunisasi pada Bayi di Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2021 dan 2022	87
Gambar 5.11	Cakupan Imunisasi pada Bayi di Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2021 dan 2022	87
Gambar 5.12	Cakupan Imunisasi pada Bayi di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021 dan 2022	88
Gambar 5.13	Cakupan Imunisasi pada Bayi di Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2021 dan 2022	88
Gambar 5.14	Jumlah Dokter Umum Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022	91

Gambar 5.14	Jumlah Dokter Umum Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022	91
Gambar 6.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2019-2021	115
Gambar 6.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2019-2021	118
Gambar 7.1	Persentase ASN Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022	130
Gambar 7.2	Persentase ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang Pernah Mengikuti Diklat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021 dan 2022	133
Gambar 7.3	Persentase Pejabat Yang Sudah Mengikuti Diklat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021 dan 2022	135

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesetaraan gender adalah prinsip hak asasi manusia, prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat dan merupakan tujuan itu sendiri (UNESCO, 2019), sehingga mencapai kesetaraan gender di berbagai level menjadi tujuan utama, dan menjadi perhatian dalam hal inisiatif pembangunan. Tujuan kelima dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menyerukan secara langsung untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di semua bidang masyarakat, serta memerangi segala bentuk diskriminasi yang mereka hadapi (United Nations, 2020).

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Salah satu tujuan kelima dari SGs adalah mencapai kesetaraan gender. Ketimpangan gender yang masih terjadi di Indonesia mengakibatkan ketersediaan Data Terpilah Gender (DTG) menjadi sangat penting. Data terpilah menurut jenis kelamin



menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemenuhan hak anak di berbagai sektor pembangunan, terutama bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional. DTG tidak hanya dapat digunakan pemerintah atau pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan yang responsif gender, tetapi juga bermanfaat bagi Penyedia Jasa Keuangan untuk merancang atau mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan. Sebanyak 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan 169 target yang ditetapkan seluruhnya terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan, menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial dan lingkungan. Sifat saling berhubungan dan terintegrasi dari setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa maksud dari agenda baru ini dapat terealisasi, sehingga kehidupan manusia akan lebih baik dan dunia pun akan tertransformasi menjadi lebih baik. Prinsip lain dari agenda pembangunan berkelanjutan yang juga penting untuk diingat adalah bahwa tidak seorangpun ditinggalkan dalam pencapaiannya. Prinsip Tidak Ada Yang Ditinggalkan (No One Left Behind) bukan hanya dalam hal subyek penerima manfaat program pembangunan tetapi juga dalam proses pelaksanaan dan substansi. Selain itu, prinsip inklusifitas, melampaui kategori laki-laki-perempuan, tetapi juga kelompok rentan lain yang selama ini terpinggirkan dan terlupakan dalam pembangunan.

Agenda Pembangunan Berkelanjutan memiliki makna yang penting karena setelah diadopsi maka akan dijadikan acuan secara global dan nasional sehingga agenda pembangunan menjadi lebih fokus. Dengan demikian, setiap negara akan harus mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam agenda pembangunan nasionalnya. Selain itu, dengan adanya komitmen tersebut, akan diikuti dengan mobilisasi sumber-sumber daya di tingkat global dan nasional. Perempuan dapat memanfaatkan SDGs sebagai “alat tagih” kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak perempuan, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta memperkuat Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Tujuan ke-5 adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak. Ada 9 target dalam tujuan ke-5 sebagai syarat utama tercapainya tujuan ini. Dari 17 Goals, 169 Target dalam SDGs, ada 16 goals dan 91 target terkait dengan kesetaraan gender, hak asasi perempuan dan anak perempuan. Perempuan dapat berperan aktif untuk mengawal implementasi dan capaian dari semua tujuan dan target dalam Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan.

Kelompok dan organisasi perempuan dapat mendorong pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan praktek yang selama ini merugikan perempuan dan belum memperoleh perhatian dari pemerintah maupun legislator seperti perkawinan anak, sunat perempuan. Kelompok dan organisasi perempuan

dapat mendorong pemerintah untuk melakukan harmonisasi sasaran dan indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa terhadap target dan indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, kelompok dan organisasi-organisasi perempuan dapat menggunakan target dan indikator agenda pembangunan berkelanjutan untuk melakukan advokasi gender budget.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Strategi inilah yang diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat mengakses, berpartisipasi, ikut dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan sesuai kebutuhan dan aspirasinya. Upaya percepatannya telah dituangkan melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah menempatkan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar.

PUG merupakan strategi yang digunakan untuk mengatasi berbagai isu gender lintas sektor dalam pembangunan sekaligus sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia. Sejak lahirnya Inpres tersebut 19 tahun yang lalu sampai sekarang, proses percepatan pelaksanaan PUG di Kementerian/Lembaga maupun di daerah masih menemukan berbagai kendala. Pelaksanaannya begitu dinamis. Hal ini menuntut komitmen, keseriusan, kemampuan, dan keterampilan sumber daya manusia.

Tuntutan untuk menyelesaikan berbagai macam tantangan serta permasalahan sosial dengan memanfaatkan inovasi informasi, teknologi, dan sains termuktahir menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rencana transformasi dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Perempuan memiliki potensi yang luar biasa untuk turut berkontribusi dalam kemajuan pembangunan era Society 5.0.

Kiprah perempuan dalam bidang Science Technology Engineering Math (STEM) adalah hal yang tidak bisa dianggap ringan hanya karena stereotip kultur maskulinitas di bidang STEM. Perempuan perlu mendapatkan akses yang sama dalam STEM, karena pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki potensi yang sama.

Meskipun memiliki potensi tak terbatas, perempuan di berbagai belahan dunia kerap menghadapi ketimpangan, khususnya di era Society 5.0 dimana informasi, teknologi, dan

sains terintegrasi serta melandasi kehidupan bermasyarakat. Perempuan menjadi kelompok rentan yang kian tertinggal, seperti di Indonesia, merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih jauh tertinggal dari laki-laki yaitu pada angka 54,27% bagi perempuan dan 83,65% bagi laki-laki. Selain itu, dalam pemanfaatan teknologi digital, pada tahun 2020 BPS mendata, persentase penggunaan internet oleh perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu 47,08% dibandingkan 52,92%. Karena itulah, keterwakilan perempuan yang cukup di bidang STEM tidak boleh dipandang sebelah mata. Perempuan dibutuhkan untuk dapat mengakomodasi pandangan dan kebutuhan di bidang ini, sehingga perempuan dapat membantu menutup kesenjangan yang dirasakan serta berkontribusi langsung dalam pembangunan era Society 5.0.

Berbagai kebijakan dan strategi pembangunan juga telah ditempuh oleh pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat, seperti Women in Development (WID), Women and Development (WAD), Gender and Development (GAD) dan Gender Mainstreaming (GM). Pada tahun 2000 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Melalui instrumen yuridis ini, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada semua pejabat pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk

melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender.

Dalam era Society 5.0, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah mengembangkan infrastruktur teknologi, roadmap, dan mindset dalam membangun percepatan pelaksanaan PUG di pusat dan daerah. Hal ini bertujuan mengembangkan cara berpikir networking atau saling keterkaitan, misalnya antara pusat dan daerah, daerah dengan SKPD/OPD terkait, Kementerian PPPA dengan Kementerian/lembaga lain.

Pada tahun 2001 di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah dibentuk lembaga khusus yang menangani masalah peningkatan peranan perempuan, yaitu Biro Bina Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan (BKPP), yang dipimpin oleh seorang Pejabat Eselon II. Sementara itu, di kota telah dibentuk pula lembaga serupa setingkat eselon dua. Saat ini, lembaga yang menangani masalah pemberdayaan perempuan di tingkat Provinsi Bali adalah Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan untuk di Kota Denpasar urusan pemberdayaan perempuan ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan (KBPP), dan sejak tahun 2017 telah berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPAPPKB). Dengan adanya lembaga khusus yang menangani persoalan gender dan perempuan, maka akan lebih mudah dan lebih terfokus dalam mengaplikasikan program-program dan strategi pengarusutamaan gender (PUG), serta upaya-upaya lain dalam mengatasi persoalan gender, perempuan dan perlindungan anak.

Razavi dan Miller (2006) mendefinisikan PUG sebagai proses teknis dan politis yang membutuhkan perubahan pada kultur atau watak organisasi, tujuan, struktur, dan pengalokasian sumber daya. Sedangkan, menurut Ketentuan Umum Permendagri No.15 Tahun 2008 yang dimaksud PUG di daerah adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Dengan demikian, PUG merupakan sebuah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender (KG), bukan suatu tujuan (Saptaningrum, 2008). Perlulah dilakukan analisis gender.

Analisis gender harus dilakukan sebelum merumuskan perencanaan dan program pembangunan. Sebagaimana pendapat Hunt (2004) bahwa di masa yang akan datang pelaksanaan PUG akan menjadi suatu tantangan tersendiri untuk memastikan analisis gender terintegrasi ke dalam analisis sosial program dan kegiatan pembangunan yang lebih luas.

Analisis Gender akan sangat bermanfaat apabila dilaksanakan secara rutin, pada seluruh aspek program dan kegiatan pembangunan. Dengan dilakukannya Analisis Gender, berarti permasalahan gender di suatu daerah telah dipetakan, sehingga solusi permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk program dan kegiatan yang efektif.

Lebih lanjut, menurut Hunt (2004) pemisahan data statistik dan informasi lainnya, berdasarkan jenis kelamin atau data terpilah (*sex-disaggregated data*) sangat diperlukan sebagai alat untuk melakukan analisis gender. Tanpa data terpilah, akan sangat sulit untuk menilai perbedaan dampak aktivitas pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan. Pemilahan data sangat penting untuk dilakukan, untuk kelompok masyarakat yang mungkin akan mendapatkan pengaruh positif atau negatif dari pembangunan. Bukan hanya berdasarkan jenis kelamin, tetapi dapat pula berdasarkan usia, ras, etnis, dan kelompok sosial ekonomi lainnya.

Ketentuan mengenai Data Terpilah sebagai prasyarat pelaksanaan PUG, belum diatur dalam Permendagri No. 15 Tahun 2008, begitu pula di dalam Inpres No. 9 Tahun 2000. Sampai sejauh ini, pengaturannya hanya terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, yang menyebutkan bahwa data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya PUG dan



Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA). Tujuan penyediaan Data Terpilah atau data gender dan anak yaitu untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan PUG dan PUHA di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkelanjutan.

Penyusunan Profil Statistik Gender secara komprehensif menjadi dasar untuk mendukung pengaplikasian strategi pengarusutamaan gender dan teknik analisis gender. Tanpa adanya data ini, analisis gender tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, penyusunan Profil Statistik Gender di Kota Denpasar menjadi sangat penting terutama dalam membantu para perencana dalam menyusun perencanaan yang responsif gender dan berkelanjutan.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan buku Statistik Gender ini adalah untuk menyajikan data statistik yang terpilah berdasarkan jenis kelamin di berbagai aspek pembangunan, seperti aspek pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, serta masalah sosial lainnya. Penulisan Statistik Gender ini dibuat secara deskriptif, dan sejauh mungkin memperlihatkan isu gender di setiap babnya. Berdasarkan data-data yang ada dalam buku ini, para pembaca khususnya para penentu kebijakan akan dapat menemukan isu-isu gender yang ada pada masing-masing sektor pembangunan. Atas dasar ini mereka nantinya akan dapat menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu yang

ada sehingga pada gilirannya tujuan pembangunan secara umum dan khususnya pembangunan pemberdayaan perempuan menuju kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud secara berkelanjutan.

### **1.3 Manfaat**

Secara khusus manfaat dari penyusunan buku Statistik Gender Kota Denpasar ini antara lain adalah dapat memberikan petunjuk atau referensi bagi para penentu kebijakan dan penyusunprogram padasetiap organisasi perangkat daerah (OPD) terutama dalam menyusun kegiatan pembangunan sehingga kegiatan yang direncanakan dapat menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran. Ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin merupakan dasar dalam melakukan analisis gender sehingga para perencana mampu menyusun kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan yang responsif gender. Hal ini pada akhirnya akan dapat mempercepat pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) di segala bidang pembangunan sehingga kesenjangan gender lebih cepat bisa diatasi.

### **1.4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang ditampilkan dalam buku ini adalah data kuantitatif yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Data yang dipublikasikan ini Sebagian besar berupa data primer yang

diambil dari hasil-hasil survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) seperti Suvei Sosial Ekonomi (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan lain-lain. Selain dari BPS, data juga bersumber dari berbagai instansi terkait seperti dari Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar, Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar, Kantor PD Parkir Kota Denpasar, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Denpasar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Denpasar, Kantor Kehakiman, Kejaksaan, Polresta Kota Denpasar, dan Dinas Sosial Kota Denpasar.

### **1.5 Analisis Data**

Penampilan data kuantitatif ini akan menjadi lebih bermakna jika apa yang ada dibalik pemunculan data angka itu

dianalisis secara mendalam. Analisis yang mendalam dilakukan dengan cara menarasikan secara lengkap atau menganalisis secara kualitatif data yang ada pada setiap tabel. Dalam analisis ini akan diberikan penafsiran-penafsiran sesuai dengan kondisi nyata dimasyarakat, namun penafsiran ini baru berupa dugaan sementara yang pada gilirannya untuk menguji kebenarannya masih perlu dilakukan kajian lebih lanjut.

## **BAB II**

# **DEFINISI BEBERAPA KONSEP**

### **2.1 Statistik Gender**

Statistik Gender yang dimaksudkan dalam hal ini adalah statistik yang mengandung isu gender, seperti terefleksikan dari kesenjangan dan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan atau dalam isu yang spesifik. Statistik Gender merupakan hasil analisa lebih lanjut dari Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin. Sementara PBB mendefinisikan bahwa Statistik Gender adalah statistik yang mencerminkan perbedaan dan ketidaksetaraan yang cukup berarti dalam situasi perempuan dan laki-laki disemua aspek kehidupan (PBB, 2006).

Data terpilah menurut jenis kelamin dan umur memberikan gambaran umum tentang keadaan perempuan dan laki-laki disemua kelompok umur dan diberbagai aspek kehidupan. Data terpilah menurut jenis kelamin, tidak selalu mengandung isu gender. Akan tetapi data terpilah menurut jenis kelamin merupakan unsur dasar yang harus ada untuk mengungkapkan isu gender, yaitu suatu isu yang muncul karena pemberlakuan ketidakadilan atas dasar jenis kelamin. Isu gender ini selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai proses pembangunan.

Statistik gender merupakan dasar analisis untuk menilai perbedaan dalam situasi perempuan dan laki-laki dan bagaimana kondisi mereka berubah atau tidak. Dengan cara ini, statistik gender meningkatkan kesadaran dan memberikan dorongan untuk adanya perubahan. Statistik gender juga diperlukan untuk penelitian untuk mendukung pengembangan dan pengujian penjelasan dan teori-teori untuk memahami lebih baik bagaimana gender beroperasi di masyarakat. Semua manfaat ini membentuk dasar untuk mengembangkan kebijakan untuk mendorong kesetaraan gender yang lebih besar. Selain itu, statistik gender diperlukan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengembangan kebijakan (<https://www.kemenpppa.go.id/lib>).

## **2.2 Konsep Gender**

Dalam memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin “merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu”. (Suryani, 2010). Jenis kelamin merupakan kodrat dari Tuhan yang tidak bisa dipertukarkan ataupun diganti, perempuan menghasilkan sel telur sedangkan laki-laki menghasilkan sperma.

Konsep Gender yang dikembangkan Hubies melalui Anshori, dkk, dalam (Alfian, 2016) meliputi:

- 1) *Gender difference*, yaitu perbedaan-perbedaan karakter, perilaku, harapan yang dirumuskan untuk tiap-tiap orang menurut jenis kelamin.
- 2) *Gender gap*, yaitu perbedaan dalam hubungan berpolitik dan bersikap antara laki-laki dan perempuan.
- 3) *Genderization*, yaitu acuan konsep penempatan jenis kelamin pada identitas diri dan pandangan orang lain.
- 4) *Gender identity*, yaitu perilaku yang seharusnya dimiliki seseorang menurut jenis kelaminnya.
- 5) *Gender role*, yaitu peran perempuan dan peran laki-laki yang diterapkan dalam bentuk nyata menurut budaya setempat yang dianut.

“Gender is not a property of individuals but an ongoing interaction between actors and structures with tremendous variation across men’s and women’s lives “individually over the life course and structurally in the historical context of race and class” (Ferree, dalam Puspitawati, 2012) (Gender bukan merupakan properti individual namun merupakan interaksi yang sedang berlangsung antar aktor dan struktur dengan variasi yang sangat besar antara kehidupan laki-laki dan perempuan secara individual” sepanjang siklus hidupnya dan secara struktural dalam sejarah ras dan kelas).

Gender adalah sebuah konsep yang menunjuk pada sistem peranan dan relasi antara laki-laki dan perempuan yang

ditentukan oleh perbedaan biologis melainkan oleh lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Secara teknis operasional perspektif gender adalah cara pandang yang digunakan untuk membedakan segala sesuatu yang bersifat normatif dan biologis dengan segala sesuatu yang merupakan produk sosial budaya dalam bentuk kesepakatan dan fleksibilitas yang dinamis.

### **2.3 Kesetaraan Gender (KG)**

Secara harfiah bahwa yang dimaksud dengan Kesetaraan gender merupakan suatu kesamaan akan kondisi yang ada bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, dan juga mampu berperan dan juga berpartisipasi baik dalam dalam segala kegiatan-kegiatan dalam aspek bidang politik, jugadalam hukum, bidang yang ekonomi, serta sosial dan budaya, juga dalam pendidikan dan aspek pertahanan dan juga keamanan nasional serta adanya kesamaan dalam menikmati pembangunan dan hasilnya. Terwujudnya akan adanya kesetaraan dalam gender tentunya ditandai diskriminasi yang tidak ada, baik di antara kaum perempuan dan laki-laki sehingga akses yang ada dapat mereka miliki, berpartisipasi teruka lebar dan adanya kesempatan, kontrol dan juga memperoleh manfaat pembangunan yang setara dan juga adil. Adapun berbagai indikator dalam gender dan kesetaraannya adalah sebagai berikut :



1) Adanya akses

Peluang atau kesempatan dalam menggunakan sumberdaya tertentu. Mempertimbangkan dan juga memperhitungkan bagaimana laki-laki dan perempuan medpaatkan sumberdaya tersebut secara merata dan juga adil, dalam bidang pendidikan adanya program beasiswa, dimana diberikan secara adil dan merata antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkannya.

2) Partisipasi

Aspek dalam partisipasi merupakan suatu keikutsertaan dalam suatu kelompok atau orang tertentu dalam pengambilan keputusan. Disini dapat dilihat bahwa perempuan dan juga laki-laki apakah memang memiliki suatu peran yang sama atau tidak dalam mengambil suatu keputusan.

3) Kontrol

Penguasaan atau juga wewenang atau kekuatan dalam pengambilan suatu keputusan yang ada. Pemegang jabatan dalam hal tertentu dapat dilihat didominasi oleh gender atau tidak.

4) Manfaat

Merupakan manfaat atau kegunaan yang dapat dan juga dirasakan dan dinikmati secara penuh dan optimal. Di mana dalam keputusan tersebut yang telah diambil oleh pihak

sekolah dapat memberikan suatu kemanfaatan adil dan sebaik-baiknya serta merata bagi laki-laki dan perempuan.

Jika merujuk pada pandangan yang normatif dimaksudkan bahwa kesetaraan gender didasarkan pada aturan dan norma yang berlaku, dimana sikap seseorang lebih berpedoman kepada loyalitas, kesetiaan, serta aturan dan kaidah yang berlaku di lingkungannya. Sudut dalam pandangan yang normatif memberikan pengertian bahwa adanya aturan yang mengikat seseorang untuk tidak melakukan penyimpangan atau melanggar suatu kaidah atau norma yang sudah ditetapkan. Ketaatan dan kesetiaan ditunjukkan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang ada, dimana prinsip-prinsip tersebut diadopsi dalam suatu peraturan hukum, yang mendasarkan pada keadilan,

## **2.4 Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan, implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dalam pembangunan. Pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Keberhasilan pembangunan yang

dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan.

Tujuan Pengarusutamaan Gender adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000). Perempuan dan laki-laki harus menerima akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama atas pembangunan, baik yang direncanakan oleh pemerintah ataupun lembaga lainnya.

Pelaksanaan pengarusutamaan gender diperlukan prasyarat tertentu yaitu adanya kondisi awal dan keluaran-keluaran yang memungkinkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Prasyarat awal dimaksud yaitu komitmen, kebijakan dan program, kelembagaan PUG, sumberdaya yang ada, data terpilah berdasarkan sex, alat analisis dan peran serta masyarakat madani/civil society. Prasyarat tertentu tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Komitmen

Adanya komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam renstra.

## 2. Kebijakan

Adanya kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. (kebijakan, strategi, program, panduan, Juklak/juknis, dll.)

## 3. Kelembagaan

Adanya Struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, focal point, forum, dan tim.

## 4. Sumber daya

Adanya sumber daya yang memadai, yaitu:

- Sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender.
- Sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG dan ARG.

## 5. Data terpilah

Adanya sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin.

## 6. Alat analisis

Ada alat analisis, untuk perencanaan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi.

## 7. Partisipasi masyarakat

Adanya dorongan masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG.

Ketujuh prasyarat ini saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Komitmen untuk melaksanakan PUG menjadi prasyarat utama dari PUG. Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam kebijakan- kebijakan agar mudah dilaksanakan. Untuk melaksanakan kebijakan PUG, dibutuhkan kelembagaan yang akan menggerakkan dan mengkoordinasikan bagian-bagian yang ada dalam organisasi. Pelaksanaan PUG membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari sisi pemahaman konsep gender, ketrampilan dalam melakukan analisis, maupun sensitifitas gender. Pelaksanaan PUG juga harus didukung dengan sumber dana yang memadai, baik untuk pelembagaan PUG maupun untuk merespon kesenjangan gender. Untuk dapat merespon kesenjangan gender, perlu dilakukan analisis gender yang didukung dengan data terpilah dan data spesifik gender yang memadai. Pelaksanaan PUG perlu dipantau dan dievaluasi hasilnya agar dapat selalu ditingkatkan. Proses tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai pemanfaat kebijakan pemerintah, agar hasilnya lebih tepat sasaran.

# **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM**

### **KOTA DENPASAR**

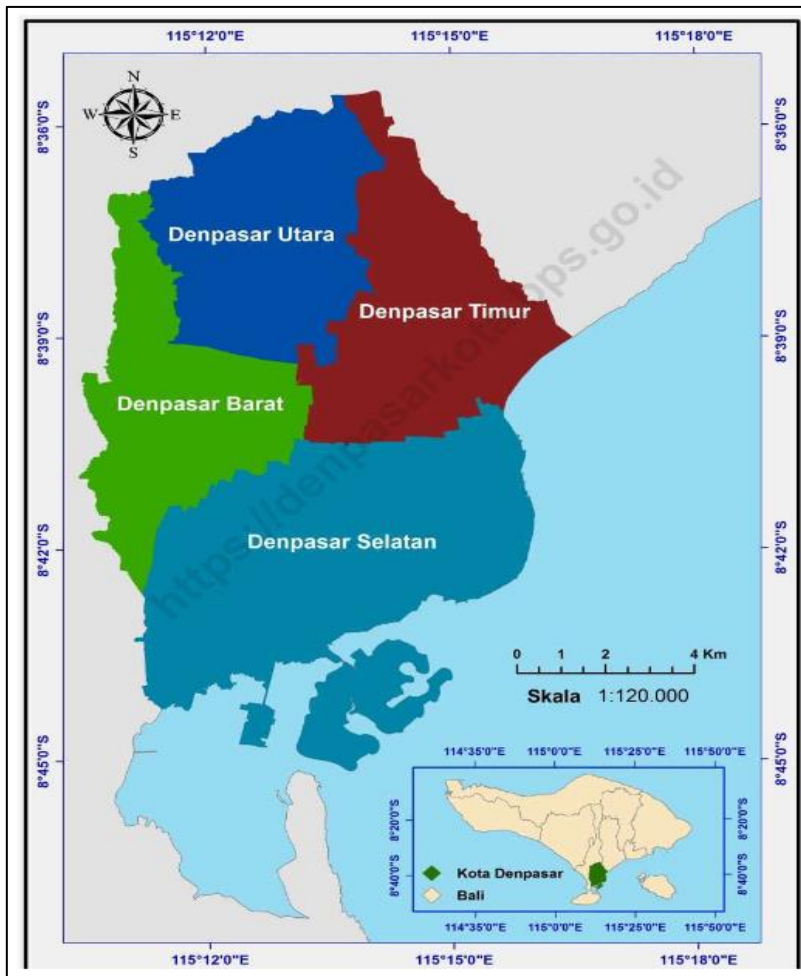
#### **3.1 Letak Geografis**

Kota Denpasar merupakan salah satu dari sembilan daerah kabupaten/kota yang terletak di wilayah Pulau Bali. Sebagian besar keadaan wilayah Kota Denpasar merupakan daerah dataran serta di sebelah tepi selatan dan sebagian daerah di sebelah tepi timur merupakan daerah pantai atau pesisir. Secara administratif batas-batas wilayah Kota Denpasar, yaitu:(1) Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Badung, (2) sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Badung, (3) sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Badung, dan (4) sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar.

Pulau Bali terletak di sekitar 8 derajat di sebelah selatan katulistiwa menyebabkan sepanjang tahun Kota Denpasar beriklim tropis, dengan suhu cuaca sekitar 23 derajat Celsius. Sebagaimana keadaan di daerah-daerah lainnya di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Bali maka Denpasar juga mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau.

Ditinjau dari tata letak topografisnya, Kota Denpasar terletak di antara 08 35' 31" – 08 44' 49" Lintang Selatan dan 115

10' 23" – 115 16' 27" Bujur Timur. Keadaan topografi Kota Denpasar, posisinya miring ke arah selatan dengan ketinggian berkisar antara 0—75 meter di atas permukaan laut. Semakin ke arah utara letak wilayahnya tampak semakin tinggi walaupun ketinggiannya agak tidak merata. Sebaliknya, semakin ke arah selatan letak wilayahnya semakin rendah karena paling ujung berbatasan dengan bibir pantai, antara lain Pantai Padang Galak, Pantai Sanur, Pantai Pesanggaran, dan Pantai Serangan. Morfologi wilayah Kota Denpasar yang landai dengan kemiringan lahan sebagian besar berkisar antara 0—5%, tetapi di bagian tepi kemiringannya bisa mencapai 15% (<https://od/scribd.com>). Untuk lebih jelasnya batas-batas dan topografi Kota Denpasar dapat dilihat gambar 3.1 di bawah ini.



Sumber: BPS Kota Denpasar, 2023

Gambar 3.1 Peta Kota Denpasar

Wilayah Kota Denpasar yang luasnya 12.778,00 Ha atau 127,78 Km<sup>2</sup> tidak memiliki daerah pegunungan dan perbukitan. Dengan demikian, luas wilayah Kota Denpasar sekitar 2,18 persen dari luas Provinsi Bali termasuk tambahan reklamasi



Pantai Serangan seluas 380 Ha. Keadaan lahan di Kota Denpasar relatif bagus karena lahan pertaniannya termasuk kategori lahan subur serta wilayah pesisirnya yang potensial untuk sumber penghidupan penduduknya. Bahkan, relatif banyak wilayah pesisir, di mana pantainya berkembang menjadi obyek wisata, antara lain pantai Padanggalak, Sanur, Mertasari, dan Serangan.

Lahan pertanian sawah di Kota Denpasar yang masih bertahan sampai sekarang ini, dapat ditanami secara intensif sepanjang tahun karena didukung oleh aliran air sungai yang memadai. Di wilayah Kota Denpasar terdapat sungai besar bernama Tukad Badung yang sementara ini tidak pernah kering. Selain itu, juga terdapat sungai- sungai yang lain di mana penggunaan airnya dikelola oleh lembaga tradisional bernama subak. Pimpinan subak disebut pekaseh bertugas untuk mengatur pemanfaat air sunyai (irigasi) kepada petani yang menjadi warga subak di wilayah kerja subak yang bersangkutan. Untuk lebih jelaslah pemanfaat lahan di Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

**Tabel 3.1 Luas Tanah di Kota Denpasar Dirinci per Kecamatan (Ha) Tahun 2022**

No	Kecamatan	Lahan Sawah (Ha)	Lahan Bukan Sawah (Ha)	Lahan Bukan Pertanian	Jumlah (Ha)
1	Denpasar Utara	677,00	46,38	2.428,62	3.152,00
2	Denpasar Timur	690,00	164,00	1.377,00	2.231,00
3	Denpasar Selatan	536,00	263,00	4.200,00	4.999,00
4	Denpasar Barat	217,00	-	2.189,00	2.406,00
Kota Denpasar		1.903,00	473,38	10.194,62	12.788,00

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2023

Tabel 3.1 di atas menunjukkan bahwa wilayah Kecamatan Denpasar Selatan merupakan wilayah terluas di Kota Denpasar, yaitu sekitar 4.999,00 Ha (49,99 Km<sup>2</sup>) atau 39,09 persen dari luas Kota Denpasar. Luas wilayah Kecamatan Denpasar Selatan lebih dari dua kali lipat luas Kecamatan Denpasar Timur (2.231,00 Ha) dan juga dua kali lipat luas Kecamatan Denpasar Barat (2.406,00 Ha). Luas wilayah Kecamatan Denpasar Utara menduduki peringkat ke dua, yaitu sekitar 3.152,00 Ha atau 31,52 Km<sup>2</sup> (24,65 persen dari luas Kota Denpasar).

Lahan sawah yang masih tersisa di Kota Denpasar sementara ini sekitar 1.903 Ha. Data ini menunjukkan bahwa lahan sawah di Kota Denpasar yang tersisa relatif sedikit sehingga dapat diduga bahwa warga Kota Denpasar relatif sedikit menekuni profesi sebagai petani jika dibanding dengan

perofesi yang lain. Demikian pula, lahan yang bukan sawah, hanya seluas 473,38 Ha. Di sisi lain, lahan yang luasnya paling tinggi berupa lahan bukan pertanian seluas 10.194,62 Ha. Lahan yang bukan pertanian ini antara lain berupa tanah yang dimanfaatkan untuk perumahan (tempat tinggal), perkantoran, pertokoan, supermarket, hotel, lapangan, sekolah, rumah sakit dan lainnya. Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, serta intensitas pembangunan yang berkembang dalam berbagai bidang tentu saja akan menyebabkan ikut meningkatnya permintaan akan lahan, di mana lahan pertanian produktif akan dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan, fasilitas penunjang pariwisata seperti hotel, villa, home stay, dan lain-lain. Hal inilah yang kemudian mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

### **3.2 Sekilas Sejarah Berdirinya Kota Denpasar**

Ditinjau dari segi historisnya, Kota Denpasar mempunyai riwayat yang relatif panjang yang pada akhirnya menjadi Ibu Kota Provinsi Bali. Asal usul kata denpasar berasal dari dua suku kata, yaitu den dan pasar. Kata den berarti utara dan kata pasar berarti pasar atau peken. Sesuai dengan asal-usul katanya, denpasar berarti di utara pasar yang sekaligus juga menunjukkan lokasi puri yang saat itu menjadi pusat orientasi penduduk berada di sebelah utara pasar (Salain dalam Wiasti, 2010; 52).

Ditinjau dari segi ruang (space), pada awalnya Kota Denpasar menjadi pusat Kerajaan Badung, yang pada mulanya merupakan sebuah taman. Taman ini disebut-sebut bukanlah sekadar taman karena taman ini merupakan kesayangan Raja Badung Kyai Jambe Ksatria yang beristana di Puri Jambe Ksatria di Pasar Satria sampai ke utara, yang sampai sekarang pasar ini masih tetap ajeg. Selain itu, taman ini dilengkapi pula dengan tempat peraduan yang diperuntukkan khusus bagi tamu-tamu yang datang dari luar Badung. Taman itu terletak di sebelah utara pasar, tepatnya di rumah jabatan Gubernur Bali, sekarang bernama Jaya Sabha. Awalnya pasar terletak di lapangan Puputan Badung sekarang, tapi pada zaman Belanda pasar itu dipindah ke dekat Tukad Badung sehingga dikenal sebagai Pasar Badung. Oleh karena itu, Kota Denpasar merupakan perkembangan dari wilayah kerajaan yang saat itu Puri Denpasar menjadi pusat pemerintahannya.

Pada tahun 1779 terjadi konflik antara Kyai Jambe Ksatria dengan I Gusti Ngurah Rai. Padahal, I Gusti Ngurah Rai tak lain orang kepercayaan Kyai Jambe Ksatria, terutama dalam hal permainan aduan ayam. Konflik ini berujung pada terbunuhnya Kyai Jambe Ksatria. Pascaterbunuhnya Kyai Jambe Ksatria, kekuasaan dilimpahkan kepada I Gusti Ngurah Made Pemecutan. Pelimpahan kekuasaan kepada I Gusti Ngurah Made Pemecutan menandai berakhirnya kekuasaan Puri Jambe Ksatria. Pasalnya, I Gusti Ngurah Made Pemecutan mendirikan

istana baru di Taman Denpasar. Istana baru itulah dinamai Puri Denpasar dan di-pelaspas pada tahun 1788. I Gusti Ngurah Made Pemecutan pun dinobatkan sebagai Raja Denpasar I. Tahun 1788 inilah sebagai tonggak kelahiran Kota Denpasar (Sujaya: <http://www.balebengong.net>).

Dalam perkembangan selanjutnya wilayah Kota Denpasar dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, dan selanjutnya pada tahun 1958 Kota Denpasar dijadikan pusat pemerintahan Provinsi Bali sekaligus menjadi ibu kota. Pada awalnya Kota Denpasar dijadikan sebagai kota Administratif dengan fokus orientasi pada urusan administrasi pemerintahan. Selanjutnya, dengan dijadikannya sebagai pusat pemerintahan Daerah Tingkat II Badung dan sebagai Ibu Kota Provinsi Bali, maka tidak bisa dipungkiri menjadi pusat orientasi berbagai aspek kehidupan dari berbagai penjuru wilayah pemerintahan sehingga secara pasti mengalami perkembangan yang sangat cepat, baik di bidang fisik, ekonomi, sosial dan budaya maupun demografinya.

Selain sebagai pusat pemerintahan, secara otomatis Kota Denpasar juga menjadi pusat perdagangan, pusat pendidikan dan pusat pariwisata yang pada awalnya secara keseluruhan wilayahnya di bagi menjadi tiga kecamatan, yakni Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur, dan Denpasar Selatan. Melihat perkembangan kota administratif ini dari berbagai sektor

begitu pesat, maka tidak mungkin ditangani oleh pemerintahan sebatas pemerintahan yang berstatus kota administratif.

Oleh karena itu, selanjutnya sesuai dengan perkembangan kota serta berbagai pertimbangan antara provinsi Bali dan Kabupaten Badung sepakat untuk meningkatkan status kota administratif Denpasar menjadi Kota Denpasar. Akhirnya pada tanggal 15 Januari 1992 berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1992 tentang pembentukan Kota Denpasar lahir dan telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Februari 1992. Setelah kota Denpasar dirubah statusnya, yaitu dari kota administratif menjadi Kota Denpasar berarti juga merupakan babak baru bagi penyelenggaraan pemerintahan kota.

### 3.3 Lambang Kota Denpasar dan Penjelasannya

Masing-masing kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali telah memiliki lambang tersendiri. Lambang Kota Denpasar berbentuk segi lima sama sisi sebagai berikut.



Sumber: Denpasar dalam Angka 2022

Gambar 3.2 Lambang Kota Denpasar

Warna dasar segi lima sama sisi pada lambang Kota Denpasar, yaitu berwarna biru laut, sedangkan garis pinggirnya berwarna hitam. Pita berwarna putih pada bagian bawahnya tertulis motto “PURADHIPA BHARA BHAVANA”, yang mengandung arti, yaitu “kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kemakmuran rakyat”. Di dalam segi lima sama sisi tersebut, terdapat pula lukisan-lukisan yang merupakan unsur-unsur lambang Kota Denpasar. Adapun unsur-unsur lambang yang dimaksud sebagai berikut.

1. Segi lima sama sisi

- a) Dasarnya berbentuk segi lima sama sisi berarti bahwa dasar Negara Republik Indonesia adalah Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.
- b) Warna dasar biru laut melambangkan keagungan.
- c) Garis pinggir berwarna putih melambangkan kesucian/ budi luhur, dan warna hitam melambangkan kekuatan.

2. Padmasana Jagatnatha

- a) Melambangkan alam semesta tempat suci untuk pemujaan Ida Sanghyang Widhi Wasa.
- b) Jagatnatha dapat pula diartikan sebagai tempat pemerintahan atau penguasa. Jadi Jagatnatha dalam hal ini diartikan sebagai Denpasar merupakan pusat pemerintahan.

c) Warna kuning emas pada Pura Jagadnatha melambangkan tempat suci untuk pemujaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

3. Keris

a) Melambangkan jiwa/melintas keperwiraan yang lazim disebut jiwa keperwiraan.

b) Keris juga melambangkan bahwa Kota Denpasar sebagai kota perjuangan.

c) Warna hitam dalam keris melambangkan ketegasan.

4. Candi Bentar

a) Melambangkan kebudayaan, yakni Kota Denpasar memiliki kebudayaan yang bersifat khas.

b) Candi bentar juga diartikan sebagai pintu gerbangnya Provinsi Bali.

5. Tangga yang berjumlah tiga buah

Melambangkan bahwa konsep pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Denpasar selalu berlandaskan konsep TRI KAYA PARISUDHA.

6. Lingkaran bunga teratai yang jumlahnya 8 (delapan) helai melambangkan asta dala atau asta beratha.

7. Padi Kapas serta rantai (gelang) 2 (dua) melambangkan:

a) Padi yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) buah melambangkan tanggal 27.

b) Rantai (gelang) berjumlah dua buah melambangkan bulan dua (Februari).



- c) Kapas dengan bunga berjumlah 9 (Sembilan) buah dan daun dua helai melambangkan tahun 92. Dengan demikian, padi, kapas, serta rantai sebagai pengikat padi kapas melambangkan bahwa Kota Denpasar lahir pada tanggal 27 Februari 1992.

### **3.4 Visi dan Misi**

Kota Denpasar yang dipimpin oleh Walikota sebagai pucuk pimpinan didalam melaksanakan roda pemerintahan merumuskan program-program pembangunan dan kebijakan-kebijakannya. Penyusunan program-program dan kebijakan-kebijakan tersebut dijabarkan dengan mengacu kepada visi dan misi yang disampaikan oleh pasangan calon yang terpilih menjadi Walikota (Walikota dan Wakilnya). Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, visi dan misi ini mengarahkan pembangunan Kota Denpasar sebagai berikut.

#### **3.4.1 Visi**

Rumusan visi Kota Denpasar adalah “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”. Konsep kota kreatif menitikberatkan pada Denpasar Kota Hidup, dimana kota hidup memberikan kesadaran dinamis terhadap sumber daya alam untuk menggugah inovasi, sumberdaya manusia untuk menggugah dinamika kultur dan sumber daya spiritual yang

dapat menggugah kreasi aparatur. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreatifitas, baik penciptaan, pelestarian maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban dan keseimbangan sosial. Berbasis budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi, kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini, Denpasar menjadi kota makmur, aman, jujur, dan unggul.

### **3.4.2 Misi**

Relevan dengan rumusan visi tersebut di atas maka dirumuskan misi Kota Denpasar sebagai berikut.

- a) Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
- b) Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana.
- c) Kejujuran dan spirit Sewakadarma sebagai penguat Reformasi Birokrasi dan menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance).
- d) Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.

- e) Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

### **3.5 Sistem Pemerintahan**

Dalam upaya mengaktifkan roda pemerintahan maka wilayah administrasi Kota Denpasar dibagi menjadi empat kecamatan. Adapun keempat kecamatan yang dimaksud, yaitu (1) Kecamatan Denpasar Selatan, (2) Kecamatan Denpasar Timur, (3) Kecamatan Denpasar Barat, dan (4) Kecamatan Denpasar Utara. Masing-masing kecamatan tersebut dipimpin oleh satu orang sebagai pucuk pimpinan yang bernama camat.

Secara fungsional dan struktural di masing-masing camat terbagi menjadi beberapa desa dinas/kelurahan, dan desa adat. Pucuk pimpinan di level desa dinas bernama perbekel atau kepala desa, sedangkan di level kelurahan bernama lurah dan di level desa adat bernama bendesa. Selanjutnya, di level desa secara fungsional dan struktural dibagi lagi menjadi banjar dinas dan banjar adat.

Dalam konteks ini, di Bali pada umumnya dan di Kota Denpasar khususnya di level pemerintahan di tingkat desa dan banjar telah terjadi pemisahan penanganan di bidang kedinasan dan bidang adat. Demikian pula, di level banjar, ada disebut banjar adat dan banjar dinas. Walaupun demikian, dalam menjalani kewajiban sehari-hari antara desa dinas dan desa adat serta antara banjar dinas dan banjar adat bersinergi, baik secara

intern maupun ekstern. Jumlah desa/kelurahan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Denpasar tidak mengalami perubahan dari tahun 2018-2022, yaitu sebanyak 43 desa/kelurahan.

**Tabel 3.2 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan, 2018-2022**

Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
Denpasar Selatan	10	10	10	10	10
Denpasar Timur	11	11	11	11	11
Denpasar Utara	11	11	11	11	11
Denpasar Barat	11	11	11	11	11
Denpasar	43	43	43	43	43

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2023

### 3.6 Kondisi Demografi

Denpasar yang menjadi Ibu Kota Provinsi Bali telah menjadi pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perekonomian, pusat pariwisata di Bali. Hal ini menjadi faktor penarik para migran, baik yang berasal dari Pulau Bali maupun luar Pulau Bali yang datang dan tinggal di kota Denpasar dengan berbagai kepentingan. Di antara migran tersebut relatif banyak juga yang memiliki tempat tinggal di Kota Denpasar dan akhirnya menjadi penduduk di kota ini.

Ditinjau dari pendekatan identitas, dapat dibedakan dengan jelas atribut-atribut yang melekat pada seseorang yang membedakan seseorang apakah penduduk asli Bali maupun tidak asli Bali. Atribut yang paling menonjol, yaitu pada umumnya dari nama lengkapnya. Oleh karena itu, penduduk Kota Denpasar bersifat heterogen. Heterogenitas yang menonjol penduduk Kota Denpasar dapat ditinjau berdasarkan atas beberapa indikator, antara lain suku, bahasa, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Di Denpasar, penduduknya tidak saja merupakan suku Bali, tetapi berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan demikian, dalam percakapan sehari-hari acapkali terdengar dialek-dialek atau logat yang berbeda-beda. Misalnya, logat Bali, logat Jawa, logat NTT yang relatif mudah dikenali di Kota Denpasar. Demikian pula, di kalangan orang yang merasa berasal dari satu suku acapkali pula menggunakan bahasa daerahnya untuk bercakap-cakap dengan sesama teman-temannya.

**Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2022 (ribu)**

Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	25,3	24,1	49,4
5-9	25,2	24,1	49,3
10-14	27,7	26,2	53,9
15-19	29,1	27,2	56,3
20-24	30,4	29,4	59,8
25-29	29,7	29,4	59,1
30-34	29,0	29,2	58,2
35-39	28,0	29,4	57,4
40-44	29,2	29,5	58,7
45-49	28,0	28,6	56,7
50-54	26,5	25,7	52,2
55-59	21,4	20,2	41,7
60-64	15,3	14,3	29,7
65-69	10,8	10,3	21,1
70-74	6,4	6,0	12,4
75+	4,9	6,2	11,1
<b>Kota Denpasar</b>	<b>367,0</b>	<b>359,9</b>	<b>726,8</b>

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2023

Berdasarkan Tabel 3.3 terlihat bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki paling banyak berada di kelompok umur 20-24 tahun (30.400 jiwa), sedangkan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan paling banyak berada di kelompok umur 40-44 tahun (29.500 jiwa). Data ini menunjukkan penduduk di Kota

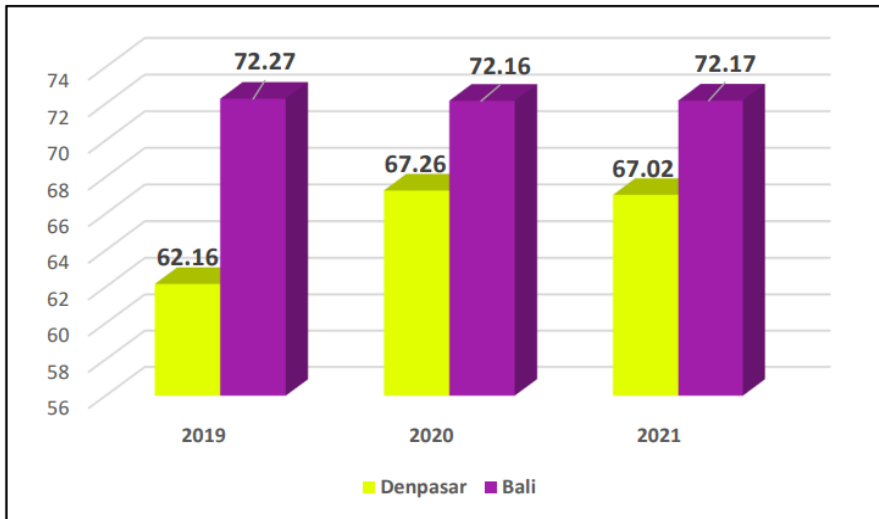
Denpasar mayoritas berada pada kategori produktif. Tabel 3.3 di atas juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Denpasar pada tahun 2022 jika ditinjau dari jenis kelaminnya tidak menunjukkan perbedaan jumlah yang mencolok. Namun, dari perspektif gender, jumlahnya penduduk Kota Denpasar didominasi oleh jenis kelamin laki-laki.

### **3.7 Indek Pemberdayaan Gender (IDG)**

Indek pemberdayaan gender merupakan salah satu indikator untuk mengetahui sejauhmana sumbangan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat. Indek pemberdayaan gender atau disingkat IDG terdiri dari tiga dimensi yakni keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indikator persentase upah buruh nonpertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Denpasar pada tahun 2019-2021 lebih rendah dibandingkan IDG Provinsi Bali. IDG Kota Denpasar mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 5,1 poin dan sebesar 4,86 poin pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik semakin meningkat dalam tiga tahun terakhir.

**Gambar 3.3 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2019-2021**



### 3.8 Indek Pembangunan Gender (IPG)

Pembangunan manusia yang dilakukan diarahkan dan ditujukan untuk seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Meskipun demikian pada kenyataannya perempuan senantiasa tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup.

Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Persoalan paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender. Padahal sesuai amanah pemerintah dalam



Undang-undang jelas sekali disebutkan bahwa pembangunan adalah hak bagi setiap warga negara.

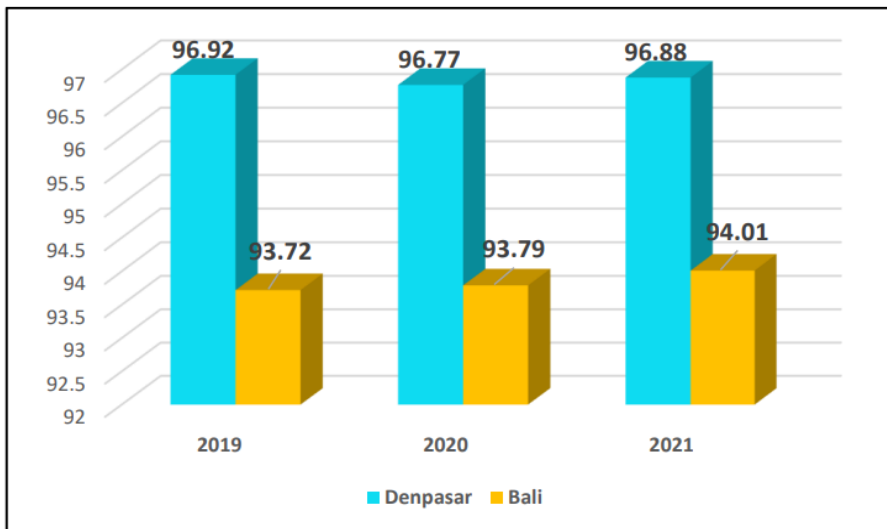
Beberapa ukuran tentang kesetaraan dan keadilan gender telah digunakan banyak pihak, meski ukuran tersebut masih bersifat tunggal (single variable). Namun di dalam perkembangan waktu serta tuntutan akan tingkat keakurasian, maka ukuran yang bersifat komprehensif dan representative mutlak dibutuhkan. UNDP melalui Laporan Pembangunan Manusia Tahun 1995 memperkenalkan ukuran pembangunan manusia yang bersifat gabungan (komposit) dari empat indikator, yang menyoroti tentang status perempuan khususnya mengukur prestasi dalam kemampuan dasar. Ukuran komposit yang dimaksud adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Pembangunan gender atau pembangunan yang berhubungan dengan gender (Gender Development atau Gender Related Development), ditujukan untuk mengetahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Ketimpangan di antara laki-laki dan perempuan dinyatakan dalam suatu angka atau indeks. Semakin besar ketimpangan di antara keduanya dalam pembangunan manusia, semakin rendah nilai indeks tersebut.

IPG sebagai indeks komposit juga memiliki komponen-komponen pembentuk yang turut menentukan nilai dari IPG itu sendiri. Komponen pembentuk tersebut sama dengan yang digunakan dalam pengukuran IPM, yakni angka harapan hidup

(mewakili dimensi kesehatan), angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pendidikan), serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi) yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.

**Gambar 3.4 Indeks Pembangunan Gender Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2019-2021**



Sumber: <https://bali.bps.go.id/indicator/40/132/1/indeks-pembangunan-gender-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>

Dari data pada gambar 3.4 di atas tampak bahwa angka IPG Kota Denpasar tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,04 poin dibandingkan tahun 2019. Jika dibandingkan dengan kondisi IPG Provinsi Bali, IPG Denpasar masih berada di atas

IPG Bali. Ini menandakan kondisi kesetaraan gender di Denpasar masih lebih bagus dibandingkan Bali secara keseluruhan. Dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan gender di beberapa aspek yang terkait dengan indikator IPG seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi disparitas gendernya semakin mengecil. Sebagai informasi, IPG mendekati 100 mengindikasikan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

## **BAB IV**

# **PENDIDIKAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai masalah pendidikan. Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu usaha mengadakan perubahan perilaku (pengetahuan, keterampilan dan sikap) manusia secara teratur sejak lahir sampai mati. Dalam kaitannya dengan belajar, pendidikan dapat pula diartikan sebagai usaha mengubah perilaku orang lain, sedangkan belajar diartikan sebagai usaha aktif seseorang untuk mengubah perilakunya sendiri. Pengertian tersebut menggambarkan bahwa pendidikan dan belajar merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian maka sudah dipastikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi itu dapat dicapai melalui mekanisme pendidikan tersebut.

Sebagaimana dijelaskan UU No. 2 Tahun 1985 yang berbunyi bahwa tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan bangsa.

Akselerasi pembangunan di berbagai bidang (ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan) terus menerus dilakukan. Di Indonesia umumnya dan di Denpasar khususnya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi. Menurut Sinaga dan Sri Hadiati (2001), Sumber Daya Manusia dapat diartikan sebagai suatu daya yang bersumber dari manusia. Daya yang bersumber dari manusia ini dapat pula disebut tenaga atau kekuatan (energi atau power) yang melekat pada manusia, dalam arti mempunyai kompetensi, yang mencakup pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*).

Lebih lanjut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1) diamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Amanat ini mengandung makna bahwa setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun dewasa memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab III Pasal 4 Ayat (1) juga dinyatakan bahwa pendidikan diadakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminasi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Pada Bab IV Pasal 5 Ayat (1) dinyatakan bahwa setiap

warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Berbagai program di bidang pendidikan telah diupayakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Denpasar. Berbagai macam program pendidikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas dasar manusia. Pendidikan dasar merupakan hak setiap warga negara, sehingga pemerintah perlu menjamin bahwa warga negaranya minimal menikmati pendidikan dasar hingga 9 tahun. Untuk memonitor kemajuan partisipasi pendidikan, pemerintah menggunakan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Berikut ini akan dibahas mengenai keadaan pendidikan, dilihat dari analisis gender terhadap beberapa indikator pendidikan di Kota Denpasar.

#### **4.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Bila dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah, masyarakat Kota Denpasar sudah menyadari pentingnya bersekolah. Terlihat dalam Tabel 4.1 bahwa anak usia 7-15 tahun hampir seluruhnya bersekolah, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara usia 16 tahun ke atas, untuk laki-laki berkisar antara

75 hingga 83 persen sementara untuk perempuan berkisar 68 hingga 87 persen. APS penduduk laki-laki cenderung mengalami penurunan pada semua kelompok umur sepanjang periode 2020-2022. Informasi yang diperoleh dari APS tidak memperhitungkan anak pada suatu kelompok yang benar-benar bersekolah pada jenjangnya. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang partisipasi sesuai dengan jenjang pendidikan, indikator APM memang lebih relevan.

**Tabel 4.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Denpasar (2020-2022 )**

Umur (Tahun)	Jenis Kelamin	Tahun		
		2020	2021	2022
7 - 12	Laki-laki	99,10	99,69	98,79
	Perempuan	100	100	100
13-15	Laki-laki	98,48	98,10	98,38
	Perempuan	100	100	99,33
16-18	Laki-laki	83,29	82,01	75,04
	Perempuan	68,92	79,07	87,70

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2023

#### 4.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Pada tahun 2022, APM SD pada penduduk laki-laki sebesar 98,79 persen sementara pada penduduk perempuan 95,75 persen. Artinya, pada tahun

2022 sekitar 98,79 persen penduduk laki-laki dan 98,79 persen penduduk perempuan yang berumur 7-12 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SD sederajat. Sama halnya dengan APM SD, APM SMP untuk penduduk laki-laki angkanya juga lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Sebaliknya pada jenjang SMA, APM penduduk laki-laki lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. APM SMA penduduk laki-laki sebesar 66,87 persen, sedangkan penduduk perempuan sebesar 76,21 persen. Artinya, pada tahun 2022 sekitar 66,87 persen penduduk laki-laki dan 76,21persen penduduk perempuan yang berumur 16-18 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SMA sederajat.

**Tabel 4.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Denpasar (2020-2022)**

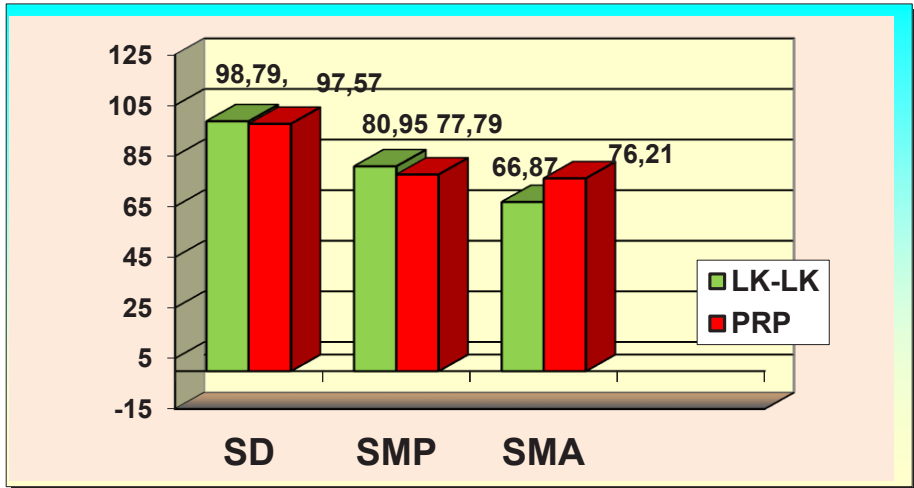
Umur (Tahun)	Jenis Kelamin	Tahun		
		2020	2021	2022
7 - 12	Laki-laki	95,26	97,52	98,79
	Perempuan	93,10	94,95	95,75
13-15	Laki-laki	79,14	76,56	80,95
	Perempuan	80,97	82,11	77,72
16-18	Laki-laki	69,12	70,81	66,87
	Perempuan	61,48	70,13	76,21

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2023

Gambaran umum kondisi APM tingkat SD, SMP, dan SMA di Kota Denpasar dapat dilihat pada grafik berikut.



**Gambar: 4.1 Persentase Angka Partisipasi Murni SD-SMA dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022**



Sumber: BPS Kota Denpasar, 2023

Berdasarkan data yang tercantum pada gambar 4.1 dapat dipahami sebagai berikut APM di Kota Denpasar pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA masih di bawah 100%. Rata-rata APM yang masih di bawah 100 pada semua jenjang pendidikan pada masing-masing kecamatan di Kota Denpasar, perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai penyebab rendahnya APM tersebut. Berdasarkan hasil kajian itu, sangat dimungkinkan untuk merumuskan alternatif pemecahannya secara lebih tepat, sehingga dapat memberikan hasil secara lebih baik.

Dari segi perspektif gender, tampak masih dijumpai perbedaan atau kesenjangan gender pada semua jenjang

pendidikan. Kesenjangan gender APM yang paling tipis atau cukup berimbang terjadi di tingkat SD. Sedangkan APM tingkat SMP dan SMA tampak APM perempuan persentasenya lebih rendah dibandingkan laki-laki.

### 4.3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Indikator lain yang dipakai untuk mengukur partisipasi penduduk di bidang pendidikan adalah angka partisipasi kasar (APK). APK biasanya digunakan untuk melihat gambaran mengenai kondisi siswa/murid pada suatu jenjang pendidikan tertentu, tanpa memperhatikan usia mereka. APK tingkat SD sebagai contoh, dihitung dengan rumus jumlah penduduk yang bersekolah di SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7 s.d 12 tahun dikalikan 100. APK pada berbagai jenjang pendidikan di Kota Denpasar, akan diuraikan sebagai berikut.

**Tabel : 4.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan kota Denpasar Tahun 2022**

Tingkatan Sekolah	Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Persentase (%)
SD/MI	104	102,49	1,45
SMP/MTs	104	92,05	11,49
SMA/MA/SMK	102	126,22	23,74
Rata-rata	103,33	106,92	12,23

Sumber: Disdikpora Kota Denpasar, 2023

Data APK pada Tabel 4.3 tidak terpisah berdasarkan jenis kelamin sehingga tidak bisa dianalisa berdasarkan gender.

Analisa akan dilakukan secara umum saja. Pada jenjang pendidikan SD/MI target APK tahun 2022 adalah 104 namun bisa terealisasi 102,49. Sementara itu untuk APK jenjang pendidikan SMP/MTs targetnya sama dengan jenjang SD yakni 104 namun hanya tercapai 92,05, berarti masih jauh dari target. Berbeda dengan APK tingkat SMA/MA/SMK tercapai 106,92, melewati nilai target 103,33. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

#### **4.4. Jumlah Siswa**

Siswa adalah anak usia sekolah yang berpartisipasi aktif mengikuti pendidikan formal pada tiap-tiap sekolah sesuai dengan penjenjangan yang diberlakukan oleh pemerintah. Jumlah siswa di Kota Denpasar tahun 2021-2022 menurut jenjang pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

##### **4.4.1 Siswa PAUD**

Taman kanak-kanak atau disingkat TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), yaitu usia sampai dengan 6 tahun. Usia anak masuk TK adalah 4-5 tahun dan menyelesaikan pendidikan di usia 6 tahun. Jenjang pendidikan di TK adalah TK 0 Kecil (TK Kecil) dan TK 0 Besar (TK Besar). Pada umumnya para orang tua zaman sekarang terutama di daerah perkotaan

telah memiliki kesadaran dan partisipasi yang sangat tinggi untuk menyekolahkan anak-anaknya di TK.

Jumlah siswa PAUD menurut jenis kelamin dan kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2022 dilihat pada Tabel 4.4 di bawah ini.

**Tabel: 4.4. Jumlah PAUD berdasarkan jenis kelamin di Kota Denpasar pada Tahun 2022**

No	Kecamatan	Tahun 2022		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Denpasar Barat	1.563	1.488	3.011
2	Denpasar Selatan	1.797	1.797	3.594
3	Denpasar Timur	1.189	1.061	2.250
4	Denpasar Utara	1.488	1.348	2.836
Jumlah		6.037	5.654	11.691

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar, 2023

Dari Tabel 4.4 tampak bahwa jumlah anak PAUD terbanyak ada di Denpasar Selatan yakni 3594 orang yang terdiri dari 1.797 anak laki-laki dan 1.797 anak perempuan. Kebetulan jumlah anak laki-laki dan anak perempuan sama Sementara jumlah anak PAUD paling sedikit ada di Kecamatan Denpasar Timur yakni 2250 orang yang terdiri dari 1189 anak laki-laki dan 1061 anak perempuan. Jika dilihat dari persepektif gender secara absolut tampaknya jumlah anak laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan

Ada satu hal penting yang mesti diperhatikan dalam kaitan dengan Sekolah Taman Kanak-kanak, yaitu sistem pendidikan dan pengajaran. Sistem pembelajaran di TK tidak jauh berbeda dengan di SD, SMP, SMA, yaitu menekankan kecerdasan intelektualitas. Padahal berdasarkan kurikulum TK, pendidikan dan pengajaran di TK seharusnya yang lebih ditekankan adalah pada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. ([Id.wikipedia.org/..//Taman\\_kanak-kanak](https://id.wikipedia.org/..//Taman_kanak-kanak)). Kedua, yang perlu dipikirkan dan ditindaklanjuti adalah memberikan porsi pembelajaran yang berimbang antara bidang sosial dengan bidang sains. Pembelajaran sosial seperti bagaimana anak-anak bisa berbagi makanan atau cerita, berterima kasih, bertenggang rasa, bermain dan makan bersama, dan lain-lain sangat penting dalam pembentukan karakter. Dengan demikian anak-anak sejak dini telah belajar tentang nilai-nilai kebersamaan, kejujuran, dapat mengemukakan pendapat, menghargai barang dan atau orang lain.

#### **4.4.2 Siswa Sekolah Dasar (SD)**

Siswa adalah anak usia sekolah yang berpartisipasi aktif mengikuti pendidikan formal persekolahan sesuai dengan penjenjangan yang diberlakukan oleh pemerintah. Jumlah siswa

SD menurut jenis kelamin dan kecamatan 2021-2022 di Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini.

**Tabel : 4.5. Jumlah Siswa SD menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2022**

No	Kecamatan	Tahun 2022		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Denpasar Barat	10.788	10.143	20.931
2	Denpasar Selatan	13.000	12.072	25.072
3	Denpasar Timur	8.808	8.040	16.848
4	Denpasar Utara	10.490	9.814	20.304
Jumlah		43.086	40.069	83.155

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar, 2023

Tabel 4.5 yang dikutip dari Dinas Pendidikan Kota Denpasar menggambarkan secara keseluruhan jumlah siswa SD tahun 2022 sebanyak 83.155 orang dengan rincian laki-laki 43.086 orang dan perempuan 40.069 orang. Secara rinci jumlah siswa SD terbanyak ada di Kecamatan Denpasar Selatan yakni 25.072 orang, dan terkecil ada di Kecamatan Denpasar Timur yakni sebanyak 16.848 orang. Dilihat dari perspektif gender tampak siswa laki-laki lebih banyak dibandingkan siswa perempuan. Ini berarti kesenjangan gender masih terjadi di jenjang pendidikan SD. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk mengetahui secara pasti faktor penyebabnya tentu diperlukan kajian khusus terkait hal ini.

### 4.4.3 Siswa SMP

Jika dibandingkan dengan siswa sekolah Dasar (SD) jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMP di Kota Denpasar pada tahun 2022 jumlahnya jauh lebih kecil. Secara rinci jumlah siswa SMP di Kota Denpasar pada tahun 2022 seperti terpapar pada Tabel 4.6 berikut ini.

Jika dilihat sera rinci per kecamatan tampak bahwa di kecamatan Denpasar Timur jumlah siswanya paling sedikit yakni hanya 5.915 orang yang terdiri dari 3.016 siswa laki-laki dan 2.899 siswa perempuan Sementara itu jumlah siswa terbanyak ada di Denpasar Utara yakni 10.849 orang yang terdiri dari 5506 laki-laki dan 5.343 perempuan. Secara total jumlah siswa SMA di kota Denpasar tahun 2022 berjumlah 31.680 siswa.

**Tabel : 4.6. Jumlah Siswa SMP menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2022**

No	Kecamatan	Tahun 2022		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kec. Denpasar Barat	3.868	3.385	7.253
2	Kec. Denpasar Selatan	4.021	3.642	7.663
3	Kec. Denpasar Timur	3.016	2.899	5.915
4	Kec. Denpasar Utara	5.506	5.343	10.849
Jumlah		16.411	15.269	31.680

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar, 2023

Jika dilihat dari perspektif gender tampak bahwa pada jenjang pendidikan SMP jumlah siswa laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan siswa perempuan. Hal ini kemungkinan

disebabkan jumlah penduduk usia 12 – 15 tahun di kota Denpasar lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan.

#### 4.4.4 Jumlah Siswa SMA dan SMK

Anggapan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan biasanya jumlah siswa akan semakin menurun. Hal ini terjadi pula di Kota Denpasar dimana jumlah siswa di jenjang pendidikan SMA dan SMK jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah siswa SD dan SMP. Secara rinci kondisi siswa SMA dan SMK di Kota Denpasar seperti terlihat pada Tabel 4.7 berikut ini.

**Tabel : 4.7. Jumlah Siswa SMA di Kota Denpasar menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2022**

No	Kecamatan	Tahun 2022		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kec. Denpasar Barat	1.953	2.163	4.116
2	Kec. Denpasar Selatan	2.949	3.069	6.018
3	Kec. Denpasar Timur	1.144	1.223	2.367
4	Kec. Denpasar Utara	3.370	3.731	7.101
Jumlah		9.416	10.186	19.602

Sumber: Disdikpora Provinsi Bali, 2023

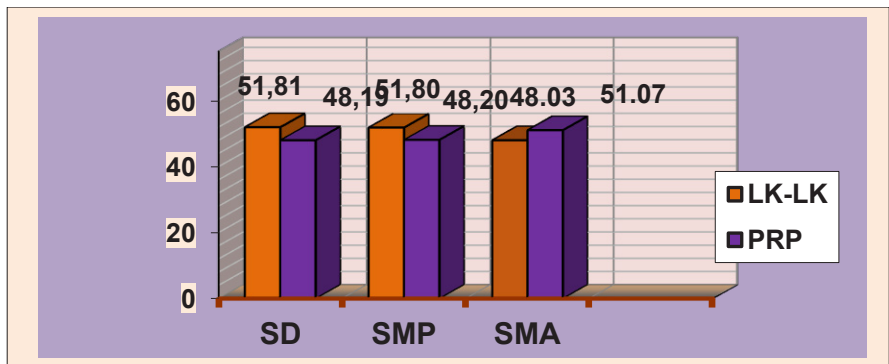
Dari data yang tertera pada Tabel 4.7 tampak bahwa jumlah SMA di kota Denpasar secara keseluruhan berjumlah 19.602 yang terdiri dari 9.416 siswa laki-laki dan 10.186 siswa



perempuan. Jika dilihat dari perspektif gender pada jenjang pendidikan ini ternyata jumlah siswa perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan siswa laki-laki. Ditinjau dari sebaran per kecamatan tampak jumlah siswa terbanyak ada di Denpasar Utara, dan jumlah siswa paling sedikit ada di Denpasar Timur.

Secara umum perbandingan persentase siswa laki-laki dan perempuan dari jenjang pendidikan SD – SMA di Kota Denpasar seperti terlihat pada gambar berikut.

**Gambar: 4.2 Persentase Siswa SD-SMA Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022**



Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar, 2023

Dari gambar di atas tampak bahwa kesenjangan gender di dunia pendidikan terutama pada akses dan pemerataan di jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA sudah tidak terlalu menonjol. Yang menarik kondisi saat ini sepertinya agak berbeda dengan tahun sebelumnya dimana semakin tinggi jenjang pendidikan maka jumlah siswa perempuan semakin

sedikit, namun saat ini di Kota Denpasar tampak semakin tinggi jenjang pendidikan jumlah siswa perempuan semakin tinggi. Ini artinya tidak ada lagi diskriminasi terhadap anak perempuan di bidang pendidikan.

## **4.5. Guru**

### **4.5.1 Guru Menurut Jenjang Pendidikan**

Keberadaan (eksistensi) guru adalah salah satu unsur yang secara kuantitas dan kualitas, memegang peranan penting. Oleh karena kualitas peserta didik, banyak ditentukan oleh guru melalui peranan yang harus dijalankannya. Betapa besar dan pentingnya peranan guru dalam dunia pendidikan. Untuk mencapai hal tersebut berbagai unsur yang terlibat di dalamnya juga harus memiliki kualitas yang baik.

Maju mundurnya satu Negara sangat ditentukan oleh maju mundurnya kualitas hasil pendidikan atau kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi, banyak ditentukan oleh guru yang jumlah dan mutunya memadai. Jika kualitas sumber daya manusia yang bermutu tinggi dapat diciptakan maka pembangunan apa saja di negeri ini akan sukses, termasuk pembangunan militer, pertahanan dan keamanan. Mengenai jumlah guru SD menurut jenjang pendidikan di Kota Denpasar tahun 2022 akan diuraikan sebagai berikut.

**Tabel : 4.8. Jumlah Guru SD menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022**

Kecamatan	Jenjang Pendidikan							
	SMA		Dip 1/2/3		S1		S2	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Denpasar Utara	14	16	3	11	192	644	17	28
Denpasar Timur	7	12	4	6	192	574	14	33
Denpasar Selatan	12	20	4	8	251	734	25	45
Denpasar Barat	5	11	6	11	229	711	20	39
Jumlah	38	59	17	36	864	2.663	76	145

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar, 2023

Dari Tabel 4.8 tampak bahwa guru sekolah dasar di Kota Denpasar kebanyakan sudah bergelar sarjana strata satu (S1) dan sarjana strata dua (S2). Namun demikian masih ada juga yang tidak mempunyai gelar atau hanya berpendidikan SMA. Jika dilihat dari perspektif gender tampak bahwa jumlah guru SD di Kota Denpasar lebih banyak perempuan yakni 2.903 orang jika dibandingkan guru laki-laki yang hanya berjumlah 995 orang. Hal ini dapat dilihat dari angka absolut yang tampak pada Tabel 4.6.

Secara umum tidak hanya di Kota Denpasar guru SD didominasi oleh perempuan namun di daerah lain kondisinya juga seperti itu. Biasanya guru PAUD dan guru SD umumnya kebanyakan perempuan karena pada jenjang pendidikan ini identik dengan pengasuhan sehingga ada kecenderungan dianggap lebih pantas dilakoni oleh perempuan.

#### **4.5.2 Guru Yang Tersertifikasi**

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai profesionalitas para guru. Melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Guru dan Dosen diamanatkan, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik dan sehat jasmani dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian diharapkan dicapai seorang guru yang baik yakni guru yang memenuhi persyaratan kemampuan profesional, baik sebagai pendidik maupun sebagai pengajar atau pelatih. Dalam hal ini sangat penting artinya standar mutu profesional guru untuk menjamin proses pembelajaran yang baik dan hasil yang bermutu dari proses tersebut. Berdasarkan pemikiran yang terkandung di dalam amanat tersebut, setiap guru profesional harus memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik, hanya diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan tertentu yang telah digariskan dalam undang-undang tersebut. Berikut akan dijelaskan jumlah guru yang tersertifikasi pada beragam jenjang pendidikan di Kota Denpasar.

**Tabel: 4.9. Jumlah Guru SD yang Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022**

Bidang Studi Sertifikasi	Tahun 2022	
	Laki-laki	Perempuan
Bahasa dan Sastra Bali	5	27
Bahasa Inggris	2	16
Bahasa Jepang	1	0
Bimbingan dan Konseling (Konselor)	0	0
Ekonomi	0	0
Guru Kelas SD/MI	290	1.120
Kependidikan Dasar	3	12
Kewirausahaan	0	1
Lainnya	0	3
Matematika	7	10
Muatan Lokal Bahasa Daerah	5	12
Pendidikan Agama Budha	2	3
Pendidikan Agama Hindu	18	102
Pendidikan Agama Islam	21	27
Pendidikan Agama Katholik	1	3
Pendidikan Agama Kong hu chu	0	3
Pendidikan Agama Kristen	0	2
Bimbingan dan Konseling (Konselor)	0	0
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	83	23
Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn)	0	0
Seni Budaya	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>439</b>	<b>1.365</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar, 2023

Dari Tabel 4.9 tampak bahwa secara keseluruhan guru SD yang sudah tersertifikasi di Kota Denpasar berjumlah 1.804 orang yang terdiri dari 439 guru laki-laki dan 1.365 guru perempuan. Dengan demikian jika dilihat dari perspektif gender tampaknya memang terjadi kesenjangan antara guru laki-laki dan perempuan. Hal ini terjadi karena guru pada jenjang pendidikan SD tampaknya memang lebih banyak perempuan. Demikian juga pada jenjang pendidikan SMP kondisinya hampir sama dengan kondisi guru SD seperti tampak pada tabel berikut ini.

**Tabel: 4.10. Jumlah Guru SMP yang Tersertifikasi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022**

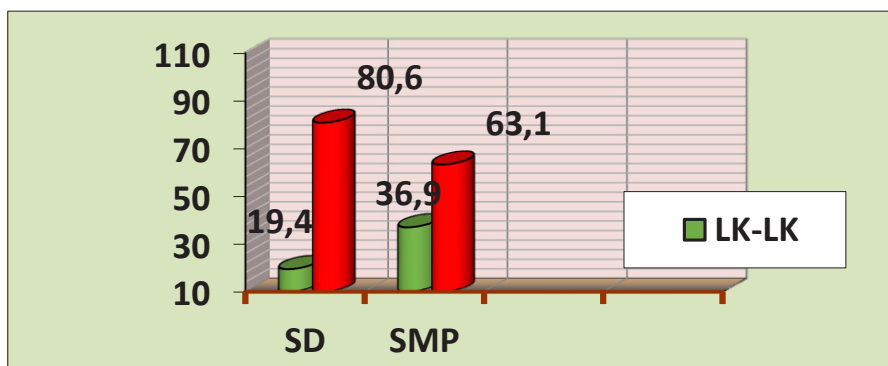
Bidang Studi Sertifikasi	Tahun 2022	
	Laki-laki	Perempuan
Bahasa Bali	2	6
Bahasa Indonesia	21	54
Bahasa Inggris	20	60
Bahasa Prancis	0	1
Bimbingan dan Konseling (Konselor)	6	27
Fisika	4	1
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	28	60
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	24	42
Keterampilan	0	0
KKPI	1	0
Matematika	33	45
Muatan Lokal Bahasa Daerah	11	12
Pendidikan Agama Budha	0	0
Pendidikan Agama Hindu	8	18
Pendidikan Agama Islam	4	2
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	21	30
Pendidikan Agama Katholik	0	0
Pendidikan Agama Kong hu chu	1	1
Pendidikan Agama Kristen Protestan	1	1

Pendidikan Biologi	1	4
Pendidikan Ekonomi	0	1
Pendidikan Jasmani (OR dan kesehatan)	33	5
Sejarah	0	0
Seni Budaya	8	28
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	5	3
Lainnya	0	1
Jumlah	232	402

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar, 2023

Sesuai dengan data yang ditampilkan pada tabel tersebut dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan jumlah guru SMP di Kota Denpasar yang tersertifikasi tahun 2022 berjumlah 634 orang yang terdiri dari 234 ( 36,9%) laki-laki dan 402 (63,1%) perempuan. Dalam konteks ini artinya masih terjadi kesenjangan gender. Perbandingan persentase guru SD dan SMP yang sudah tersertifikasi seperti tampak pada gambar berikut.

**Gambar: 4.3. Persentase Guru SD dan SMP yang Sudah Tersertifikasi Tahun 2022 di Kota Denpasar**



Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar, 2023

### 4.5.3 Kepala Sekolah

Pucuk pimpinan (*top leader*) pada setiap sekolah disebut kepala sekolah. Kepala sekolah inilah yang bertugas untuk membimbing, mengarahkan dan menggerakkan bawahannya menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai dalam bidang pendidikan. Maju mundurnya suatu sekolah, banyak ditentukan oleh kreativitas dan aktivitas kepala sekolah. Berikut akan diuraikan keberadaan kepala sekolah SD dan SMP yang ada di Kota Denpasar Tahun 2022.

**Tabel : 4.11. Jumlah Kepala Sekolah SD menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022**

Jenjang Pendidikan	Tahun 2022	
	Laki-laki	Perempuan
<S1	0	0
S1	47	99
>S1	20	39
Jumlah	67	138

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar, 2023

Dari Tabel 4.11 di atas tampak bahwa jumlah kepala sekolah di Kota Denpasar tahun 2022 adalah 205 orang yang terdiri dari 67 orang laki-laki dan 138 orang perempuan atau



kalau dipresentasikan maka perbandingannya adalah 32,7% : 67,3% Mengingat guru SD masih didominasi oleh perempuan maka kepala sekolah juga masih didominasi perempuan.

Demikian juga halnya dengan kepala sekolah pada jenjang pendidikan SMP tampaknya juga lebih banyak perempuan seperti terpapar pada Tabel 4.11 berikut ini.

**Tabel : 4.12. Jumlah Kepala Sekolah SMP menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021**

Jenjang Pendidikan	Tahun 2022	
	Laki-laki	Perempuan
<S1	0	1
S1	19	18
>S1	10	12
Jumlah	29	31

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar, 2023

Dari data pada Tabel 4.12 terlihat bahwa jumlah kepala sekolah SMP adalah 60 orang yang terdiri dari 29 laki-laki dan 31 perempuan, jadi selisih hanya dua orang antara laki-laki dan perempuan, sudah mendekati seimbang. Dari gambaran data pada Tabel 4.9 dan Tabel 4.10 dapat dikatakan bahwa akses

perempuan untuk menjadi kepala sekolah sudah terbuka. Dalam konteks ini perempuan tidak terdiskriminasi.

Sementara itu untuk jumlah kepala sekolah SMA/SMK yang ada di Kota Denpasar seperti tampak pada Tabel 4.13 berikut ini.

**Tabel: 4.13 Jumlah Kepala Sekolah SMA Negeri dan Swasta menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022**

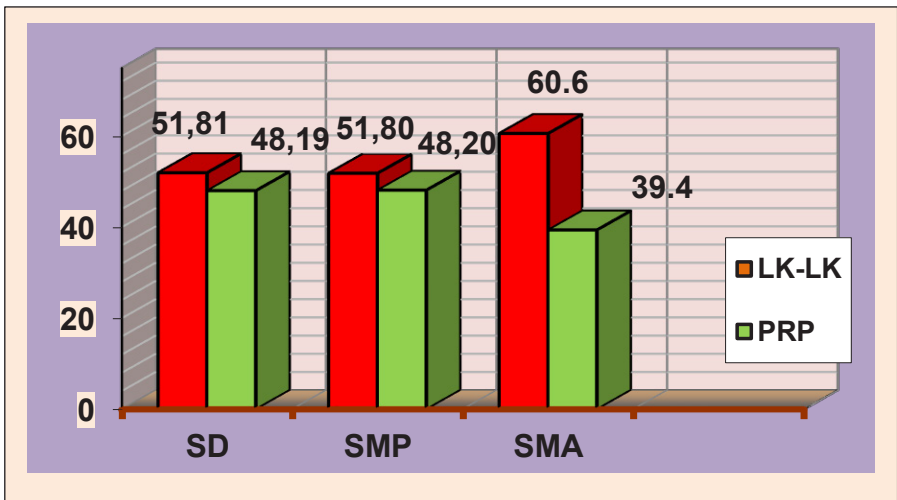
Jenjang Pendidikan	Tahun 2022	
	Laki-laki	Perempuan
<S1	0	0
S1	4	6
>S1	16	7
Jumlah	20	13

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali, 2023

Dari tabel ini tampak bahwa jumlah kepala sekolah SMA seara keseluruhan untuk negeri dan swasta sebanyak 33 orang yang terdiri dari 20 laki-laki dan 13 perempuan. Jadi pada jenjang pendidikan ini jumlah kepala sekolah didominasi oleh laki-laki.

Bila dipersentasekan, maka perbandingan kepala sekolah yang laki-laki dan perempuan di jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA maka tampak seperti grafik berikut ini.

**Gambar 4.4 Persentase Kepala Sekolah SD dan SMP, SMA berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022**



Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar, 2023

## **BAB V**

# **KESEHATAN**

Lahir hidup (*live birth*) dapat dipahami sebagai peristiwa keluarnya atau terpisahnya suatu hasil konsepsi dari rahim ibunya, tanpa memperdulikan lama kehamilan, dan setelah itu bayi bernapas atau menunjukkan tanda-tanda kehidupan lain seperti detak jantung, denyut nadi, tali pusar dipotong, atau masih melekat dengan plasenta (WHO, 1995). Kelahiran menjadi penting, sebab melalui kelahiran artinya telah dimulai suatu babak baru kehidupan sekaligus harapan baru akan masa depan.

### **5.1 Angka Kelahiran Bayi**

Penghitungan jumlah kelahiran di suatu wilayah menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bertolak dari jumlah kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Istilah lain dari pengertian tersebut ialah Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR). Tabel di bawah merupakan data kelahiran bayi di Kota Denpasar berdasarkan empat kecamatan.

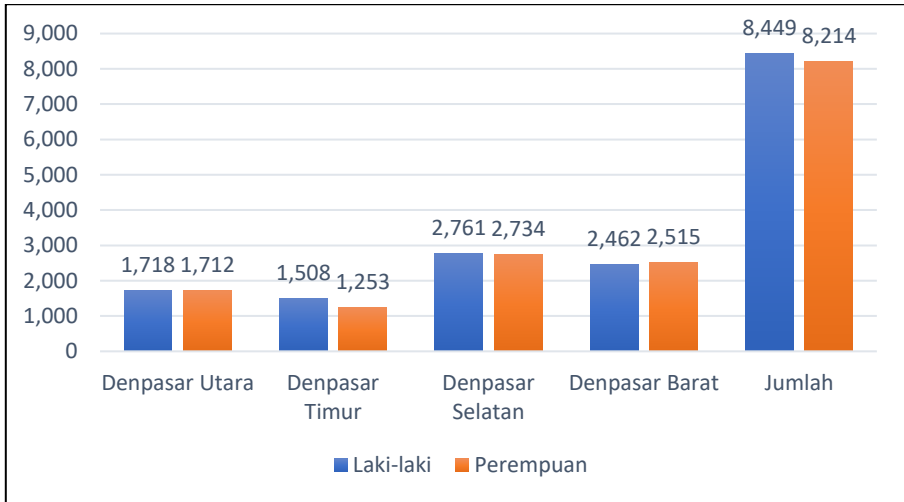
**Tabel: 5.1. Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 dan 2022**

No	Kecamatan	2021		2022	
		L	P	L	P
1.	Denpasar Utara	1.718	1.712	1.936	1.860
2.	Denpasar Timur	1.508	1.253	1.613	1.442
3.	Denpasar Selatan	2.761	2.734	2.750	2.697
4.	Denpasar Barat	2.462	2.515	2.615	2.530
<b>Jumlah</b>		<b>8.449</b>	<b>8.214</b>	<b>8.914</b>	<b>8.529</b>

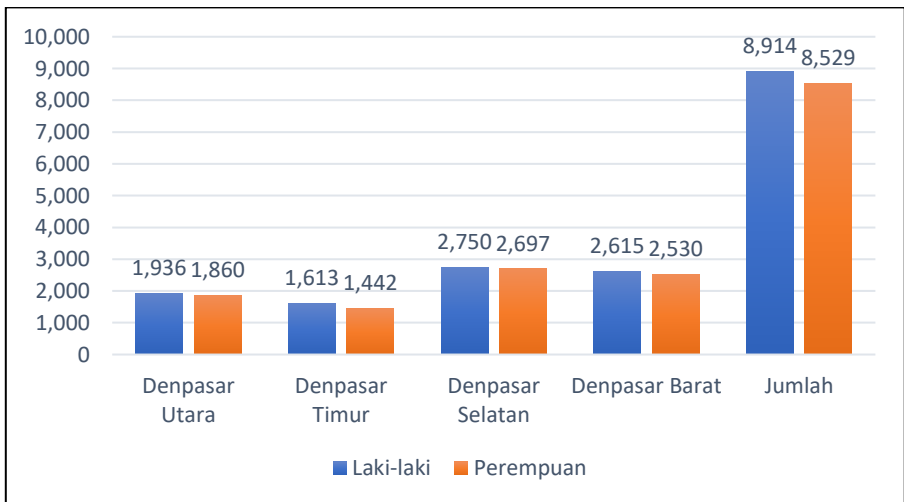
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2023

Dari Tabel 5.1. tentang Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar berdasarkan jenis kelamin dan empat wilayah kecamatan pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan terjadi peningkatan. Peningkatan secara signifikan terjadi khususnya pada bayi berjenis kelamin laki-laki yaitu lebih dari 4000 bayi. Gambar 5.1. dan 5.2. di bawah menunjukkan jumlah angka kelahiran bayi di Kota Denpasar pada tahun 2021 dan 2022 dalam bentuk grafik.

**Gambar 5.1. Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022**



**Gambar 5.2. Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022**



Dari tabel dan grafik, data kuantitatif menunjukkan bahwa secara akumulatif kelahiran bayi pada tahun 2021 berjumlah 16.663 jiwa mengalami peningkatan di tahun berikutnya menjadi 17.443. Lonjakan sejumlah 780 kelahiran bayi setara dengan 4,6%. Di lain sisi, dapat dilihat bahwa selisih jumlah angka kelahiran bayi laki-laki dan perempuan adalah 235 anak pada tahun 2021 dan 385 pada tahun 2022. Adapun selisih dari kedua tahun tersebut dipimpin oleh jumlah bayi laki-laki yang lebih banyak. Melalui Tabel 5.1. juga turut dapat disaksikan bersama kelahiran tertinggi terjadi di Kecamatan Denpasar Selatan dengan total kelahiran 5.495 bayi di tahun 2021 dan 5.447 di tahun 2022. Sedangkan untuk wilayah dengan tingkat kelahiran bayi terendah adalah Denpasar Timur.

## **5.2. Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 dan 2022**

Masa balita merupakan masa kehidupan yang sangat penting dan perlu perhatian serius. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2011) menjelaskan balita merupakan usia di mana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan pesat dengan usia 12 bulan sampai dengan 59 bulan. Pada masa ini balita perlu memperoleh zat gizi dari makanan sehari-hari dalam jumlah yang tepat dan kualitas yang baik. Selain itu, masa balita secara sosiologis menjadi tahap awal seorang anak untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk pemahaman tentang diri.

Pada tahap balita juga termasuk bagaimana anak berupaya melakukan kegiatan meniru meski belum sempurna.

Dalam proses tumbuh kembang setiap anak berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti nutrisi, lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi keluarga. Pada Tabel 5.2. menunjukkan jumlah angka balita di Kota Denpasar pada tahun 2021 dan 2022. Secara spesifik data juga dihadirkan dalam bentuk grafik.

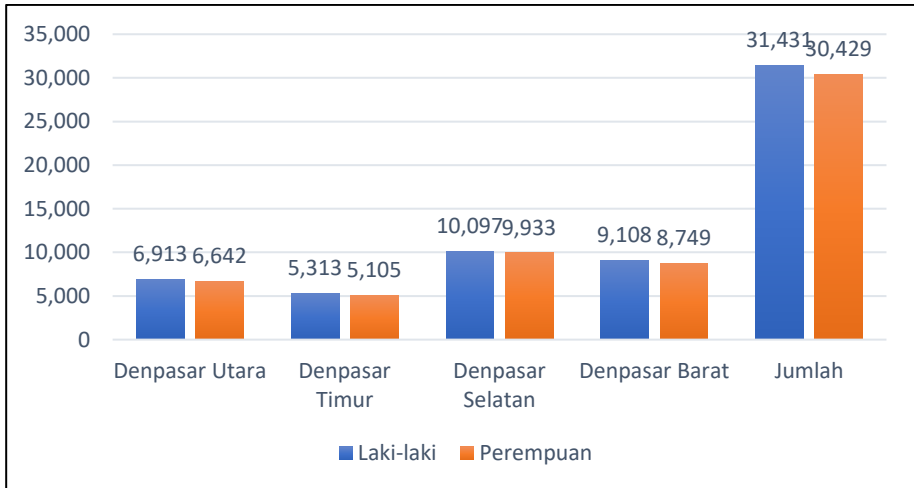
**Tabel : 5.2. Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021 dan 2022**

No	Kecamatan	2021		2022	
		L	P	L	P
1.	Denpasar Utara	6.913	6.642	7.947	7.508
2.	Denpasar Timur	5.313	5.105	6.336	6.440
3.	Denpasar Selatan	10.097	9.933	11.154	10.941
4.	Denpasar Barat	9.108	8.749	9.721	8.989
<b>Jumlah</b>		<b>31.431</b>	<b>30.429</b>	<b>35.158</b>	<b>33.878</b>

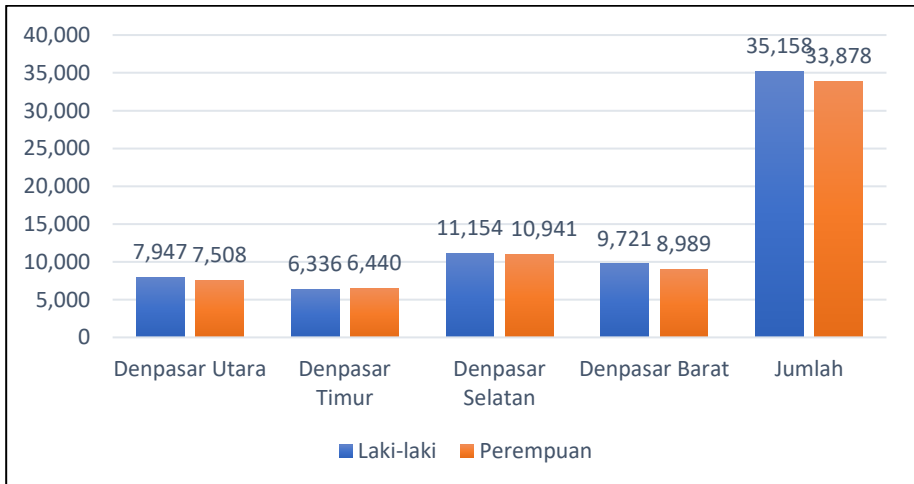
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2023



**Gambar 5.3. Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021**



**Gambar 5.4. Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022**



Dari tabel dan grafik di atas memperlihatkan data jumlah balita pada tahun 2021 berjumlah 61.860, dan pada tahun 2022 berjumlah 69.036. Dengan kata lain, terjadi peningkatan jumlah balita sebanyak 7.176 balita atau setara dengan 12%. Peningkatan atau bertambahnya jumlah balita di dominasi oleh daerah Denpasar Selatan baik pada tahun 2021 dan 2022. Adapun kecamatan dengan jumlah angka balita terendah ialah Denpasar Timur. Sejalan dengan angka kelahiran bayi, jumlah balita dengan jenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan balita jenis kelamin perempuan. Selisih pada tahun 2021 berdasarkan jenis kelamin sejumlah 1.002 balita dan pada tahun 2022 sejumlah 1.280 balita.

### **5.3. ASI Eksklusif di Kota Denpasar menurut Kecamatan Tahun 2021 dan 2022**

Air Susu Ibu (ASI) adalah sumber asupan nutrisi bagi bayi baru lahir, dengan sifat eksklusif sebab pemberiannya berlaku pada bayi berusia 0 bulan sampai 6 bulan yangmana merupakan periode emas perkembangan anak sampai menginjak 2 tahun. Beberapa manfaat ASI eksklusif antara lain mencegah terserang penyakit serta membantu perkembangan otak dan fisik bayi. Beberapa data kajian dan fakta global dalam *The Lancet Breastfeeding Series* tahun 2016 membuktikan ASI eksklusif mampu menurunkan angka kematian karena infeksi sebanyak 88% pada bayi berusia kurang dari 3 bulan.

Selain bagi anak, pemberian ASI eksklusif bagi ibu menyusui juga memiliki beberapa manfaat. Pertama, mengatasi rasa trauma terutama paska persalinan. Paska melahirkan biasanya ibu rentan terkena *baby blues syndrome*, terlebih hal ini biasanya terjadi pada ibu yang belum terbiasa bahkan tidak bersedia memberikan ASI eksklusif pada bayi. Kedua, mencegah kanker payudara. Kementerian Kesehatan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (2018) menekankan bahwa salah satu pemicu kanker payudara adalah kurangnya pemberian ASI eksklusif untuk bayi. Secara khusus pemberian ASI eksklusif di Kota Denpasar sebagai berikut.

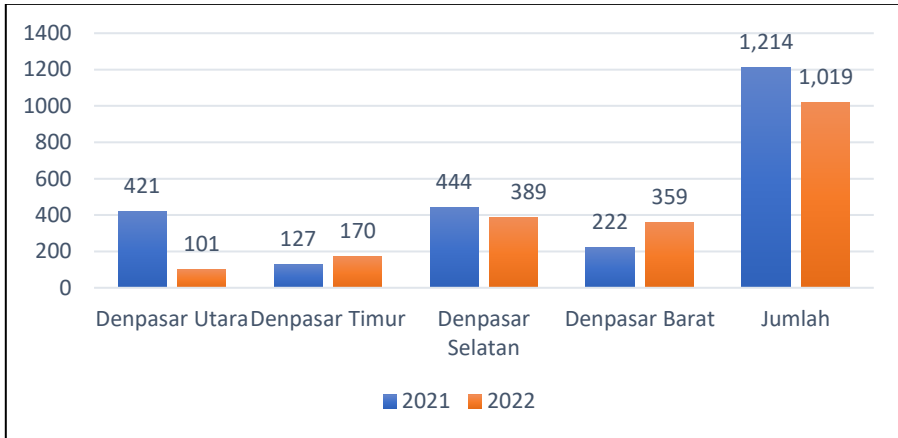
**Tabel 5.3. ASI Eksklusif di Kota Denpasar menurut Kecamatan Tahun 2021 dan 2022**

No	Kecamatan	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Denpasar Utara	421	101
2.	Denpasar Timur	127	170
3.	Denpasar Selatan	444	389
4.	Denpasar Barat	222	359
<b>Jumlah</b>		<b>1.214</b>	<b>1.019</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2023

Berdasarkan Tabel 5.3. tentang ASI Eksklusif di Kota Denpasar menurut Kecamatan Tahun 2021 dan 2022, dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut.

**Gambar 5.5. ASI Eksklusif di Kota Denpasar menurut Kecamatan Tahun 2021 dan 2022**



Data di atas memperlihatkan secara kuantitatif ASI eksklusif dari tahun 2021 berjumlah 1.214 turun menjadi 1.019 pada tahun 2022. Penurunan tersebut mencapai angka 195 kasus atau setara dengan 16,1%. Kondisi ini sangat kontradiktif jika dikontekskan dengan tabel tentang jumlah kelahiran bayi pada tahun 2021. Maka dari itu, diperlukan penelitian lebih lanjut tentang fakta tersebut, mengingat urgensi ASI eksklusif untuk membentuk kualitas sumber daya manusia. Langkah strategis lainnya dapat dipilih seperti sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran pemberian ASI eksklusif. Sosialisasi akan menjadi efektif jika melibatkan keluarga terdekat khususnya suami dan pendamping utama lainnya sebab dukungan dari lingkungan sekitar sangat mempengaruhi proses pemberian ASI eksklusif oleh ibu pada bayi.

#### **5.4. Status Gizi di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022**

Masalah gizi perlu mendapat perhatian serius demi terciptanya tujuan pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Dari 17 tujuan dan 169 target yang ditetapkan, salah satunya ialah mengakhiri kelaparan dan mencapai nutrisi yang lebih baik. Pemenuhan kebutuhan gizi menjadi penting sebab sebagian besar gangguan perkembangan pada anak sangat terkait dengan status gizi. Biasanya permasalahan gizi akan menyebabkan terjadinya malnutrisi, dehidrasi, berat badan kurang, ketidakseimbangan elektrolit, gangguan perkembangan kognitif dan kecemasan, dan paling parah ialah kematian.

Pengukuran status Gizi paling mudah dimengerti masyarakat umum ialah dengan menggunakan indeks BB/U (Berat Badan menurut Umur). Indeks BB/U ialah pengukuran total berat badan termasuk air, lemak, tulang dan otot (As'ad, 2002). Status Gizi dengan indikator BB/U menurut baku WHO NCHS kategori Z- Score Status gizi lebih  $>2,0$  SD. Status gizi baik  $-2,0$  SD sampai  $2,0$  SD. Status gizi kurang  $<-2,0$  SD. Status gizi buruk  $\leq -3,0$  SD (Persagi, 2003). Secara khusus gambaran tentang status gizi dari masyarakat Kota Denpasar pada tahun 2021-2022 terlihat pada tabel 5.4.

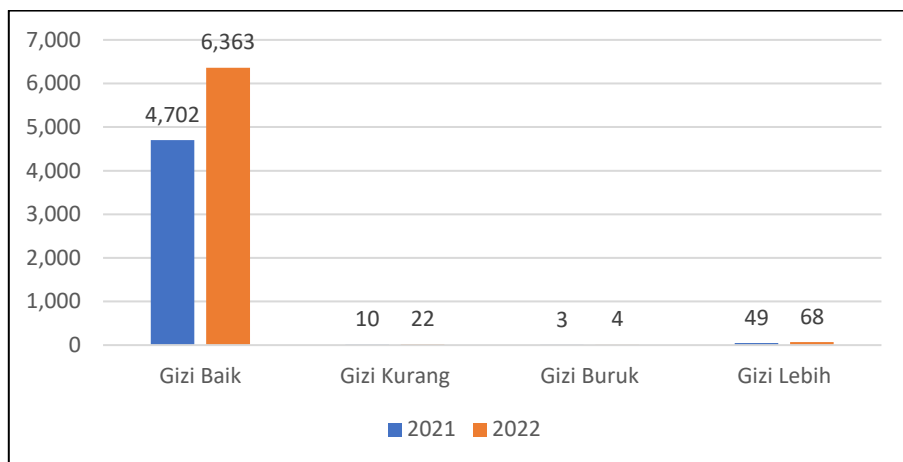
**Tabel : 5.4. Status Gizi di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022**

No	Kecamatan	Status Gizi	2021	2022
1.	Denpasar Utara	Gizi Baik	4.702	6.363
		Gizi Kurang	10	22
		Gizi Buruk	3	4
		Gizi Lebih	49	68
2.	Denpasar Timur	Gizi Baik	3.319	3.781
		Gizi Kurang	6	5
		Gizi Buruk	3	0
		Gizi Lebih	92	105
3.	Denpasar Selatan	Gizi Baik	3.814	6.109
		Gizi Kurang	42	11
		Gizi Buruk	16	1
		Gizi Lebih	68	46
4.	Denpasar Barat	Gizi Baik	2.100	3.763
		Gizi Kurang	23	36
		Gizi Buruk	2	4
		Gizi Lebih	95	191

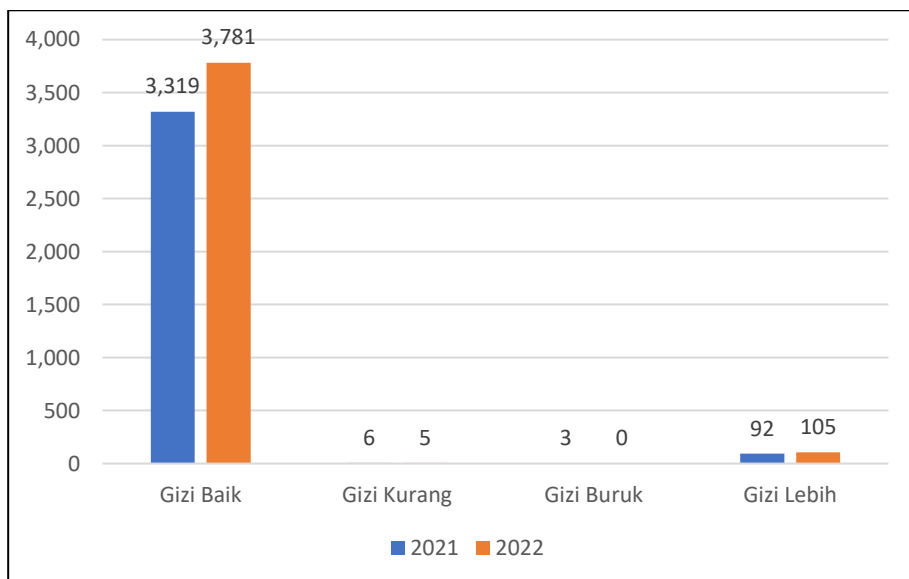
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2023

Berdasarkan tabel di atas, secara spesifik akan dihadirkan status gizi di Kota Denpasar dalam bentuk grafik dari masing-masing kecamatan.

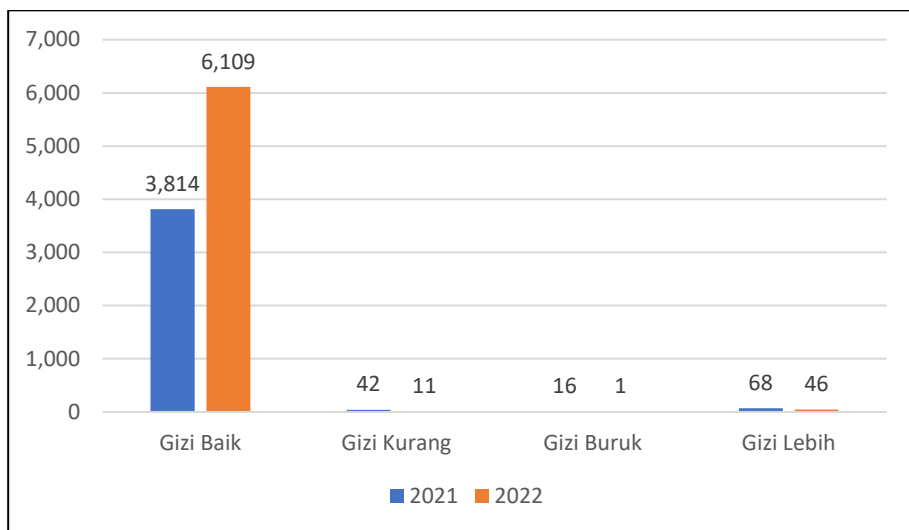
**Gambar 5.6 Status Gizi di Kecamatan Denpasar Utara tahun 2021 dan 2022**



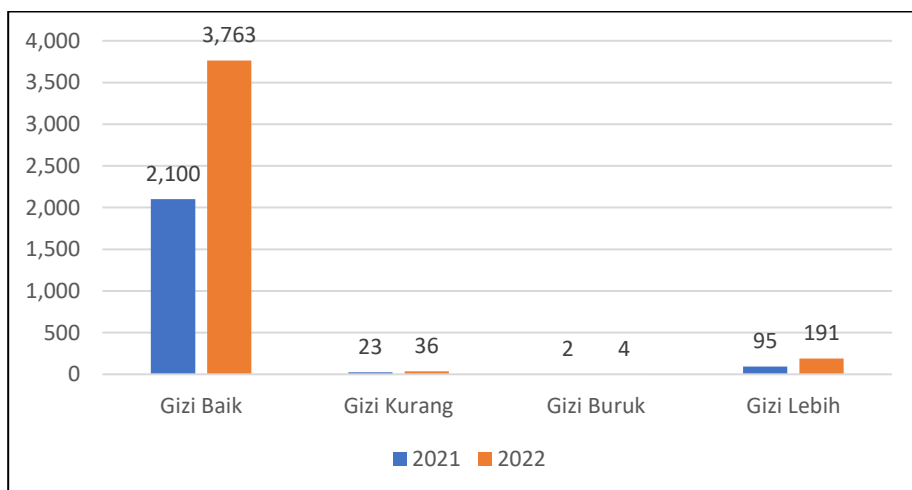
**Gambar 5.7 Status Gizi di Kecamatan Denpasar Timur tahun 2021 dan 2022**



**Gambar 5.8 Status Gizi di Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2021 dan 2022**



**Gambar 5.9 Status Gizi di Kecamatan Denpasar Barat tahun 2021 dan 2022**





Berdasarkan data statistik pada tabel dan grafik tentang Status Gizi di Kota Denpasar tahun 2021 dan 2022, memberikan pemahaman bahwa jumlah status gizi baik mengalami peningkatan pada tahun 2022. Peningkatan bahkan terjadi secara signifikan di setiap kecamatan, di mana di Denpasar Utara terdapat peningkatan sejumlah 1.161 kasus, Denpasar Timur mengalami peningkatan sejumlah 462 kasus, Denpasar Selatan mengalami peningkatan sejumlah 2.295 kasus, dan Denpasar Barat sejumlah 1.663 kasus. Di lain sisi perlu diperhatikan kembali bahwa terdapat peningkatan kasus gizi buruk dan gizi kurang di Kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Barat. Hal ini perlu dikaji secara lebih holistik mengingat pentingnya gizi bagi anak.

### **5.5. Pojok ASI di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022**

Pojok ASI atau kerap disebut ruang laktasi adalah sebuah ruangan khusus yang sengaja disediakan guna memberikan privasi kepada seorang ibu dalam menyusui secara langsung ataupun memerah ASI. Ruang laktasi menjadi penting mengingat urgensi pemberian ASI eksklusif bagi tumbuh kembang bayi, sehingga diperlukan ruangan khusus bagi ibu yang bekerja dan tidak sempat atau jauh dari buah hatinya agar anak tetap mendapatkan ASI. Dukungan penuh dari negara terlihat melalui peraturan PP No. 33 tentang Pemberian ASI Eksklusif, Permen Kesehatan Republik Indonesia No. 15 Tahun

2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu, dan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pasal 83 yang berbunyi:

**“Pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.”**

Komitmen kuat pemerintah melalui segenap kebijakan akhirnya melahirkan berbagai pojok asi atau ruang laktasi baik di ruang publik maupun perkantoran. Kewajiban penyediaan ruang menyusui atau ruang laktasi terjamin dalam Pasal 6 ayat 1 Permen 15/2013 yang mewajibkan seluruh pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum untuk memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan dan/ atau di luar ruangan untuk menyusui dan/atau memerah ASI. Bahkan pada UU No. 36 Tahun 2009 menegaskan pemberian sanksi bagi korporasi yang menghalangi pemberian ASI eksklusif baik dalam konteks pidana penjara maupun denda terhadap pengurusnya. Apabila pelanggaran dikategorikan berat, pemerintah tidak segan untuk mencabut ijin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali sudah sepatutnya mencerminkan dukungan pada penyediaan ruang laktasi bagi para ibu menyusui. Di bawah ini merupakan data jumlah pojok ASI atau ruang laktasi pada tahun 2021 dan 2022.

**Tabel : 5.5. Pojok ASI di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022**

No	Instansi	Tahun	
		2021	2022
1	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	1	1
2	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	1	1
3	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	1	1
4	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat	1	1
5	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat	1	1
6	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur	1	1
7	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur	1	1
8	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	1	1
9	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	1	1
10	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	1	1
11	UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	1	1
12	Dikes Kota Denpasar	1	1
Jumlah		12	12

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2023

Dari tabel 5.5 data tentang pojok ASI di Kota Denpasar tersebar pada 11 puskesmas dan satu dinas kesehatan yang ada di empat kecamatan. Jumlah Pojok ASI ini mengalami stagnansi

atau tidak mengalami peningkatan secara kuantitatif yaitu 12 pojok ASI.

### **5.6. Cakupan Imunisasi Pada Bayi di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022**

Imunisasi dapat dipahami sebagai sebuah proses dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin, yakni virus atau bakteri yang sudah dilemahkan, dibunuh, atau bagian dari bakteri atau virus tersebut dimodifikasi. Tujuan dari imunisasi ialah mendapatkan kekebalan seseorang secara individu dan eradikasi atau pembasmian suatu penyakit dari penduduk suatu daerah. Sedikitnya 70% dari penduduk suatu daerah harus mendapatkan imunisasi. Jika dilakukan sesuai prosedur maka manfaat seperti menurunkan morbiditas atau angka kesakitan, menurunkan mortalitas atau angka kematian, terhindar dari kecacatan, dan eradikasi penyakit di suatu daerah atau negara.

Permenkes RI No. 12 Tahun 2017 mengatur bahwa imunisasi bertujuan menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD31). Tujuan khusus program ini antara lain tercapainya cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) pada bayi sesuai target RPJMN, tercapainya *Universal Child Immunization/UCI* (Persentasi minimal 80% bayi yang mendapat IDL disuatu desa/kelurahan). Berikut adalah data cakupan

imunisasi pada bayi di Kota Denpasar pada tahun 2021 dan 2022.

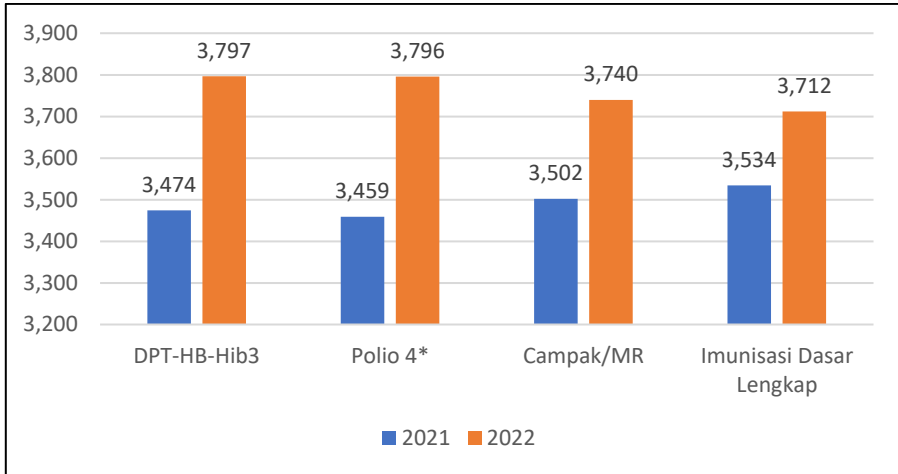
**Tabel : 5.6. Cakupan Imunisasi Pada Bayi di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022**

Kecamatan	Bayi Diimunisasi	2021	2022
Denpasar Utara	DPT-HB-Hib3	3.474	3.797
	Polio 4*	3.459	3.796
	Campak / MR	3.502	3.740
	Imunisasi Dasar Lengkap	3.534	3.712
Denpasar Timur	DPT-HB-Hib3	2.572	3.006
	Polio 4*	2.626	2.960
	Campak / MR	2.674	3.022
	Imunisasi Dasar Lengkap	2.713	2.946
Denpasar Selatan	DPT-HB-Hib3	5.561	5.331
	Polio 4*	5.463	5.328
	Campak / MR	5.753	5.293
	Imunisasi Dasar Lengkap	5.940	5.293
Denpasar Barat	DPT-HB-Hib3	4.523	4.836
	Polio 4*	4.582	4.834
	Campak / MR	4.597	4.914
	Imunisasi Dasar Lengkap	4.639	4.900
<b>Jumlah</b>		<b>65.612</b>	<b>67.708</b>

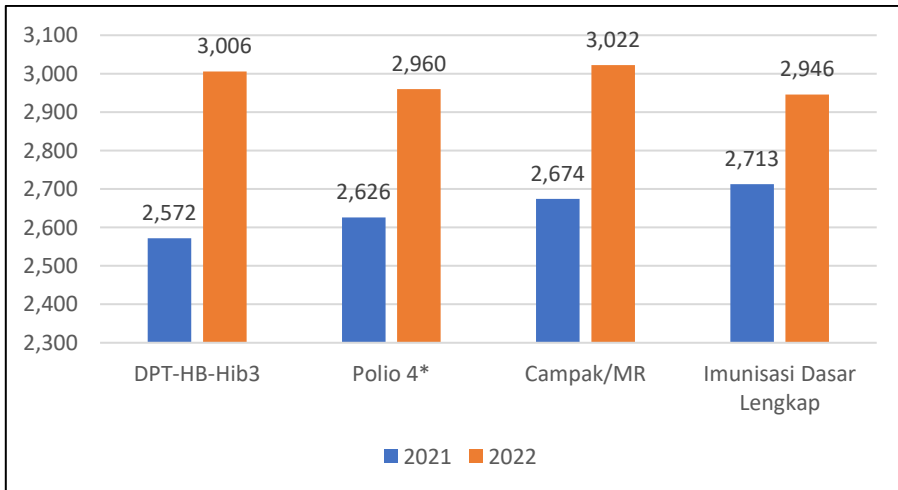
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2023

Dari Tabel 5.6. tentang Cakupan Imunisasi Pada Bayi di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022 dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut;

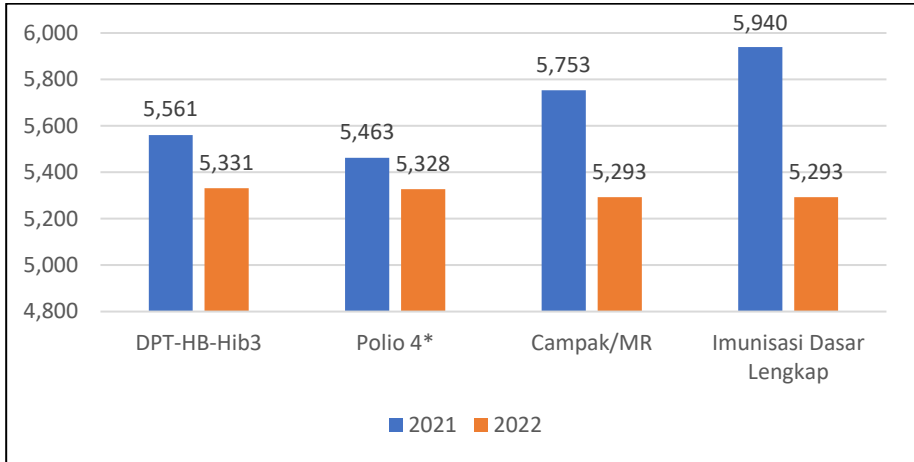
**Gambar 5.10 Cakupan Imunisasi pada Bayi di Kecamatan Denpasar Utara tahun 2021 dan 2022**



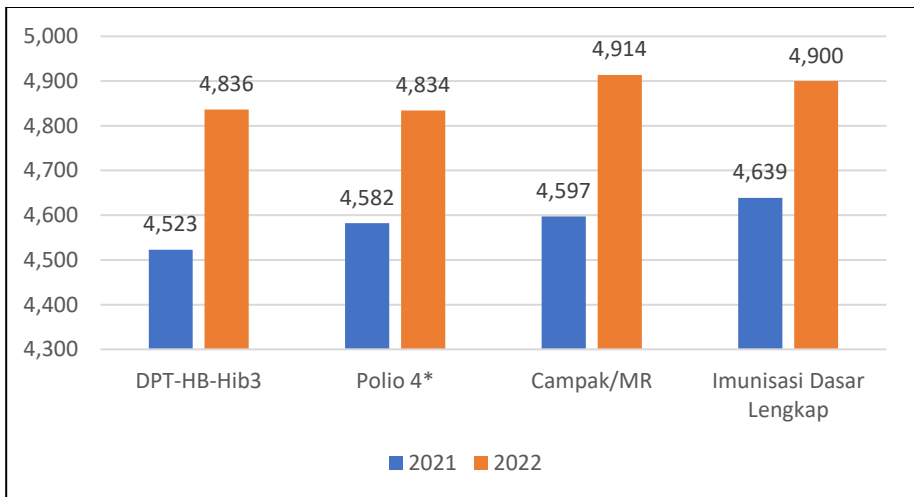
**Gambar 5.11 Cakupan Imunisasi pada Bayi di Kecamatan Denpasar Timur tahun 2021 dan 2022**



**Gambar 5.12 Cakupan Imunisasi pada Bayi di Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2021 dan 2022**



**Gambar 5.13 Cakupan Imunisasi pada Bayi di Kecamatan Denpasar Barat tahun 2021 dan 2022**



Dari Tabel 5.6. Cakupan Imunisasi Bayi di Kota Denpasar dari tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan 2.096 atau

setara dengan 3,2 persen dalam satu tahun. Namun demikian data setiap kecamatan menunjukkan bahwa penurunan hanya terjadi di kecamatan Denpasar Selatan. Hal ini diperlukan penelitian lebih lanjut apakah dikarenakan jumlah bayi menurun atau terdapat faktor lain. Pasalnya di tiga kecamatan lain terjadi peningkatan cakupan imunisasi yang cukup signifikan.

### **5.7. Jumlah Dokter Umum menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar**

Tenaga kesehatan merujuk pada mereka yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan ataupun keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Peran penting tenaga kesehatan terletak pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang tinggi. Dengan derajat kesehatan yang tinggi merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia produktif baik secara sosial dan ekonomi.

Dokter umum menjadi salah satu klasifikasi tenaga kesehatan. Dokter umum dapat dipahami sebagai dokter yang berfokus untuk menangani gejala dan penyakit pada pasien secara umum. Layanan yang diberikan berada pada ranah



pengecahan, diagnosis, penanganan awal hingga rujukan ke dokter spesialis jika diperlukan. Pemenuhan layanan tingkat pertama dalam konteks dokter umum di Kota Denpasar pada tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah.

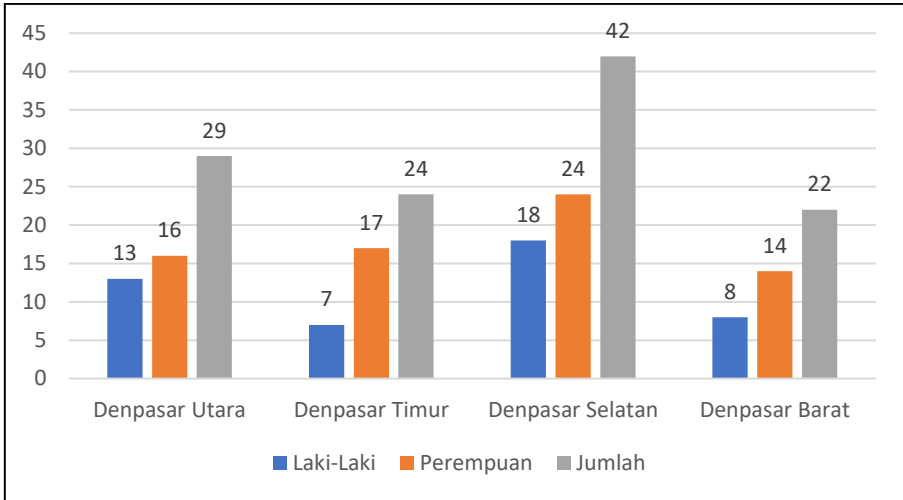
**Tabel: 5.7. Jumlah Dokter Umum menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022**

No	Tempat Tugas	Dokter Umum					
		2021			2022		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Puskesmas Denpasar Utara	13	16	29	9	13	22
2	Puskesmas Denpasar Timur	7	17	24	5	15	20
3	Puskesmas Denpasar Selatan	18	24	42	14	14	28
4	Puskesmas Denpasar Barat	8	14	22	5	13	18
<b>Jumlah</b>		<b>46</b>	<b>21</b>	<b>117</b>	<b>33</b>	<b>55</b>	<b>88</b>

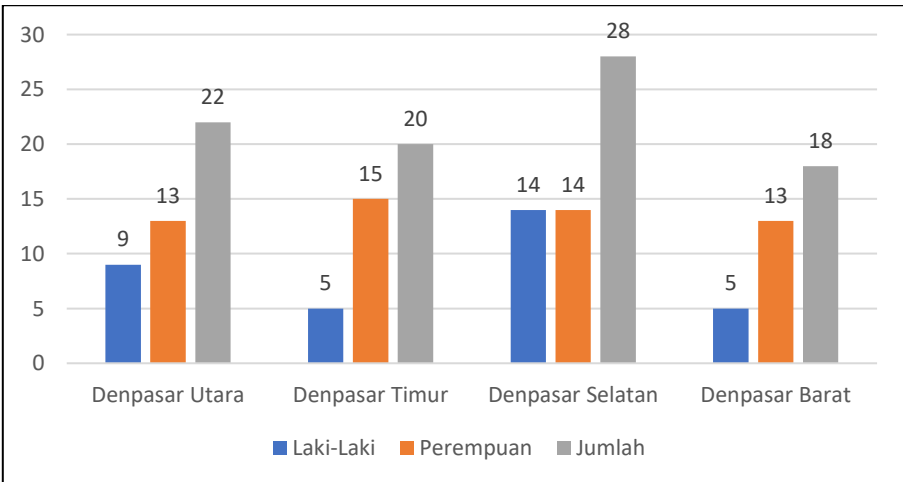
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2023

Berdasarkan Tabel 5.7. tentang Jumlah Dokter Umum menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar tahun 2021 dan 2022 dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut.

**Gambar 5.14 Jumlah Dokter Umum menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021**



**Gambar 5.15 Jumlah Dokter Umum menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022**



Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah dokter umum di Kota Denpasar pada tahun 2021 berjumlah 117 dokter,

sedangkan pada tahun 2021 berkurang menjadi 88 dokter. Selisih 29 dokter dalam kurun waktu satu tahun setara dengan penurunan jumlah sebesar 33%. Wilayah dengan jumlah dokter umum terbesar ialah Denpasar Selatan yaitu 42 dokter di tahun 2021 dan 28 dokter di tahun 2022. Secara kuantitatif jumlah dokter umum berjenis kelamin perempuan meningkat sejumlah 34 dokter di tahun 2022 menjadi 55 dokter. Sedangkan untuk dokter umum berjenis kelamin laki-laki mengalami penurunan sejumlah 13 dokter di tahun 2022 menjadi 33 dokter. Data dokter umum berdasarkan jenis kelamin secara implisit membuktikan terdapat kesetaraan gender khususnya di bidang profesi dokter umum.

**Tabel : 5.8. Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022**

No	Tempat Tugas	Dokter Spesialis		Dokter Umum		Dokter Gigi		Jml
		L	P	L	P	L	P	
1	Puskesmas Denpasar Utara	0	0	9	13	2	12	36
2	Puskesmas Denpasar Timur	0	0	5	15	4	8	32
3	Puskesmas Denpasar Selatan	0	0	14	14	1	8	37
4	Puskesmas Denpasar Barat	0	0	5	13	2	14	34
<b>Sub Total 1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>55</b>	<b>9</b>	<b>42</b>	<b>139</b>
1	RSUP Prof.Dr.I.G.N.G NGOERAH	191	114	830	821	1	8	1.965
2	RSK Mata Ramata	4	13	2	7	0	0	26
3	RSIA Pucuk Permata Hati	8	2	1	3	0	0	14

PROFIL STATISTIK GENDER KOTA DENPASAR TAHUN 2023

4	RSUD Wangaya	41	25	14	19	0	5	104
5	RS Tk II Udayana	30	17	6	14	0	5	72
6	RS Manuaba	16	4	5	2	0	1	28
7	RS Mata RSBM	4	10	6	11	0	0	31
8	RS Surya Husada	48	27	7	10	2	3	97
9	RSU Bros	67	44	11	19	4	3	148
10	RS Kasih Ibu	55	34	8	19	5	3	124
11	RS Darma Yadnya	28	14	6	5	1	0	54
12	RS Puri Raharja	50	21	17	16	0	3	107
13	RS Bakti Rahayu	34	22	8	13	0	0	77
14	RSIA Harapan Bunda	8	6	1	4	0	0	19
15	RSGM Kedokteran Mahasaraswati	0	0	1	3	17	43	64
16	RS Prima Medika	70	37	18	16	3	1	145
17	RS Bali Med	80	41	12	27	1	4	165
18	RSIA Puri Bunda	35	17	7	8	0	0	67
19	RS Bayangkara	23	13	6	15	0	2	59
20	RS Surya Husada Ubung	26	23	5	5	1	4	64
21	RSUD Bali Mandara	30	34	14	35	4	12	129
<b>Sub Total 2</b>		<b>848</b>	<b>518</b>	<b>985</b>	<b>1.072</b>	<b>39</b>	<b>97</b>	<b>3.559</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2023

## 5.8. Keluarga Berencana (KB)

Program Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu dari 4 pilar program intervensi penurunan kematian ibu (maternal) pada save motherhood. Penurunan angka kematian ibu sebagai indikator peningkatan kesehatan ibu, anak, dan keluarga. Program KB melalui pemakaian kontrasepsi menurunkan kematian maternal melalui dua mekanisme: (1) penurunan kelahiran, dan (2) penurunan kehamilan risiko tinggi. Tidak ada kelahiran, tidak ada kematian ibu, dan penurunan kehamilan risiko tinggi berarti penurunan risiko kematian ibu.

Program KB tidak melarang tetapi mengatur supaya kehamilan terjadi hanya apabila ibu telah siap fisik, mental dan sosial. Apabila ibu belum siap hamil, ingin membatasi atau menunda kehamilan, program KB menganjurkan ibu memakai alat kontrasepsi sesuai kebutuhan kesehatan ibu. Sebagai prinsip, kehamilan sebaiknya terjadi pada situasi risiko terendah untuk mengalami gangguan kesehatan.

### 5.8.1 Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB

Fasilitas kesehatan yang melayani KB di Kota Denpasar terdiri atas puskesmas, klinik pratama, klinik utama, Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. Pada tahun 2022 terdapat 11 puskesmas, 17 klinik pratama, 4 klinik utama, 15 RS Umum dan 2 RS Khusus yang melayani KB.

**Tabel: 5.9 Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB di Kota Denpasar Tahun 2022**

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	11
2	Klinik Pratama	17
3	Klinik Utama	4
4	RS Umum	15
5	RS Khusus	2
	<b>Jumlah</b>	<b>49</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2023

### 5.8.2 Alat/Cara KB yang Digunakan

Salah satu wujud dari program Keluarga Berencana ini adalah pemakaian alat kontrasepsi yang dimaksudkan untuk menunda/mencegah kehamilan. Berbagai alat kontrasepsi diproduksi untuk dapat dipilih dan digunakan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Alat kontrasepsi dapat dibagi menjadi alat kontrasepsi yang bersifat temporer (sementara) dan alat kontrasepsi permanen (selamanya). Dilihat dari jenisnya ada beberapa jenis alat kontrasepsi yang diharapkan akan dapat menjadi pilihan bagi seorang suami atau istri yang dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan, perasaan nyaman dan aman pemakainya. Pada Tabel 5.10 di bawah ada 8 jenis alat kontrasepsi yang dapat dijadikan pilihan bagi laki-laki dan perempuan di Kota Denpasar tahun 2022, yaitu MOW/tubektomi; AKDR/IUD/Spiral, Suntikan KB;MOP; Pil KB; Kondom/karet KB' dan Implan.

Pada tabel tersebut menunjukkan jumlah penggunaan alat kontrasepsi oleh laki-laki dan perempuan yang pernah kawin usia 15-49 tahun yang berstatus kawin tahun 2022. Secara umum di Kota Denpasar jumlah laki-laki dan perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 61.560 orang. Penggunaan kontrasepsi terbanyak adalah AKDR/IUD/Spiral sebanyak 23.446 orang. AKDR (alat kontrasepsi dalam rahim) atau IUD (Intra Uterine Device) atau spiral adalah alat kontrasepsi yang berupa perangkat plastik berbentuk huruf T

yang diletakkan di dalam rahim dengan maksud untuk menghadang sperma agar tidak membuahi sel telur. Satu kelebihan dari AKDR adalah pemakaiannya cukup satu kali saja tetapi berlaku untuk jangka waktu yang cukup panjang.

Suntikan KB merupakan alat kontrasepsi yang mejadi pilihan terbanyak kedua bagi perempuan yaitu sebanyak 19.251 orang. Suntikan KB ada yang digunakan untuk menunda kehamilan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan dan ada pula yang untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. Oleh karenanya alat kontrasepsi ini termasuk kategori temporer dan tergolong murah.

Pilihan berikutnya adalah MOW/Tubektomi dan MOP/Vasektomi. Terdapat 4.668 orang yang menggunakan cara ber-KB ini. MOW/tubektomi adalah salah satu metode kontrasepsi permanen bagi perempuan yang dapat dilakukan melalui prosedur pembedahan.

Alat KB berikutnya adalah pil KB. Pil KB yang merupakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang khusus diperuntukkan bagi perempuan. Terdapat 7.946 orang yang memilih alat KB tersebut. Ada dua jenis pil KB, yaitu pil KB kombinasi dan pil KB khusus progestin. Pil KB bekerja dengan cara memengaruhi kerja indung telur dan rahim, sehingga mencegah terjadinya proses pembuahan, yaitu pertemuan sel telur dan sel sperma. Pil KB merupakan jenis alat kontrasepsi hormonal yang perlu dikonsumsi secara teratur pada waktu yang sama setiap harinya agar efektif.

**Tabel : 5.10. Jumlah Perempuan Pernah Nikah Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Nikah Menurut Alat/ Cara KB yang Digunakan**

Alat/Cara KB yang Digunakan	Tahun 2022
MOW/Tubektomi dan MOP/Vasektomi	4.668
AKDR/IUD/Spiral	23.446
Suntikan KB	19.251
MOP	99
Pil KB	7.946
Kondom/Karet KB	4.099
IMPLAN	2.038
MAL	13
<b>Total</b>	<b>61.560</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2023

Kondom/karet KB merupakan pilihan berikutnya. Di Kota Denpasar pada tahun 2022 terdapat 4.099 orang yang menggunakan alat kontrasepsi ini. Alat kontrasepsi ini sangat familiar di kalangan pasangan suami-istri. Kondom sebagai alat kontrasepsi terbuat dari bahan karet latex berbentuk silinder. Sesungguhnya kondom digunakan dan atau dipakaikan pada alat kelamin laki-laki maupun wanita tetapi pada kenyataannya palingfamiliar digunakan oleh laki-laki. Tak hanya itu, alat kontrasepsi ini juga efektif untuk mencegah penularan penyakit menular seksual bila digunakan dengan tepat.

KB atau kontrasepsi implan merupakan jenis kontrasepsi hormonal. Metode yang digunakan adalah melepaskan hormon



progestin ke dalam tubuh agar kehamilan tidak terjadi. Implan adalah batang plastik seukuran batang korek api yang akan dimasukkan ke lengan atas, tepat di bawah kulit. Terdapat 2.038 orang yang menggunakan alat KB tersebut.

MOP atau bisa disebut dengan vasektomi merupakan metode kontrasepsi permanen bagi pria dengan prosedur klinis untuk menghentikan kemampuan reproduksi pria dengan jalan melakukan pengikatan/ pemotongan saluran sperma (*vas deferens*) sehingga pengeluaran sperma terhambat dan pembuahan tidak terjadi. Terdapat 99 orang yang menggunakan alat kontrasepsi ini.

Pilihan terakhir alat kontrasepsi yang sedikit digunakan adalah MAL. Metode Amenore Laktasi (MAL) adalah metode kontrasepsi alami bersifat sementara yang dapat digunakan setelah persalinan. MAL memiliki cara kerja berupa penekanan ovulasi. Peningkatan hormone prolactin (hormone pembentukan ASI) usai persalinan menyebabkan penurunan hormon lain seperti LH dan estrogen yang diperlukan untuk pemeliharaan siklus menstruasi sehingga ovulasi (pematangan sel telur) tidak terjadi. Terdapat 13 orang yang menggunakan alat kontrasepsi ini.

## **5.9. Penduduk yang Terlayani Air Bersih Tahun 2020 dan 2021**

Pengolahan air bersih selalu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tidak sembarang air bisa dikatakan air bersih. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari termasuk sanitasi.

Menurut WHO, air domestik adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan domestik seperti konsumsi, air minum dan persiapan makanan. Ciri-ciri air bersih antara lain adalah: tidak memiliki rasa, tidak memiliki bau, jernih, memiliki pH netral, tidak mengandung zat kimia berlebih, dan tidak mengandung bakteri. Sedangkan sumber air bersih adalah: 1. Air angkasa ini adalah air dari hasil penyubliman awan atau uap air contohnya salju. Air yang dihasilkan dari salju yang meleleh bisa dimanfaatkan sebagai sumber air; 2. Air hujan bisa ditampung lalu dijadikan air minum. Namun harus ditambahkan kalsium kedalamnya karena air hujan tidak memiliki kalsium; 3. Air yang berada di permukaan bumi. Air sungai, air danau, dan air laut masuk ke dalam kategori air permukaan. Namun air permukaan ini mudah terkontaminasi dan cenderung keruh. Harus memilih area yang tepat untuk menjadikannya sumber air bersih; 4. Air tanah adalah sebagian dari air hujan yang meresap ke dalam tanah melalui pori-pori dan akar tanaman. Air tanah yang berada pada dua lapisan tanah kedap air disebut air tanah

dalam sedangkan air tanah dangkal adalah air tanah yang berada dekat pada permukaan tanah dan kestabilan volume airnya dipengaruhi oleh curah hujan; 5. Mata air Air tanah yang muncul secara alamiah disebut mata air.

Pada Tabel 5.11. terlihat bahwa semua kecamatan terlayani air bersih diatas 50%. Kecamatan Utara menduduki posisi paling tinggi dalam pelayanan air bersih yaitu 79,07% pada tahun 2021 dan Kecamatan Denpasar Timur terlayani 73,63% pada tahun 2022.

**Tabel : 5.11. Persentase Penduduk yang Terlayani Air Bersih**

<b>Kecamatan</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Denpasar Utara	79,07%	73,24%
Denpasar Timur	76,94%	73,63%
Denpasar Selatan	57,05%	61,84%
Denpasar Barat	65,86%	67,83%

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma, 2023

## BAB VI

# EKONOMI

Peran perempuan di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal tersebut terbukti dari meningkatnya jumlah angka kerja perempuan di berbagai bidang pembangunan. Dengan adanya kebijakan afirmasi terkait alokasi 30 persen bagi legislator perempuan, dibentuknya kelembagaan terkait peran perempuan seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Komnas Perempuan, dan legislasi untuk melindungi perempuan dan anak.

Presidensi G20 Indonesia 2022 tak luput dari penguatan peran perempuan dalam memulihkan krisis global pascapandemi Covid-19. Kesetaraan gender, keterlibatan perempuan dalam ekonomi lokal, dan digitalisasi ekonomi menjadi isu utama selama G20.

Pemberdayaan perempuan dalam ekonomi merupakan sebuah proses agar perempuan memiliki daya untuk menjadi “*bread winner*” sehingga mampu menghilangkan ketergantungan ekonomi dan melepaskan dari jerat kemiskinan (Elliott, 2008). Sementara itu, pemberdayaan dalam politik bermakna proses untuk meningkatkan ketertarikan perempuan dalam dunia politik dan berperan serta dalam pengambilan keputusan (World Bank, 2011). Pemberdayaan perempuan merupakan alat agar

perempuan menjadi lebih berkualitas (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Sumodiningrat (2009) menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk meningkatkan pendapatan perempuan yang masih berada di tingkat bawah sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya, meningkatkan kapasitas perempuan untuk dapat meningkatkan kegiatan sosial ekonomi yang produktif dan juga untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas perempuan dalam kelembagaan masyarakat, baik yang bertindak sebagai aparatur pemerintah dan juga masyarakat.

Dalam bidang ekonomi, perempuan juga perlu diberikan kesempatan untuk menduduki posisi pengambilan keputusan, baik sebagai pengusaha ataupun bagian dari tim manajerial. Memberikan akses kepada perempuan untuk lebih berpartisipasi dalam area publik, termasuk dunia kerja, bermanfaat baik untuk pengembangan kapasitas perempuan itu sendiri juga untuk meningkatkan persaingan. Dengan kehadiran kaum hawa, maka dunia kerja lebih berwarna. Pasar tenaga kerja menjadi lebih kompetitif terutama untuk menghadapi globalisasi (Seguino, 2000; World Bank, 2011). Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.

Penelitian Klasen & Lamanna (2009) memperlihatkan bahwa ketimpangan dalam kesempatan kerja menghambat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang hilang

akibat ketimpangan gender dalam ketenagakerjaan sekitar empat kali lebih besar dibandingkan ketimpangan gender dalam pendidikan. yang hilang akibat ketimpangan gender dalam ketenagakerjaan sekitar empat kali lebih besar dibandingkan ketimpangan gender dalam pendidikan.

Keterbatasan dana pemerintah (*fiscal constraints*) menjadi kendala dalam upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan. Untuk itu, ada empat hal yang perlu dilakukan dalam meningkatkan produktivitas perempuan. Pertama, mengintensifkan upaya untuk mengarus utamakan/ memfokuskan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam seluruh sektor pembangunan secara sinergi, terutama di sektor-sektor yang melaksanakan pembangunan ekonomi rakyat. Kedua, menumbuhkan kesadaran sektor maupun pemerintah daerah untuk menghasilkan program-program yang tepat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan. Ketiga, mendorong tumbuhnya forum komunikasi program peningkatan ekonomi perempuan untuk mengakses sumberdaya dan informasi program-program pemberdayaan ekonomi baik dari pemerintah, swasta atau pun organisasi non-pemerintah. Keempat, mengembangkan model desa mandiri untuk mengurangi beban keluarga miskin (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2012).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kebijakan atas upaya peningkatan produktivitas perempuan dan pengurangan beban keluarga miskin terhadap beban biaya pendidikan dan kesehatan dalam rangka otonomi daerah adalah melakukan fasilitasi dan advokasi kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan suatu model desa/kelurahan yang mencerminkan upaya jaminan sosial ekonomi bagi keluarga miskin, khususnya pada perempuan dan anak. Model “Desa Prima” (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) atau “Desa Mandiri” atau apapun namanya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa, yaitu suatu model yang melibatkan seluruh masyarakat untuk ikut membangun desa, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan sekaligus mengentaskan kemiskinan desa melalui subsidi silang antar kelompok masyarakat yang berekonomi baik kepada masyarakat yang kurang beruntung. Upaya ini terutama dimaksudkan untuk mengurangi beban keluarga miskin dalam biaya kesehatan dan pendidikan karena sampai saat ini kedua hal tersebut paling dirasakan sangat membebani kehidupan masyarakat miskin. Pengembangan model Desa Prima berlandaskan pada prinsip masyarakat membangun, artinya dalam pelaksanaannya pengembangan model desa prima akan bertumpu pada kekuatan masyarakat itu sendiri, dan dilaksanakan melalui proses yang sesuai dengan dinamika masyarakat itu sendiri, untuk mencapai tujuan dengan

kesepakatan masyarakat bersama. Dengan menyadari keragaman sosial budaya masyarakat, maka pengembangan Desa Prima sepenuhnya diserahkan pada komitmen masyarakat sendiri (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2012).

Kota Denpasar yang berstatus pula sebagai Ibu Kota Provinsi Bali, sekaligus menjadi pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan, dan pusat pariwisata sehingga berkembang menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi di Bali. Penetapan Kota Denpasar menjadi pengembangan pembangunan ekonomi di Bali bertujuan untuk memudahkan masyarakat melakukan kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Implikasi penetapan ini dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat Bali secara merata sehingga kesenjangan kehidupan warga masyarakat di bidang ekonomi tidak berbeda secara tajam. Dalam konteks ini, sumber daya manusia (SDM) atau human resources mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi di Kota Denpasar.

Kota Denpasar sebagai pusat pendidikan di Bali, menjadi faktor penarik bagi orang-orang yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, terutama untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Selain itu, relatif banyak juga tamatan SMU, SMK, dan yang sederajat untuk melanjutkan pendidikan di level



diploma dan yang sederat. Setelah mereka berhasil menamatkan pendidikannya, relatif banyak yang tidak kembali ke asalnya, namun mencari kerja di Denpasar.

Dengan demikian, pelaksanaan sensus ekonomi menjadi sangat signifikan untuk mengumpulkan data mengenai kegiatan ekonomi angkatan kerja dengan menanyakan tentang lapangan kerja, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan penduduk yang bekerja. Variabel tersebut dikaitkan dengan variabel ekonomi seperti tingkat dan laju GNP (Gross National Product/ Produk Nasional Bruto) per kapita dan alokasi GNP per sektor. Tujuannya adalah untuk menggambarkan pengaruh pembangunan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan pendapatan penduduk yang bekerja dalam berbagai sektor.

Di sini, tidak saja terjadi persaingan secara vertikal antara orang yang berpendidikan tinggi, berpendidikan sedang, dan berpendidikan rendah dalam usaha untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, di antara mereka juga mulai tampak terjadi persaingan secara horizontal, antara orang berjenis kelamin laki-laki dengan berjenis kelamin perempuan yang memiliki derajat pendidikan yang sama. Beberapa tabel dan gambar di bawah ini, menunjukkan tentang pengaruh pembangunan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan pendapatan penduduk yang bekerja dalam berbagai sektor sebagai berikut.

## 6.1 Kegiatan Utama Penduduk

Pada dekade ini, desa-desa di Kota Denpasar semuanya sudah mengota. Desa mengota yang dimaksud adalah masyarakat desa yang sudah banyak ciri-ciri kotanya (Suyono, 1985). Beberapa indikator yang mencirikan desa tersebut mengota antara lain terjadinya perkembangan masyarakat yang bersangkutan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern dan semakin heterogennya warga masyarakatnya. Heterogenitas warga masyarakat dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain mata pencaharian, agama, dan etnis (suku bangsa).

Semakin heterogennya warga masyarakat Kota Denpasar disebabkan karena Kota Denpasar menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, dan pusat pariwisata sehingga relatif banyak terciptanya kesempatan kerja. Kesempatan kerja ini menjadi rebutan bagi pencari kerja di Kota Denpasar. Pencari kerja tersebut tidak saja direbutkan oleh pencari kerja yang berasal dari Kota Denpasar dan luar Kota Denpasar yang masih di lingkungan Pulau Bali, tetapi juga berasal dari luar Bali. Para migran yang merantau ke Kota Denpasar, ternyata bagi yang berhasil sebagian tinggal menetap di Kota Denpasar dan menjadi penduduk kota ini.

Kaum migran yang hidup di Bali, baik yang tinggal sementara maupun tinggal menetap pada umumnya mengambil pekerjaan di sektor informal. Sementara ini, warga lokal Kota

Denpasar sangat selektif memilih pekerjaan yang dijadikan mata pencaharian hidupnya. Pada dekade ini pula generasi muda Kota Denpasar sangat jarang yang menekuni profesi menjadi petani sehingga pemilik lahan pertanian merasa kesulitan mencari penggarap atau penyakap. Dewasa ini pula tampak kecenderungan warga lokal Kota Denpasar memilih bekerja di kantor, bank, hotel, restoran, perusahaan, dan tempat-tempat wisata. Selain itu, semakin bertambah banyak juga generasi muda warga lokal Bali yang bekerja di luar negeri dan menjadi karyawan di kapal pesiar.

Berbeda halnya dengan para migran yang mengadu nasib dan menetap di Kota Denpasar, justru tidak begitu memilih pekerjaan di sektor informal yang diabaikan oleh generasi muda warga kota ini. Misalnya, menjadi buruh, tukang batu, tukang gali tanah, pedagang kaki lima keliling, dan pekerjaan serabutan lainnya. Bahkan, pedagang kaki lima yang mangkal dan atau menyewa toko di pinggir jalan di empat kecamatan di lingkungan Kota Denpasar semakin banyak didominasi oleh penduduk pendatang.

Dengan semakin bertambah banyaknya migran yang menetap dan bekerja atau mengais rejeki di Kota Denpasar menyebabkan penduduk Kota Denpasar menjadi heterogen, baik dari segi etnis, ras, agama, maupun pekerjaan. Dengan demikian, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan relatif tinggi, baik di sektor formal maupun informal.

Di Kota Denpasar, daya beli masyarakat menjadi relatif tinggi sehingga secara kuantitas mempengaruhi juga pemanfaatan tenaga manusia di sektor informal, antara lain semakin banyak yang menekuni profesi sebagai pedagang, karyawan toko, karyawan kios, karyawan supermarket, dan sejenis. Selain itu, relatif banyak juga di kalangan penduduk lokal dan pendatang membuat bidang usaha sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

## **6.2 Penduduk Usia 15-59 Tahun Menurut Jenis Kelamin**

Bonus demografi merupakan suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang jumlah usia semakin kecil dan jumlah usia lanjut belum terlalu banyak. Tingginya angka usia produktif biasa disebut dengan Bonus Demografi. Bonus demografi merupakan kondisi dalam suatu daerah jumlah penduduk yang berusia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding dengan jumlah penduduk berusia non produktif (< 15 tahun dan > 64 tahun). Ketika seseorang sudah berumur 15 tahun apabila ia menempuh penduduk secara normal maka ia telah menamatkan SMP (Sekolah Menengah Pertama). Di Denpasar, sebagian besar di antara mereka yang telah menamatkan SMP biasanya melanjutkan ke SMU atau SMK. Bagi yang melanjutkan ke SMU, sebagian besar akan melanjutkan ke universitas, sedangkan

bagi yang melanjutkan ke SMK biasanya melanjutkan ke politeknik atau ke jenjang pendidikan diploma. Jumlah Penduduk usia produktif (15-59 th) menurut jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel : 6.1. Jumlah Penduduk Usia Produktif (0 – 60 Tahun+) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022**

Kelompok Umur	Tahun 2021 (org)			Tahun 2022 (org)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 14 Tahun	71.760	67.164	138.924	71.692	67.161	138.853
15 – 59 Tahun	221.364	225.725	447.089	221.857	226.372	448.229
60 Tahun +	32.720	33.995	66.715	33.869	35.454	69.323
Jumlah	325.844	326.884	652.728	327.418	328.987	656.405

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2022

Tabel 6.1 diatas menggambarkan mengenai jumlah secara keseluruhan penduduk yang berusia produktif (15-59 tahun) di Kota Denpasar, yaitu sekitar 656.405 orang. Jumlah penduduk usia produktif perempuan untuk tahun 2021 dan 2022 lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia produktif laki-laki. Terjadi peningkatan hanya sebesar 0,64% untuk perempuan dan 0,48% untuk laki-laki.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kota Denpasar berpopulasi tinggi dengan jumlah penduduk usia produktif yang

sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktifitas masyarakatnya.

### **6.3 Kegiatan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas**

Ditinjau menurut status pekerjaan, secara umum pilihan masyarakat untuk menjadi buruh/karyawan/pegawai memiliki persentase tertinggi, yaitu sekitar 57,62 persen pada tahun 2021 dan 60,95 persen pada tahun 2022. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin juga menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu dominan sebagai buruh/karyawan/pegawai. Pilihan kedua yang terbanyak adalah berusaha sendiri.

Berdasarkan status pekerja keluarga, kaum perempuan yang bekerja sebagai status ini jauh lebih banyak, namun mengalami penurunan pada tahun 2022. Kondisi disebabkan karena dampak pandemi menyebabkan perempuan berusaha sendiri atau mencari pekerjaan lain untuk membantu pendapatan keluarga, salah satunya melakukan usahatani di tempat tinggalnya. Ada juga yang membentuk kelompok wanita tani.

**Tabel: 6.2 Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar, Tahun 2021 dan Tahun 2022**

Status Pekerjaan	Tahun 2021 (org)			Tahun 2022 (org)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha Sendiri	47.643	37.630	85.273	67.017	46.900	113.917
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/ Buruh Tidak Dibayar	24.743	24.727	49.470	23.089	14.196	37.285
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Tak Dibayar	12.408	3.998	16.406	12.142	3.947	16.089
Buruh/Karyawan/Pegawai	172.786	115.267	288.053	200.225	135.114	335.339
Pekerja Bebas	10.774	3.835	14.609	8.277	1.588	9.865
Pekerja Keluarga	15.222	30.867	46.089	8.594	29.125	37.719
<b>Jumlah</b>	<b>283.576</b>	<b>216.324</b>	<b>499.900</b>	<b>319.344</b>	<b>230.870</b>	<b>550.214</b>

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2023

Terkait dengan jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kota Denpasar, terdapat 13 KWT. KWT lebih terfokus pada kegiatan *urban farming*. Urban Farming adalah bentuk pertanian perkotaan menanam makanan di daerah perkotaan di darat, biasanya di halaman belakang atau di tanah kosong, tetapi terkadang ruang terabaikan seperti median jalan, yang biasanya tidak didedikasikan untuk memproduksi makanan. *Urban*

*farming* paling sering ditemukan di daerah perkotaan, di mana ruang tersedia dan tidak mahal. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud keberlanjutan sektor pertanian di perkotaan, disamping di perdesaan.

**Tabel : 6.3. Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kota Denpasar Tahun 2022**

Kecamatan	Jumlah KWT Tahun 2022
Denpasar Utara	5
Denpasar Timur	2
Denpasar Selatan	2
Denpasar Barat	4
Jumlah	13

Sumber: Dinas Pertanian Kota Denpasar, 2023

## 6.4 Tenaga Penyuluh Pertanian

Terselenggaranya aktivitas di sektor pertanian tidak lepas dari peran penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian diharapkan mampu meningkatkan partisipasi petani untuk bekerjasama dengan ikut serta dalam kegiatan program kerja dan mendukung jalannya program kerja, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Penyuluh sebagai agen perubahan, penyuluh senantiasa harus dapat mempengaruhi sasarannya agar dapat merubah



dirinya ke arah kemajuan. Dalam hal ini penyuluh berperan sebagai katalis, pembantu memecahkan masalah (*solution gives*), pembantu proses (*process helper*), dan sebagai sumber penghubung (*resources linker*). Di Kota Denpasar jumlah penyuluh pertanian perempuan lebih banyak (11 orang) dibandingkan penyuluh laki-laki (8 orang).

**Tabel : 6.4. Tenaga Penyuluh Pertanian Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022**

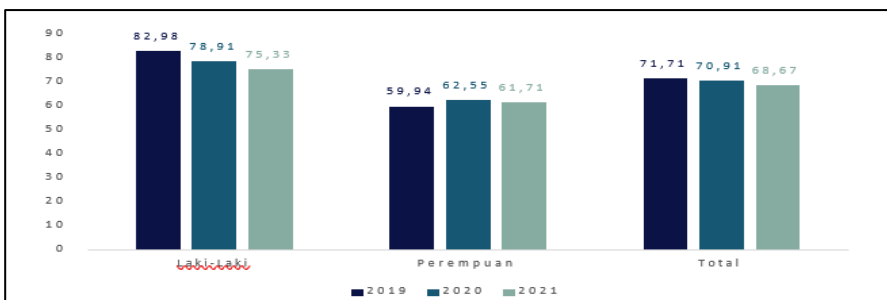
No	Kecamatan	No	Nama	Jenis Kelamin
1	Denpasar Utara	1	Luh Ketut Ari Abadi, SP	P
		2	Rully Fitri Sianti Dewi, SP. M.Si	P
		3	Ni Luh Erna Wati, SP	P
		4	I Ketut Budiawan, SP	L
		5	Ida Bagus Hendra Negara, SP	L
2	Denpasar Timur	1	Marcella Wayan Kartika Rini, SP	P
		2	Ni Wayan Lilis Sukma Dewi	P
		3	Ir. Luh Mas Ayustini	P
		4	Drh. Putu Gede Eka Dharmana, S.KH	L
		5	I Made Dwipayasa, SP	L
3	Denpasar Selatan	1	Ni Nyoman Ayu Trisna Kartika,SP	P
		2	Drh. Man Hetik,S.KH	P
		3	I Putu Mindra, SP	L
		4	I Made Jaya	L
		5	I Komang Adi Widyastama, SP	L
		6	Muhammad David Hermawan, SP	L
4	Denpasar Barat	1	Luh Ketut Ayu Sukarmi, SP	P
		2	Drh. Kadek Nancy Marcolina, S.KH	P
		3	Randini Resmi Anitis, SP	P

Sumber: Dinas Pertanian Kota Denpasar, 2023

## 6.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan yang menggambarkan persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang tergolong sebagai angkatan kerja, atau dengan kata lain penduduk yang aktif secara ekonomi. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini menunjukkan jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja, namun tidak mampu diserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia.

**Gambar 6.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2019-2021**



Sumber: Statistik Ketenagakerjaan Kota Denpasar 2021 (2022)

TPAK Denpasar selama kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2019 TPAK Denpasar sebesar 71,71%, yang memiliki arti bahwa sebanyak 71,71% dari jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) aktif secara ekonomi atau tersedia untuk kegiatan produksi. Sementara sisanya bukan merupakan angkatan kerja, yang dalam hal ini bisa jadi masih bersekolah, mengurus rumah tangga, atau lainnya. Memasuki tahun 2020, TPAK Denpasar menurun menjadi sebesar 70,91%, kemudian pada tahun 2021 TPAK menurun kembali menjadi sebesar 68,67%.

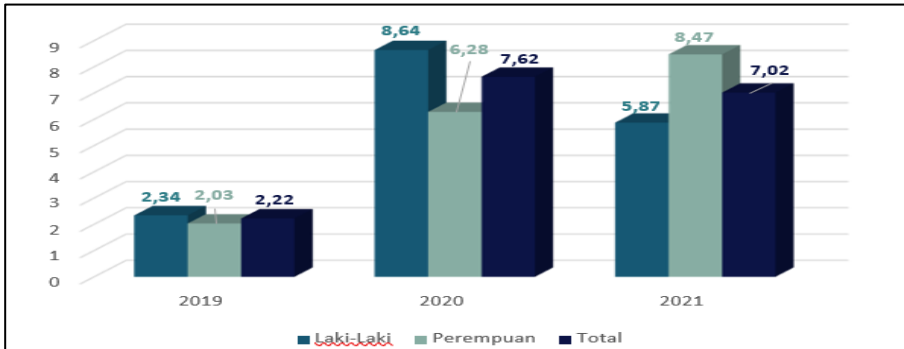
Berdasarkan jenis kelamin, selama periode tahun 2019 hingga tahun 2021, TPAK laki-laki memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. Lebih rendahnya TPAK perempuan ini dinilai wajar, mengingat secara umum perempuan bukanlah tumpuan ekonomi keluarga, apalagi setelah menikah kebanyakan perempuan akan mengurus rumah tangga.

Salah satu yang menjadi perhatian disini ialah peningkatan TPAK perempuan dari tahun ke tahun. TPAK perempuan sebesar 59,94 pada tahun 2019, kemudian menjadi 62,55 di tahun 2020, dan sedikit menurun pada 2021 menjadi 61,71. Pandemi ini telah menyebabkan terjadi perubahan kegiatan perempuan usia kerja dari bukan angkatan kerja menjadi angkatan kerja. Banyaknya pekerja laki-laki yang dirumahkan membuat para perempuan harus masuk ke dunia kerja untuk

membantu ekonomi keluarga. Sedangkan penurunan TPAK perempuan pada tahun 2021 disebabkan oleh mulai membaiknya kinerja perekonomian, khususnya perekonomian keluarga yang didorong oleh aktivitas wisatawan domestik ataupun lainnya membuat proporsi laki-laki yang kembali ke dunia kerja lebih banyak daripada perempuan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Denpasar pada Tahun 2021 sebesar 7,02 persen. Angka ini mengandung pengertian dari 100 orang penduduk angkatan kerja, terdapat sekitar 7 sampai 8 penduduk diantaranya adalah pengangguran, yaitu mereka tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Kondisi ini sudah cukup membaik jika dibandingkan pada awal pandemi COVID-19. TPT Kota Denpasar mengalami penurunan sebesar 0,6 persen dari tahun 2020. Diberlakukannya kondisi *new normal* membuat masyarakat lebih berani untuk melakukan aktivitas sehari-hari di luar rumah membuka lebih banyak lapangan pekerjaan baru yang menyerap tenaga kerja. Lebih khusus, dengan diberlakukannya kondisi *new normal*, sektor pariwisata di Bali yang ditutup pada masa pandemi COVID-19 sudah perlahan mulai dibuka kembali.

**Gambar 6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2019-2021**



Sumber: Statistik Ketenagakerjaan Kota Denpasar 2021 (2022)

## 6.6 Tenaga Kerja Asing Pendatang

Terdapat 3.600 TKA di Bali, paling banyak mereka bekerja di dunia pariwisata, disamping sebagai guru, *marketing*, dan paling banyak bekerja di bidang kesehatan. Untuk pengawasan para WNA di Bali yang bekerja secara ilegal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) pemantauan orang asing yang dikoordinir oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bali dan juga ada Tim Pengawas Orang Asing (Timpora) sebagai penindakan (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230327150548-92-929900/3600-tenaga-kerja-asing-bekerja-di-bali>).

**Tabel: 6.5. Tenaga Kerja Asing Pendetang Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022**

Jenis Kelamin	Tahun 2021 (orang)	Tahun 2022 (orang)
Laki-laki	142	141
Perempuan	106	101
Laki-laki + Perempuan	248	242

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, 2023

Pada Tabel 6.5 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja asing pendatang mengalami penurunan kecil sebesar 2,42% dari tahun 2021 ke tahun 2022. Jumlah tenaga asing perempuan lebih sedikit dibandingkan tenaga asing laki-laki. Menurunnya jumlah tenaga asing di Kota Denpasar sebagai salah satu dampak dari pandemic Covid-19.

## **6.7 Lingkungan Hidup dan Kebersihan**

Pemerintah Kota Denpasar menciptakan sebuah slogan yang di dalamnya menyelipkan kata sehat. Adapun slogan yang dimaksud: “Kota Denpasar BERSERI (Bersih, Sehat, Rindang, dan Indah) yang Berwawasan Budaya”. Makna slogan Kota Denpasar ini sesuai pula dengan makna pada sebuah pepatah yang menyebutkan “hidup bersih pangkal kesehatan”. Pepatah “hidup bersih pangkal kesehatan” ini acapkali dipublikasikan kepada masyarakat, mulai dari pemasangan tulisan yang dipasang di sekolah-sekolah di Denpasar. Selain itu, budaya hidup sehat tersebut juga disosialisasikan oleh instansi-instansi

terkait secara langsung kepada masyarakat. Dengan melakukan sosialisasi budaya hidup sehat itu yang dituangkan dalam slogan Kota Denpasar diharapkan pemandangan Kota Denpasar menjadi bersih, sehat, rindang, dan indah sehingga warga masyarakat akan merasa nyaman dan sehat.

Pada Tabel 6.6 terlihat bahwa jumlah tenaga pada Dinas Lingkungan Hidup di Kota Denpasar masih didominasi oleh laki-laki sejumlah 917 orang. Pada sektor penyiraman, sektor perawatan, sektor perompesan, dan tenaga kebersihan dan penyiraman lebih didominasi oleh laki-laki. Terjadi ketimpangan gender dalam pekerjaan ini karena lebih banyak memerlukan kekuatan fisik.

**Tabel : 6.6. Jumlah Tenaga Pada Dinas Lingkungan Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022**

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sektor Taman Kota	13	6	19
2	Sektor Lapangan Lumintang	6	4	10
3	Sektor Puputan Badung	1	10	11
4	Sektor Taman Janggan	3	3	6
5	Sektor Penyiraman	30	0	30
6	Sektor Pembibitan	7	1	8
7	Sektor Perawatan	66	2	68
8	Sektor Perompesan/Penebangan Hutan	31	0	31
9	Tenaga Kebersihan	760	522	1.282
Jumlah		917	548	1.465

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2023

## 6.8 Juru Parkir

Jukir bertugas mengumpulkan retribusi parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada saat akan keluar dari ruang parkir. Tarif parkir pada tempat parkir yang demikian biasanya bertarif tetap, tidak tergantung waktu karena karcis tidak dilengkapi dengan waktu kedatangan dan waktu kendaraan meninggalkan ruang parkir.

Jumlah juru parkir tepi jalan umum di Kota Denpasar lebih didominasi oleh laki-laki. Juru parkir perempuan sangat jarang ditemui. Rata-rata mereka bekerja sebagai juru parkir karena sebagai tulang punggung keluarga atau menggantikan suami yang sedang sakit. Terdapat 420 orang juru parkir tepi jalan umum, yang terdiri dari 405 orang laki-laki dan 15 orang perempuan.

**Tabel : 6.7. Jumlah Juru Parkir Tepi Jalan Umum Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022**

Kecamatan	Tahun 2022		
	L	P	Jumlah
Denpasar Utara	130	3	133
Denpasar Timur	106	5	111
Denpasar Selatan	85	1	86
Denpasar Barat	84	6	90
Jumlah	405	15	420

Sumber : Perumda Bhukti Praja Sewakadarma, 2023



Kondisi ini sama dengan jumlah petugas parkir gedung dan pelataran, dimana laki-laki masih mendominasi dibandingkan petugas perempuan. Terdapat 510 orang petugas parkir gedung dan pelataran di Kota Denpasar.

**Tabel : 6.8. Jumlah Petugas Parkir Gedung dan Pelataran Menurut Jenis Kelamin**

Kecamatan	Tahun 2022		
	L	P	Jumlah
Denpasar Utara	115	5	120
Denpasar Timur	133	3	136
Denpasar Selatan	93	0	93
Denpasar Barat	201	2	203
Jumlah	542	10	552

Sumber : Perumda Bhukti Praja Sewakadarma, 2023

## 6.9 Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata

Pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan para wisatawan asing dan domestik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok ataupun keluarga dari tempat asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan ataupun liburan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan yang dikunjungi dengan mengeluarkan uang. Wisatawan yang mempunyai tujuan rekreasi, menginginkan suatu daerah yang menimbulkan suasana baru lepas dari kebisingan kehidupan sehari-hari untuk menuju tempat yang nyaman dan indah. Kunjungan pariwisata ini sendiri masuk

melalui penyebrangan laut, pesawat, kereta, dan transportasi lainnya.

Pariwisata masih menjadi napas Bali. Bergerak pulih pada 2022, sektor pariwisata mendorong kebangkitan perekonomian Bali. Presidensi G20 Indonesia, yang puncaknya digelar di Bali, pertengahan November 2022, mengangkat kembali Bali sebagai destinasi unggulan dunia.

Situasi ini memberikan kesegaran etelah sebelumnya pandemi Covid-19 memurukkan ekonomi Bali. Pariwisata di Bali mengalami masa puasa panjang, sekitar dua tahun, akibat terjangan "gering agung" atau wabah penyakit yang ditimbulkan oleh virus Covid-19. Hal itu terlihat jelas dari kontraksi perekonomian Bali yang dalam, mencapai -9,31 persen pada 2022 (year on year) dan sebesar -2,47 persen pada 2021 (<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/03/bali-menatap-era-baru-pariwisata>).

**Tabel : 6.9. Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap di Sektor Pariwisata menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022**

Jenis Usaha	2022		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Usaha Rekreasi dan Usaha Pariwisata	413	158	571

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 2023

Dilihat dari tabel diatas, jumlah tenaga kerja yang terserap di usaha rekreasi dan usaha pariwisata di Kota Denpasar adalah 413 laki-laki dan 158 perempuan. Terjadi ketimpangan gender dalam sektor ini.

Dilihat dari jumlah penanggung jawab usaha akomodasi, jenis usaha rumah makan paling banyak di Kota Denpasar. Terdapat 1.493 orang laki-laki dan 1.627 orang perempuan. Tidak terjadi ketimpangan besar antara laki-laki dan perempuan.

**Tabel : 6.10. Jumlah Penanggung Jawab Usaha Akomodasi di Kota Denpasar menurut Jenis Kelamin Tahun 2022**

Jenis Usaha	Tahun 2022		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Hotel Bintang	34	15	48
Hotel Non Bintang	203	77	278
Pondok Wisata	48	17	65
Villa	48	25	73
Restoran	673	559	1.237
Rumah Makan	1.493	1.627	3.120
Bar	464	303	767
<b>Jumlah</b>	<b>2.963</b>	<b>2.623</b>	<b>5.588</b>

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 2023

Berdasarkan tenaga kerja yang diserap pada bidang usaha hotel dan restaurant, pekerja yang bekerja di hotel bintang masih didominasi laki-laki yaitu 3.432 orang dan 1.149 perempuan. Jumlah tenaga kerja terendah berada di jenis usaha pondok

wisata, dimana laki-laki sebanyak 127 orang dan perempuan sebanyak 97 orang.

**Tabel : 6.11. Tenaga Kerja yang Diserap pada Bidang Usaha Hotel dan Restaurant menurut Jenis Kelamin Tahun 2022**

Jenis Usaha	Tahun 2022		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Hotel Bintang	3.432	1.149	4.581
Hotel Non Bintang	1.098	514	1.612
Pondok Wisata	127	97	224
Villa	274	136	410
Jumlah	4.931	1.896	6.827

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 2023

### 6.10 Pemilik Usaha Salon Kecantikan

Aktivitas ekonomi di Kota Denpasar yang juga semakin tumbuh setelah masa pandemi adalah usaha salon kecantikan. Usaha salon kecantikan makin prospektif, karena layanan perawatan kecantikan jadi kebutuhan setiap Wanita dan laki-laki. Hal tersebut menuntut pebisnis meningkatkan layanan, sehingga mampu memuaskan konsumen atau pengguna jasa.

Tabel 6.12 di bawah ini mencantumkan data mengenai jumlah usaha salon kecantikan yang tersebar di empat kecamatan di Kota Denpasar. Terdapat 149 usaha salon kecantikan di Kota Denpasar. Usaha salon kecantikan lebih didominasi perempuan yaitu 128 orang dan laki-laki sebanyak 23

orang. Usaha salon kecantikan lebih banyak diminati oleh perempuan.

Meningkatnya jumlah pemilik salon oleh kaum perempuan disebabkan oleh kondisi pandemi yang kemudian memotivasi para kaum perempuan untuk membantu perekonomian keluarga. Usaha salon ini masih memberikan peluang bagi perempuan dalam menjalankan bisnisnya.

**Tabel : 6.12. Usaha Salon Kecantikan menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022**

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	(Orang)	(Orang)	(Orang)
Denpasar Utara	1	20	21
Denpasar Timur	6	25	31
Denpasar Selatan	8	54	62
Denpasar Barat	8	27	35
Jumlah	23	126	149

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar, 2023

## **BAB VII**

# **SEKTOR PUBLIK**

Keterlibatan atau keterwakilan perempuan dalam kehidupan publik memang telah mengalami peningkatan namun partisipasi yang diharapkan seperti keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pemerintahan tingkat lokal, maupun nasional masih terhitung rendah. Sebutlah tingkat kabupaten yang merupakan lapisan pemerintah paling dekat dengan masyarakat dan bertanggungjawab terhadap pembangunan di daerah serta pelayanan sosial bagi masyarakat. Terbatasnya keterwakilan perempuan di pemerintah kabupaten dapat berujung pada tidak terpenuhinya kebutuhan, tidak teratasinya kekhawatiran perempuan, dan prioritas-prioritas pembangunan dalam rencana pembangunan daerah dan mungkin akan mempertegas marjinalisasi terhadap perempuan dalam mendapatkan pelayanan sosial pada tingkatan lokal.

Sektor publik lebih identik dengan karakter maskulin yang tegas, berani, cekatan dan cepat dalam mengambil keputusan, sehingga dikatakan bahwa sektor publik merupakan domain laki-laki. Kekuasaan publik identik dengan persaingan dan konflik dalam penyelesaian masalah, sedangkan karakteristik unggul dari feminitas berupa kesabaran, kejujuran dan kesetiaan dianggap tidak perlu dan tidak memiliki karakteristik unggul.

Meskipun jumlah komposisi perempuan yang bekerja di sektor publik masih rendah dibandingkan jumlah laki-laki yang bekerja di sektor publik, tetapi jumlah perempuan yang bekerja di sektor publik dari tahun ketahun terus meningkat. Hal ini disebabkan selain kebutuhan ekonomi yang perempuan dan semakin tingginya tingkat pendidikan perempuan. Faktor ini yang membuat peningkatan pada perempuan untuk bekerja semakin meningkat, juga karena adanya permintaan penerimaan tenaga kerja.

Dalam konteks mewujudkan Buku Statistik Gender Kota Denpasar 2023, sektor publik dijadikan satu bab tersendiri. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengenal dan mengetahui bagaimana laki-laki dan perempuan yang ada di Kota Denpasar berkiprah di sektor publik. Sektor publik yang dibahas pada bab ini secara garis besar terklasifikasi ke dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

## **7.1 Eksekutif**

### **7.1.1 PNS menurut Golongan Kepangkatan**

Eksekutif merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan undang-undang yang diamanatkan oleh Montesquieu selain lembaga legislatif dan yudikatif. Lembaga eksekutif yang familiar disebut dengan pemerintah merupakan lembaga negara yang paling pokok dan paling mendapat perhatian publik dalam berjalannya pemerintahan di Negara

Indonesia. Kinerja eksekutif dapat dinilai dari beberapa faktor yang mudah dilihat dan diukur yaitu dari keadaan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain yang semuanya itu dimaksudkan untuk kesejahteraan hidup masyarakat. Guna mengetahui peran serta laki-laki dan perempuan di Kota Denpasar dalam lembaga eksekutif dapat dilihat pada paparan berikut.

**Tabel : 7.1. Komposisi PNS Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022**

Gol	PNS					
	Tahun 2021			Tahun 2022		
	L	P	L+P (Orang)	L	P	L+P (Orang)
I	56	43	99	38	29	67
II	558	330	888	548	334	882
III	1.005	1.816	2.821	961	1.792	2.753
IV	454	948	1.402	393	805	1.198
Jumlah	2.073	3.137	5.210	1.940	2.960	4.900

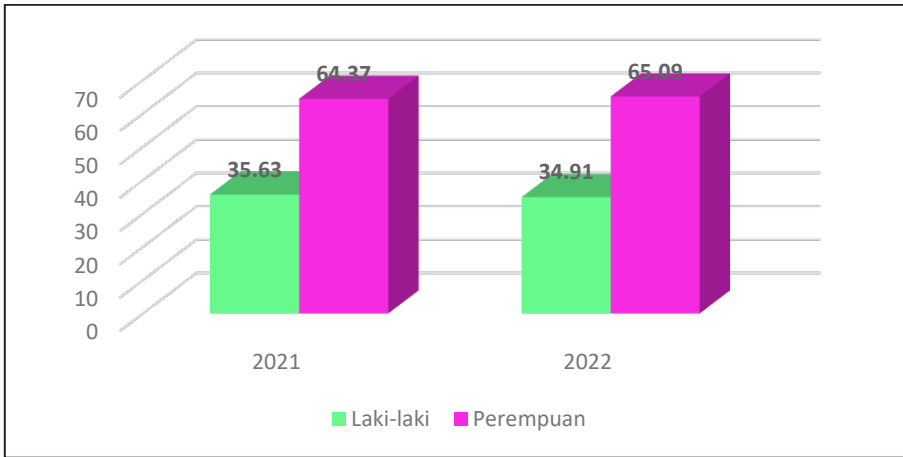
Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2023

Pada Tabel 7.1 di atas menyajikan data terpilah mengenai komposisi ASN menurut golongan kepangkatan tahun 2021 dan 2022. Terlihat bahwa jumlah ASN di Kota Denpasar secara keseluruhan selama dua tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 5,95%. Kondisi ini menunjukkan belum banyaknya penerimaan ASN selama masa pandemi dan diikuti dengan pegawai yang pensiun. Pada golongan II-IV telah terjadi



ketimpangan gender yang signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Ketimpangan yang tajam terjadi pada golongan III, dimana jumlah ASN perempuan lebih banyak dibandingkan ASN laki-laki. Pada tahun 2021 jumlah ASN laki-laki sebanyak 1.005 orang (35,63%), perempuan sebanyak 1.816 orang (64,37%), sedangkan pada tahun 2022 jumlah ASN laki-laki sebanyak 961 orang (34,91%) dan jumlah ASN perempuan sebanyak 1.792 orang (65,09%).

**Gambar 7.1 Persentase ASN Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022**



### 7.1.2 Pegawai Non ASN

Jumlah pegawai Non-ASN laki-laki pada tahun 2021 sebanyak 4.245 orang lebih banyak dibandingkan perempuan sebanyak 3.955 orang. Begitu pula pada tahun 2022 baik

pegawai Non-ASN laki-laki mengalami kenaikan, namun pegawai Non-ASN perempuan mengalami penurunan. Kondisi ini disebabkan pekerjaan yang ditawarkan lebih banyak diperuntukkan bagi laki-laki. Keadaan ini perlu menjadi pemikiran bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan kesempatan bagi kaum perempuan agar tidak terjadi ketimpangan gender.

**Tabel : 7.2. Jumlah Pegawai Non ASN Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022**

Tahun	Pegawai Non ASN		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2021	4.245	3.955	8.200
2022	4.709	3.602	8.311

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2023

### 7.1.3 Pegawai yang Mengikuti Diklat

Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat strategis dan fundamental dalam organisasi. Dibandingkan dengan faktor-faktor lain, sumberdaya manusia merupakan aset yang paling berharga dan menentukan dalam organisasi. Peranan sumberdaya manusia adalah sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sumberdaya manusia merupakan *human capital* dan *intellectual capital* yang akan menentukan efektivitas dari faktor-faktor lain dalam

organisasi seperti modal, peralatan, teknologi organisasi, dan struktur.

Sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan sumber ASN yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. pendidikan dan pelatihan merupakan instrumen utama untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia yang mencakup peningkatan pengetahuan, peningkatan keahlian dan keterampilan, dan perubahan sikap dan perilaku serta koreksi terhadap kelemahan kinerja. Pada birokrasi pemerintah, pendidikan dan pelatihan (Diklat) untuk pengembangan atau peningkatan kualitas SDM ASN telah dilembagakan secara formal dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan ASN, yang secara formal diatur dalam peraturan perundang-undangan. Saat ini Diklat ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000.

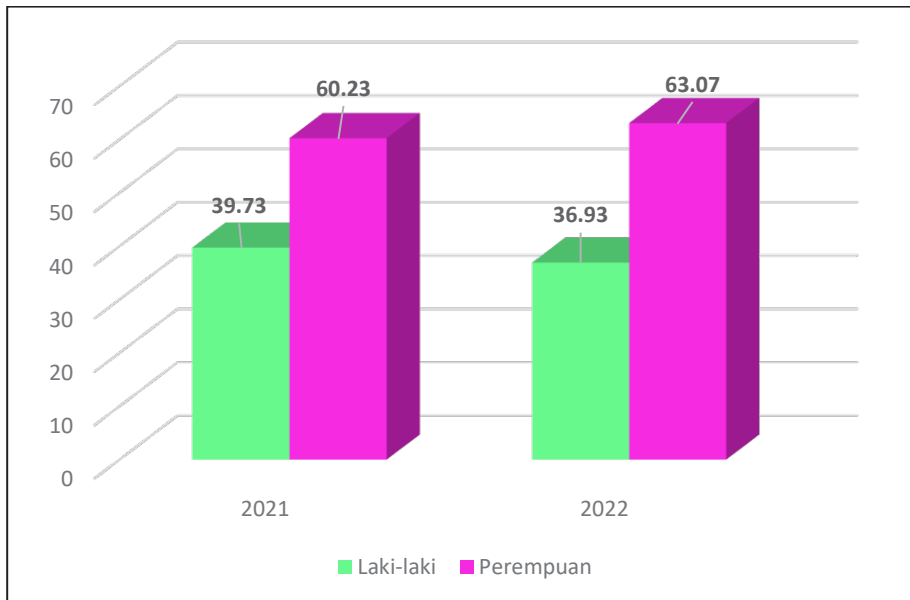
**Tabel : 7.3. Jumlah ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang Pernah Mengikuti Diklat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021 dan 2022**

Tahun	ASN		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2021	2.080	3.155	5.235
2022	2.178	3.719	5.897

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2023

Pada Tabel 7.3 terlihat bahwa jumlah ASN yang sudah mengikuti Diklat meningkat. ASN perempuan yang mengikuti Diklat lebih banyak dibandingkan ASN laki-laki dari tahun 2021-2022. Tercatat pada tahun 2021 jumlah ASN yang mengikuti Diklat adalah 2.080 orang laki-laki (39,73%) dan 3.155 orang perempuan (60,23%). Sedangkan pada tahun 2022 terdiri atas 2.178 laki-laki (36,93%) dan 3.719 orang perempuan (63,07%). Terjadi ketimpangan gender meskipun tidak terlalu signifikan.

**Gambar 7.2 Persentase ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang Pernah Mengikuti Diklat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021 dan 2022**



Terkait dengan kepemimpinan, terdapat Diklat Kepemimpinan / Pelatihan Kepemimpinan Nasional (Diklat PIM). Diklat PIM merupakan proses penyelenggaraan belajar-mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Diklat PIM terdiri atas Diklat PIM Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV.

Tujuan penyelenggaraan Diklat PIM Tingkat I adalah mengembangkan kompetensi kepemimpinan taktikal pada pejabat struktural eselon I yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing. Tujuan Penyelenggaraan Diklat PIM Tingkat II adalah meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural eselon II yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing. Tujuan Penyelenggaraan Diklat PIM Tingkat III adalah mengembangkan kompetensi kepemimpinan taktikal pada pejabat struktural eselon III yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing. Sedangkan tujuan penyelenggaraan Diklat PIM Tingkat IV adalah membentuk kompetensi kepemimpinan operasional pada pejabat struktural eselon IV yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing (<http://puskan.lan.go.id/statis-8-programdiklatpim.html>).

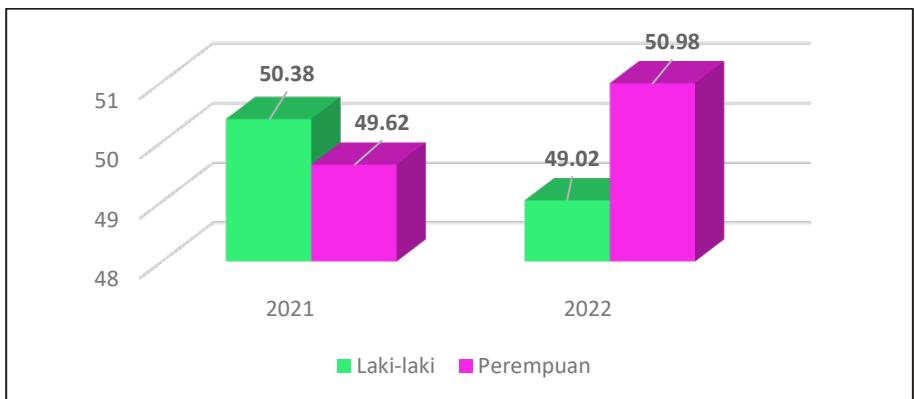
**Tabel : 7.4. Jumlah Pejabat Yang Sudah Mengikuti Diklat Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022**

No	Nama Diklat Pejabat	Tahun					
		2021			2022		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PIM. TK. I			0			0
2	PIM. TK. II	12	6	18	13	3	16
3	PIM. TK. III	90	43	133	80	44	124
4	PIM. TK. IV	160	209	369	131	186	317
Jumlah		262	258	520	224	233	457

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2022

Pada Tabel 7.4 terlihat bahwa secara keseluruhan jumlah pejabat laki-laki yang mengikuti Diklat PIM TK.I-III lebih banyak dibandingkan pejabat perempuan untuk tahun 2021 dan 2022. Terjadi ketimpangan gender yang signifikan pada Diklat PIM Tingkat II dan Tingkat IV.

**Gambar 7.3 Persentase Pejabat Yang Sudah Mengikuti Diklat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021 dan 2022**



Pada Gambar 7.3 terlihat bahwa terjadi peningkatan pejabat yang mengikuti diklat dari tahun 2021 yaitu sebesar 50,38% untuk pejabat laki-laki dan 50,98% pada tahun 2022. Sedangkan perempuan mengalami penurunan dari 49,62% pada tahun 2021 dan 49,02% pada tahun 2022.

#### **7.1.4 ASN berdasarkan Unit Kerja**

Tabel 7.5 menunjukkan jumlah ASN di Kota Denpasar yang bertugas di sejumlah unit kerja di Kota Denpasar. Unit-unit kerja tersebut meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). SKPD merupakan perangkat pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. SKPD sebagai pelaksana fungsi eksekutif saling berkoordinasi agar pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Taman Kanak-kanak (TK) merupakan jenjang pendidikan dalam bentuk formal bagi anak-anak usia dini. Kurikulumnya lebih menekankan pada rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sebagai upaya untuk menyiapkan mereka menyongsong pendidikan lebih lanjut. Sekolah Dasar sebagai jenjang paling dasar pada jenjang pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh dalam kurun waktu 6 (enam) tahun yaitu mulai kelas 1 (satu) sampai kelas 6 (enam). Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai

jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah dinyatakan lulus sekolah dasar atau sederajat. SMP ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun yaitu kelas 1 (satu) sampai kelas 3 (tiga).

**Tabel : 7.5. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin dan Unit Kerja di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022**

No	Unit Kerja	2021			2022		
		L	P	Jmlh	L	P	Jmlh
1	SKPD Kota Denpasar	1.515	1.729	3.244	1.454	1.745	3.199
2	Taman Kanak-kanak	0	53	53	0	39	39
3	Sekolah Dasar	398	1.057	1.455	530	1.583	2.113
4	Sekolah Menengah Pertama	167	316	483	194	352	546
Jumlah		2.080	3.155	5.235	2.178	3.719	5.897

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2023

Pada tabel tersebut, secara keseluruhan terjadi peningkatan jumlah ASN pada unit kerja untuk laki-laki sebanyak 17,88% dan perempuan sebanyak 4,71%, kecuali pada unit Taman Kanak-Kanak. Pada unit kerja SKPD Kota Denpasar terjadi ketimpangan gender dimana terdapat 2.080 orang laki-laki dan 3.155 orang perempuan pada tahun 2021; 2.178 orang laki-laki dan 3.719 orang perempuan pada tahun 2022. Pada unit kerja Taman Kanak-kanak terjadi ketimpangan gender yang



signifikan, dimana tidak ada ASN laki-laki. Taman Kanak-kanak lebih diminati oleh kaum perempuan meskipun terjadi penurunan jumlah ASN.

#### **7.1.5 ASN Menurut Eselon**

Tabel 7.6 menunjukkan secara keseluruhan jumlah PNS di Kota Denpasar Tahun 2021 sebanyak 4.610 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 2.073 orang dan perempuan sebanyak 2.537 orang. Sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 4.900 orang yang terdiri dari 1.940 orang laki-laki dan 2.906 orang perempuan. Terjadi peningkatan dari 6,86% untuk laki-laki menjadi 14,54%. Terjadi ketimpangan gender. Peningkatan jumlah PNS perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah PNS laki-laki. Untuk PPPK, jumlah perempuan masih mendominasi. Jumlah PNS terbanyak terdapat pada Gol III. Kondisi ini menunjukkan bahwa kaum perempuan sudah dapat menunjukkan kemampuannya untuk mengakses, mengisi, dan mengemban tugas sebagai ASN.

**Tabel : 7.6. Komposisi ASN Menurut Golongan Kepegawaian dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022**

Gol	ASN							
	Tahun 2021				Tahun 2022			
	L	P	L+P (Orang)	(%)	L	P	L+P (Orang)	(%)
PNS								
I	56	43	99	2,14	38	29	67	1,14
II	558	330	888	19,16	548	334	882	14,96
III	1.005	1.816	2.821	60,86	961	1.792	2.753	46,68
IV	454	946	1.402	30,25	393	805	1.198	20,32
Jumlah	2.073	3.137	5.210		1.940	2.906	4.900	
PPPK								
	7	18	25	0,54	238	759	997	16,91
Jumlah	2.080	2.555	4.635		2.178	3.719	5.897	

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2023

Pada Tabel 7.7 terlihat bahwa untuk eselon II – IV lebih didominasi oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki peluang lebih sedikit dikarenakan prinsip-prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan belum semua terpenuhi. Eselon IIa pada tahun 2021 dan 2022 diduduki oleh 1 orang laki-laki. Untuk non eselon juga terjadi ketimpangan gender, dimana jumlah perempuan lebih banyak, yaitu 3.155 orang di tahun 2021 dan 3.719 orang di tahun 2022.

**Tabel : 7.7. Jumlah ASN Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022**

No	Eselon	Tahun					
		2021			2022		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	II.a	1	0	1	1	0	1
2	II.b	22	5	27	29	8	37
3	III.a	24	4	28	34	18	52
4	III.b	56	40	96	62	57	119
5	IV.a	65	50	115	73	60	133
6	IV.b	40	34	74	43	54	97
7	Non Eselon	1.872	3.022	4.894	1.936	3.522	5.458
Jumlah		2.080	3.155	5.235	2.178	3.719	5.897

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2023

Berdasarkan persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kota Denpasar tahun 2021, paling banyak yang berpangkat Pembina Tk. I yaitu sebesar 18,10% pada tahun 2021 dan 11,72% pada tahun 2022. Sedangkan persentase terkecil berada pada posisi pangkat Juru yaitu 0,03% dan Pembina Utama yaitu 0,05%.

**Tabel : 7.8. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022**

No	Pangkat	Tahun			
		2021		2022	
		Perempuan	(%)	Perempuan	(%)
1	Pembina Utama	0	0	2	0.05
2	Pembina Utama Madya	5	0,16	7	0.19
3	Pembina Utama Muda	85	2,69	107	2.88
4	Pembina Tk.I	571	18,10	436	11.72
5	Pembina	287	9,10	253	6.80
6	Penata Tk.I	502	15,91	607	16.32
7	Penata	400	12,68	354	9.52
8	Penata Muda Tk.I	450	14,26	1.098	29.52
9	Penata Muda	482	15,28	492	13.23
10	Pengatur Tk.I	143	4,53	169	4.54
11	Pengatur	114	3,61	121	3.25
12	Pengatur Muda Tk.I	67	2,12	27	0.73
13	Pengatur Muda	6	0,19	17	0.46
14	Juru Tk.I	28	0,89	15	0.40
15	Juru	1	0,03	14	0.38
16	Juru Muda Tk.I	14	0,44	0	0
17	Juru Muda	0	2,69	0	0
Jumlah		3.155	45,90	3.719	54,10

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2023

## 7.2 Legislatif

Legislatif lembaga atau dewan yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat atau merumuskan UUD yang ada di sebuah negara. Lembaga legislatif juga merupakan lembaga legislator yang berarti jika lembaga ini dijalankan oleh DPD,

DPR, dan MPR. Di negara Indonesia, lembaga legislatif adalah DPR, DPD, dan MPR. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga legislatif yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara.

Adapun anggota DPR yaitu mereka yang berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu yang sudah terpilih saat pemilu. DPR sendiri berkedudukan di pusat, dan yang di tingkat provinsi disebut dengan DPRD Provinsi dan untuk yang berada di tingkat kota/kabupaten disebut dengan DPRD kabupaten/kota. Anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan 5 tahun. DPD adalah lembaga legislatif perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara, anggota DPD berasal dari perwakilan setiap provinsi yang ada di negara yang sudah terpilih di pemilu. DPD memiliki jumlah yang tidak sama di setiap provinsi tetapi paling banyak empat orang dan memiliki masa jabatan yaitu lima tahun. Sedangkan MPR adalah lembaga legislatif yang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang sudah terpilih dalam pemilu. Adapun masa jabatan anggotanya adalah selama 5 tahun. Sebelum amandemen UUD 1945, MPR adalah lembaga tertinggi yang memiliki kedudukan tertinggi di negara. Tetapi setelah amandemen, lembaga tertinggi sudah dihapuskan dan diganti dengan lembaga negara.

Pemilihan anggota legislatif ini melalui proses politik yang sangat panjang dan melelahkan sama seperti proses pemilihan

pejabat pemerintah lainnya mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan wakilnya. Proses inilah yang harus melibatkan lembaga-lembaga tertentu seperti Partai Politik, Panwaslu, Bawaslu, PPK dan sebagainya.

### **7.2.1 Keanggotaan DPRD**

Tabel 7.9 di bawah menyajikan data terpilah mengenai jumlah keanggotaan DPRD Kota Denpasar menurut partai politik Tahun 2019- 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia.

Pada Tabel 7.9 tercatat ada 7 (tujuh) partai politik yang berhasil mengantarkan kadernya menduduki kursi DPRD Kota Denpasar. Ketujuh partai politik dengan perolehan kursinya masing-masing adalah Gerindra (4 kursi), PDIP (22 kursi), Golkar (8 kursi), Nasdem (3 kursi), PSI (2 kursi), Hanura (2 kursi), dan Demokrat (4 kursi). Data yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum tersebut menunjukkan kesenjangan gender yang amat sangat signifikan. Dikarenakan dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang ternyata hanya ada 4 orang perempuan saja dan berasal dari PDIP, Demokrat, Golkar, dan PSI yang bisa menjadi anggota DPRD Kota Denpasar. Kondisi seperti ini perlu disikapi mengingat dalam negara demokrasi, isu

kesetaraan gender seharusnya lebih dimunculkan dan tidak sekadar retorika melainkan aksi nyata. Peran partai politik sebagai instrumen sistem demokrasi sudah semestinya mengambil langkah tegas dalam melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang posisi mereka terkait isu kesetaraan gender. Proses sosialisasi dan edukasi semacam itu dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya langkah konkret kaderisasi baik anggota, caleg maupun upaya meloloskan perempuan dalam posisi strategis yang notabena lebih sulit meraih sektor publik akibat dominasi sistem patriarki.

### **7.2.2 Liaison Officer (LO)**

Sebagai partai politik (parpol) calon peserta pemilu seharusnya dapat menetapkan seseorang/team Liaison Officer (LO) yang hal ini sebagai penghubung antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Partai Politik. Liaison Officer (LO) merupakan penghubung antara pihak peserta dan penyelenggara.

Tugas LO dalam partai politik yakni penghubung informasi antara KPU dengan Parpol yang dimaksudkan sebagai salah satu sarana mempermudah dan pemahaman bersama antara KPU dengan parpol terkait berbagai proses dan alur verifikasi parpol. Tugas LO selain penghubung antara KPU dengan parpol juga ditugaskan dapat lebih memahami persoalan-persoalan yang kemungkinan terjadi dan dihadapi pada saat proses verifikasi berlangsung. LO parpol juga memiliki kewajiban untuk

memberikan informasi secara jelas dan transparan kepada kader partai terkait verifikasi parpol di KPU, oleh sebab itu dalam menunjuk seseorang/ team LO, parpol harus lebih selektif dan benar-benar memiliki kemampuan yang lebih seperti memiliki kemampuan IT maupun lainnya dan memahami tata cara maupun mekanisme verifikasi.

**Tabel : 7.9. Jumlah Anggota DPRD Kota Denpasar Periode 2019-2024 Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Partai	Periode 2019-2024		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	0	0	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	4	0	4
3	Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan	20	2	22
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	7	1	8
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	3	0	3
6	Partai Gerakan Perubahan (Garuda)	0	0	0
7	Partai Berkarya	0	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	0	0	0
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	0	0
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	0	0	0
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1	1	2
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	0	0	0
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2	0	2
14	Partai Demokrat	4	0	4
15	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	0	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	0	0	0
JUMLAH		41	4	45

Sumber : DPRD Kota Denpasar, 2022



Terdapat 35 orang LO di Kota Denpasar, yang terdiri dari 26 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Keterwakilan perempuan sebanyak 26%. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterwakilan ini masih dibawah 30%. Upaya *go politics* harus ditingkatkan. Kalangan perempuan tidak hanya terlibat dalam memasuki proses, mekanisme, lembaga, dan sistem politik (*crafting democracy*) tapi juga bagaimana representasi politik perempuan mampu memperluas basis konstituen (*broadening base*). Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran perempuan dalam politik adalah pertama, penyertaan atau melibatkan perempuan dalam politik formal dengan mendorong keikutsertaan perempuan dalam partai politik, organisasi-organisasi. Kedua, menata ulang struktur politik sehingga lebih terbuka pada ketegasan gender dan menjadikan perempuan untuk memiliki peran kunci dalam politik. Salah satu penekanan dalam strategi ini adalah mengutamakan ranah privat dan *daily politics*.

**Tabel : 7.10. Jumlah Liaison Officer (LO) Menurut Nama Partai dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022**

No	Partai	Tahun 2022		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2	2	4
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1	0	1
3	Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan	2	0	2
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	1	1	2
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	1	0	1
6	Partai Buruh	2	0	2
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1	1	2
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	0	2
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	2	2
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2	0	2
11	Partai Garuda Perubahan Indonesia	1	1	2
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	1	0	1
13	Partai Bulan Bintang	2	0	2
14	Partai Solidaritas Indonesia	1	1	2
15	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1	1	2
16	Partai Persatuan Pembangunan	2	0	2
17	Partai Ummat	2	0	2
JUMLAH		26	9	35

Sumber: KPU Kota Denpasar, 2023

Keterlibatan perempuan juga tampak pada pengurus Parpol di Kota Denpasar, baik sebagai ketua, sekretaris atau bendahara. Dari tabel ini terlihat 26% perempuan sudah terlibat dalam kepengurusan partai.

**Tabel : 7.11. Jumlah Pengurus (Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Pengurus Cabang) Menurut Nama Partai dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022**

No	Partai	Tahun 2022		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	0	3
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	3	0	3
3	Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan	3	0	3
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	3	0	3
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	2	1	3
6	Partai Buruh	2	1	3
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2	1	3
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	1	3
9	Partai Kebangkitan Nusantara	2	1	3
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3	0	3
11	Partai Garuda Perubahan Indonesia	2	1	3
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	2	1	3
13	Partai Bulan Bintang	1	2	3
14	Partai Solidaritas Indonesia	2	1	3
15	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	2	1	3
16	Partai Persatuan Pembangunan	2	1	3
17	Partai Ummat	1	2	3
JUMLAH		40	14	54

Sumber: KPU Kota Denpasar, 2023

### 7.2.3 Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan suatu lembaga pengawas Pemilu yang dibentuk dan bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu ini diatur di dalam bab IV Undang-undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pada Tabel 7.12 menunjukkan jumlah anggota Bawaslu, Pileg, Pilpres dan Pilkada di Kota Denpasar Tahun 2022. Jumlah anggota perempuan (1 orang) lebih sedikit dibandingkan laki-laki (4 orang). Terjadi ketimpangan gender.

Dilihat dari jumlah Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) di Kota Denpasar, hanya 25% keterlibatan perempuan. Berbeda halnya dalam Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD), keterlibatan perempuan sudah mencapai 48,84%. Hal ini menunjukkan sudah terjadi ketimpangan gender di tingkat kelurahan/desa.

**Tabel : 7.12. Jumlah Anggota Bawaslu Pileg, Pilpres dan Pilkada Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022**

No	Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Denpasar	4	1	5
Jumlah				

Sumber: Bawaslu Kota Denpasar, 2023

**Tabel : 7.13. Jumlah Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Menurut Jenis Kelamin di Pemilu Kota Denpasar Tahun 2022**

No	Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Denpasar Utara	2	1	3
2	Denpasar Timur	3	0	3
3	Denpasar Selatan	3	0	3
4	Denpasar Barat	1	2	3
Jumlah		9	3	12

Sumber: Bawaslu Kota Denpasar, 2023

**Tabel : 7.14. Jumlah Anggota Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pengawas Pemilu Kelurahan/ Desa (PKD) Menurut Jenis Kelamin di Pemilu Kota Denpasar Tahun 2022**

No	Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Denpasar Utara	7	4	11
2	Denpasar Timur	3	8	11
3	Denpasar Selatan	7	3	10
4	Denpasar Barat	5	6	11
Jumlah		22	21	43

Sumber: Bawaslu Kota Denpasar, 2023

## **7.2.4 Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

lima tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Jumlah anggota KPU di Kota Denpasar sebanyak 5 orang, terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ini menunjukkan 40% sudah terwakilkan oleh perempuan.

**Tabel : 7.15. Jumlah Anggota KPU Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Periode 2018-2023**

No	Nama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	I Wayan Arsa Jaya	1	0	1
2	Dewa Ayu Sekar Anggaraeni	0	1	1
3	Sibro Mulissy	1	0	1
4	I Made Windia	1	0	1
5	Ni Ketut Dharmayanti Laksmi	0	1	1
Jumlah		3	2	5

Sumber: KPU Kota Denpasar, 2023

### 7.2.5 Panitia Pemilihan Kecamatan

PPK adalah lembaga penyelenggara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam penyelenggaraan pemilukada, PPK bebas dari pengaruh manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, sudah semestinya setiap penyelenggaraan pemilu harus memiliki kredibilitas yang terpercaya, penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah

hendaknya berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib dalam menyelenggarakan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, keterbukaan, akuntabilitas efisiensi dan efektivitas. Eksistensi institusi penyelenggaraan pemilihan umum menjadi salah satu aspek yang penting yang cukup mempengaruhi dinamika pemilihan umum. Netralitas PPK memang menjadi syarat penting bagi penyelenggaraan pemilihan umum, selanjutnya menyusul soal integritas, kapasitas dan profesionalisme. PPK dalam kerjanya dihadapkan pada proses kerja yang rawan konflik kepentingan serta berhadapan dengan kepentingan politik.

Secara keseluruhan, jumlah PPK di Kota Denpasar pada tahun 2022 adalah 20 orang yang terdiri atas 17 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Masih dibawah 30% keterlibatan perempuan dalam PPK yaitu sebesar 15%.

**Tabel : 7.16. Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022**

No	Kecamatan	Jumlah PPK (Orang)		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Denpasar Barat	4	1	5
2	Denpasar Utara	4	1	5
3	Denpasar Timur	4	1	5
4	Denpasar Selatan	5	0	5
Total		17	3	20

Sumber: KPU Kota Denpasar, 2023



## 7.2.6 Panitia Pemungutan Suara

Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain. PPS merupakan tulang punggung demokrasi karena merekalah basis utama atas integritas hasil pemilu. PPS juga memiliki peran krusial dalam penetapan daftar pemilih tetap sampai pemungutan suara pada tingkat TPS. Integritas PPS sangat penting secara politis karena terkait erat dengan kepercayaan pemilih terhadap pemilu yang merupakan bagian dari proses politik. Tugas, wewenang dan kewajibannya telah diatur berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pada tabel di bawah ini terlihat bahwa terjadi ketimpangan gender yang signifikan di setiap kecamatan. Secara keseluruhan terdapat 129 orang anggota PPS pada tahun 2022 yang terdiri atas 104 orang laki-laki dan 25 orang perempuan. Kaum perempuan lebih cenderung kecil untuk terlibat dalam PPS karena diperlukan fisik yang lebih besar untuk tugas ini. Keterlibatan perempuan sebagai PPS di masing-masing kecamatan adalah 24% (Denpasar Barat); 22% (Denpasar Utara); 22% (Denpasar Timur) dan 17% (Denpasar Selatan).

**Tabel: 7.17 Jumlah PPS di Kecamatan Denpasar Barat**

No	Desa/Kelurahan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Dauh Puri	3	0
2.	Dauh Puri Kauh	3	0
3.	Dauh Puri Kangin	2	1
4.	Dauh Puri Klod	3	0
5.	Padangsambian	2	1
6.	Padangsambian Kaja	1	2
7.	Padangsambian Kelod	2	1
8.	Pemecutan	3	0
9.	Pemecutan Kelod	2	1
10.	Tegal Harum	1	2
11.	Tegal Kerta	3	0
<b>Total</b>		<b>25</b>	<b>8</b>

Sumber: KPU Kota Denpasar, 2023

**Tabel: 7.18. Jumlah PPS di Kecamatan Denpasar Utara**

No	Desa/Kelurahan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Dangin Puri Kaja	2	1
2.	Dangin Puri Kangin	2	1
3.	Dangin Puri Kauh	3	0
4.	Dauh Puri Kaja	3	0
5.	Peguyangan	3	0
6.	Peguyangan Kaja	2	1
7.	Peguyangan Kangin	2	1
8.	Pemecutan Kaja	2	1
9.	Tonja	3	0
10.	Ubung	2	1
11.	Ubung Kaja	3	0
<b>Total</b>		<b>27</b>	<b>6</b>

Sumber: KPU Kota Denpasar, 2023

**Tabel: 7.19. Jumlah PPS di Kecamatan Denpasar Timur**

No	Desa/Kelurahan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Dangin Puri	2	1
2.	Dangin Puri Kelod	2	1
3.	Kesiman	3	0
4.	Kesiman Kertalangu	2	1
5.	Kesiman Petilan	2	1
6.	Penatih	3	0
7.	Penatih Dangin Puri	3	0
8.	Sumerta	2	1
9.	Sumerta Kaja	3	0
10.	Sumerta Kauh	2	1
11.	Sumerta Kelod	3	0
	<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>6</b>

Sumber: KPU Kota Denpasar, 2023

**Tabel: 7.20. Jumlah PPS di Kecamatan Denpasar Selatan**

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Panjer	3	0
2.	Pedungan	3	0
3.	Pemogan	3	0
4.	Renon	3	0
5.	Sanur	2	1
6.	Sanur Kaja	2	1
7.	Sanur Kauh	2	1
8.	Serangan	3	0
9.	Sesetan	2	1
10.	Sidakarya	2	1
	<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>5</b>

Sumber: KPU Kota Denpasar, 2023

### **7.2.7 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)**

Salah satu prinsip dan prasyarat untuk terselenggaranya pemilu/pemilihan yang demokratis adalah warga negara terdaftar sebagai Pemilih tanpa diskriminasi dalam artian luas. Jaminan pendaftaran Pemilih tanpa diskriminasi termasuk akses pemilih untuk terdaftar dan mengetahui data dirinya sebagai Pemilih secara mudah, termasuk untuk memperbaiki data dirinya apabila terdapat kekeliruan atau perubahan elemen data. Oleh sebab itu tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial dan strategis bagi terselenggaranya Pemilihan Umum. Pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih menentukan tahapan Pemilu selanjutnya. Mulai dari penentuan jumlah TPS, alokasi logistik, pola sosialisasi Pemilu, kampanye, rekapitulasi hasil suara, dan lain sebagainya. Jika hasil pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih bermasalah atau tidak valid, dapat dipastikan tahapan Pemilu selanjutnya juga akan sangat terganggu.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran dan pendaftaran Pemilih. Pantarlih dalam melakukan proses pemutakhiran dan pendaftaran Pemilih mengemban tugas yang sangat penting yaitu melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.

Guna memastikan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih tersusun dengan baik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo memastikan kerja Pantarlih sesuai regulasi dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian (Coklit). Penting bagi Pantarlih untuk menggunakan prinsip kerja agar menghasilkan DPT yang terpercaya dan terlindunginya hak pilih warga negara. Prinsip kerja tersebut antara lain: akurasi, komprehensif, mutakhir, inklusif, transparan, responsif dan partisipatif. Pantarlih wajib melaksanakan kegiatan Coklit terlaksana secara cermat, tertib, efektif, dan akuntabel dengan berpedoman pada buku kerja, sehingga meningkatkan kualitas Daftar Pemilih.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) mengemban pekerjaan yang sangat penting ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab karena itu Pantarlih harus tepat dalam pencocokkan data dan teliti dalam bekerja serta dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait salah satunya adalah RT/RW/nama lain termasuk dengan Panitia Pemungutan Suara.

**Tabel: 7.21. Jumlah Pantarlih di Kecamatan Denpasar Barat**

No	Desa/Kelurahan	Jumlah		L+P
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Dauh Puri	11	13	24
2.	Dauh Puri Kauh	8	5	13
3.	Dauh Puri Kangin	30	10	40
4.	Dauh Puri Klod	13	24	37
5.	Padangsambian	33	17	50
6.	Padangsambian Kaja	56	28	84
7.	Padangsambian Kelod	40	20	60
8.	Pemecutan	54	12	66
9.	Pemecutan Kelod	61	34	95
10.	Tegal Harum	21	16	37
11.	Tegal Kerta	25	20	45
	<b>Total</b>	<b>352</b>	<b>199</b>	<b>551</b>

Sumber: KPU Kota Denpasar, 2023

**Tabel: 7.22. Jumlah Pantarlih di Kecamatan Denpasar Utara**

No	Desa/Kelurahan	Jumlah		L+P
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Dangin Puri Kaja	29	12	41
2.	Dangin Puri Kangin	23	5	28
3.	Dangin Puri Kauh	11	11	22
4.	Dauh Puri Kaja	27	26	53
5.	Peguyangan	17	27	44
6.	Peguyangan Kaja	23	5	28
7.	Peguyangan Kangin	27	26	53
8.	Pemecutan Kaja	49	29	78
9.	Tonja	37	6	43
10.	Ubung	15	11	26
11.	Ubung Kaja	41	24	65
	<b>Total</b>	<b>299</b>	<b>182</b>	<b>481</b>

Sumber: KPU Kota Denpasar, 2023

**Tabel: 7.23 Jumlah Pantarlih di Kecamatan Denpasar Timur**

No	Desa/Kelurahan	Jumlah		L+P
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Dangin Puri	28	12	40
2.	Dangin Puri Kelod	18	20	38
3.	Kesiman	28	12	40
4.	Kesiman Kertalangu	41	12	53
5.	Kesiman Petilan	11	11	22
6.	Penatih	23	10	33
7.	Penatih Dangin Puri	11	11	22
8.	Sumerta	15	9	24
9.	Sumerta Kaja	14	9	23
10.	Sumerta Kauh	11	9	20
11.	Sumerta Kelod	17	21	38
	<b>Total</b>	<b>217</b>	<b>136</b>	<b>353</b>

Sumber: KPU Kota Denpasar, 2023

**Tabel: 7.24 Jumlah Pantarlih di Kecamatan Denpasar Selatan**

No	Desa/Kelurahan	Jumlah		L+P
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Panjer	51	14	65
2.	Pedungan	55	14	69
3.	Pemogan	57	27	84
4.	Renon	19	14	33
5.	Sanur	20	8	28
6.	Sanur Kaja	16	7	23
7.	Sanur Kauh	29	5	34
8.	Serangan	6	6	12
9.	Sesetan	57	50	107
10.	Sidakarya	28	20	48
	<b>Total</b>	<b>338</b>	<b>165</b>	<b>503</b>

Sumber: KPU Kota Denpasar, 2023

Jumlah Pantarlih di Kota Denpasar adalah 1.888 orang yang terdiri dari 1.206 laki-laki dan 682 perempuan. Keterwakilan perempuan sudah berada diatas 30%. untuk masing-masing kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar Barat sebanyak 36%, Kecamatan Denpasar Utara sebanyak 38%, Kecamatan Denpasar Timur sebanyak 39% dan Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 33%.

### **7.3 Lembaga Yudikatif**

Yudikatif sebagai lembaga yang bertugas mengawal dan memantau pelaksanaan perundang-undangan atau penegakan hukum di Indonesia. Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang atau disebut *adjudication function*. Fungsi dari yudikatif adalah sebagai lembaga pengawal dan pemantau jalannya roda pemerintahan dengan menjadikan hukum sebagai acuannya. Lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kejaksaan, Kehakiman, Kepolisian, dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya.



**Tabel: 7.25. Persentase Profesi Sektor Penegak Hukum Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022**

No	Profesi	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-Laki	(%)	Perempuan	(%)	
1	Hakim	18	0,58	4	0,13	22
2	Jaksa	14	0,45	15	0,48	29
3	Polisi	2.368	75,80	262	8,39	2.630
4	Advokat	181	5,79	54	1,73	235
5	Notaris	108	3,46	100	3,20	208
Jumlah		2.689	86,08	435	13,92	3.124

Sumber : Kantor Kehakiman, Kejaksaan, Polresta, Advokat dan Notaris Kota Denpasar, 2023

Pada tabel diatas terlihat bahwa persentase jumlah hakim, polisi, dan advokat masih didominasi oleh laki-laki. Terjadi ketimpangan gender. Untuk jumlah jaksa dan notaris tidak terjadi ketimpangan gender yang signifikan. Jumlah hakim di Kota Denpasar tahun 2022 adalah 0,58% laki-laki dan 0,13% perempuan. Jumlah jaksa laki-laki 0,45% dan 0,48% jaksa perempuan. Jumlah polisi di Kota Denpasar terdiri atas 75,80% laki-laki dan 8,39% perempuan. Terjadi ketimpangan gender pada profesi polisi. Jumlah advokat 5,79% laki-laki dan 1,73% perempuan. Jumlah notaris di Kota Denpasar terdiri atas 3,46% laki-laki dan 3,20% perempuan.

## **BAB VIII**

### **LAIN-LAIN**

Bab VIII merupakan bab terakhir dari Buku Profil Statistik Gender Kota Denpasar 2023 yang memuat tentang kekerasan, gepeng, dan lansia. Bab terakhir ini menyajikan informasi tambahan yang dapat menjadi acuan dalam penentuan kebijakan berbasis gender. Beberapa hal yang dimaksudkan tersebut diuraikan sebagai berikut.

#### **8.1 Kekerasan**

Kekerasan sejatinya menjadi salah satu wujud mengenai suatu Tindakan agresi dan termasuk dalam pelanggaran. Alasannya karena kekerasan identik dengan penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, penganiayaan, dan lain sebagainya, sehingga kekerasan yang dilakukan baik oleh individu tau kelompok selalu merugikan pihak-pihak lainnya. Di sisi lainnya, kekerasan muncul karena adanya sebab atau motif yang menjadikan seseorang sulit untuk dikendalikan. WHO mendefinisikan kekerasan merupakan penggunaan seluruh kekuatan fisik demi mendapatkan kekuasaan yang biasanya disertai dengan ancaman sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, seperti luka memar, kematian, kerugian secara psikologis dan lain sebagainya (<https://databoks.katadata.co.id/>

[datapublish/2021/12/29/prevalensi-kekerasan-fisik-dan-seksual-terhadap-perempuan-menurun-pada-2021](#)).

Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016, 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya. Pada SNPHAR tahun 2021, ditemukan bahwa 2 dari 3 anak laki-laki dan perempuan berusia 13-17 tahun pernah mengalami salah satu kekerasan dalam hidupnya, baik itu kekerasan fisik, seksual, maupun emosional. Data Sistem Informasi Online (SIMFONI) Kemen PPPA menunjukkan, kasus kekerasan yang menimpa para korban terjadi di berbagai tempat. Paling banyak kasus kekerasan terjadi di rumah tangga, fasilitas umum, dan tempat yang masuk dalam kategori lainnya, sedangkan kasus kekerasan di sekolah dan tempat kerja jumlahnya kecil. Dari segi jumlah korban, SIMFONI mencatat rumah tangga memiliki korban kekerasan terbanyak, disusul oleh tempat yang masuk dalam kategori lainnya, sekolah, tempat kerja, dan lembaga pendidikan kilat. Sementara itu, dari jenis kekerasan yang dialami, SIMFONI mencatat bahwa kekerasan seksual menempati urutan pertama, disusul oleh kekerasan fisik, psikis, kekerasan yang masuk dalam kategori lainnya, penelantaran, trafficking, dan eksploitasi (<https://ykp.or.id/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-jenis-dan-cara-melaporkannya/>).

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tahun 2021, hasil SPHPN Tahun 2021 menunjukkan adanya penurunan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dibandingkan tahun 2016. Sebesar 26,1% atau 1 dari 4 perempuan usia 15-64 tahun selama hidupnya pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan pasangan dan selain pasangan. Angka ini turun dibandingkan tahun 2016 yaitu 33,4% atau 1 dari 3 perempuan

(<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/29/prevalensi-kekerasan-fisik-dan-seksual-terhadap-perempuan-menurun-pada-2021>).

**Tabel : 8.1. Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022**

Korban Kekerasan	Anak Perempuan	Anak Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2021	87	50	115	252
2022	167	83	166	416

Sumber : PPTPPA Kota Denpasar, 2023

Pada Tabel 8.1 terjadi peningkatan korban kekerasan untuk anak perempuan, anak laki-laki, dan perempuan. Terdapat 115 orang pada kasus kekerasan perempuan di tahun 2021 dan 166

orang pada tahun 2022. Untuk kasus korban kekerasan pada anak perempuan dan anak laki-laki mengalami peningkatan masing-masing sebesar 91,95% dan 66% dari tahun 2021 sampai tahun 2022.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, menurut pasal 1 UU PKDRT. Salah satu hal yang membuat tindakan kekerasan pada perempuan ini masih menjamur adalah adanya nilai-nilai yang diyakini masyarakat yakni perihal budaya patriarki. Sebagai informasi, budaya patriarki ini menempatkan laki-laki sebagai pihak yang superior, sehingga ia dapat menguasai dan mengontrol perempuan. Dengan kata lain, dalam budaya ini perempuan ter subordinasi atau menjadi orang nomor dua. Selain itu, didukung pula dengan adanya stereotipe gender yang menganggap perempuan lemah dan laki-laki selalu kuat. Perilaku kasar pada perempuan dalam rumah tangga bisa terjadi karena faktor dukungan sosial dan kultur (budaya) yakni perempuan sebagai orang nomor dua dapat diperlakukan dengan cara apa saja.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak kekerasan pada perempuan ini tidak hanya mengacu pada kekerasan fisik, namun terdapat jenis kekerasan lainnya, yakni:

1). Kekerasan emosional merupakan tindakan yang menyebabkan korban ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Selain tindakan berupa cacian dan makian, tanda perilaku kasar pada perempuan dalam rumah tangga yang menyerang psikis ini juga berupa pelarangan, pemaksaan, dan isolasi social; 2). Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Tindakan yang termasuk pada kekerasan fisik meliputi menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, melukai dengan senjata, dan sebagainya; 3). Kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga umumnya adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual dan pelecehan seksual. Perlu diketahui, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki oleh istri juga termasuk dalam kekerasan seksual; 4). Kekerasan ekonomi dimana ini juga biasa disebut dengan kekerasan penelantaran rumah tangga. Jenis kekerasan ini berhubungan dengan memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Tindakan kekerasan ini dapat berupa tidak memberikan nafkah, membatasi finansial korban dengan tidak wajar, atau bahkan menguasai penghasilan pasangan sepenuhnya.

Pada Tabel 8.2 terlihat bahwa bentuk kekerasan psikis menduduki posisi teratas. Terjadi peningkatan sebesar 62% dari

tahun 2021 ke tahun 2022, dimana pihak perempuan menduduki posisi yang tertinggi. Tindakan kekerasan psikis umumnya sulit untuk dilihat. Seseorang yang menjadi korban pun kerap tidak menyadari bahwa dirinya merupakan korban.

Bentuk-bentuk kekerasan psikis umumnya terjadi dalam lingkup rumah tangga, masyarakat difabel, dan anak. Definisi kekerasan dalam Pasal 7 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat seseorang. Penting untuk diketahui bahwa suatu tindakan dapat dikatakan sebagai kekerasan psikis jika:

1. Ada pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, amarah, penghinaan, pelabelan bersifat negatif, dan sikap tubuh yang merendahkan.
2. Tindakan tersebut sering kali menekan, menghina, merendahkan, membatasi, atau mengontrol korban untuk memenuhi tuntutan pelaku.
3. Tindakan tersebut menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, dan rasa tidak berdaya.

Tindakan kekerasan psikis dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 45 yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000.

Kekerasan psikis yang disebutkan di dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan sebuah perbuatan yang berdampak bahaya bagi korban. Dampaknya bisa berupa tidak mendapat pemulihan depresi, insomnia, stress, cemas, hingga gejala keinginan untuk bunuh diri. Di dalam rumah tangga, selain perempuan yang mengalami kekerasan psikis, kekerasan psikis terhadap anak juga masih kerap dijumpai. Terdapat 338.496 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan 14.517 kasus kekerasan terhadap anak terjadi sepanjang tahun 2021.

Menurut Pasal 13 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, seksual, dan termasuk hinaan yang meliputi



penelantaran dan perlakuan buruk, eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking jual beli anak. Anak yang mendapatkan kekerasan psikis menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah, dan takut bertemu orang lain. Dampak ini mengakibatkan bekas dan ingatan trauma sehingga mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Selain dalam lingkup rumah tangga, kekerasan psikis juga rentan terjadi pada masyarakat difabel. Bentuk kekerasan yang diterima oleh difabel mulai dari kata-kata yang merendahkan, sikap yang membedakan dan tidak menghargai, pelarangan tertentu, dan sebagainya. Dampak kekerasan psikis dapat dilihat dari hilangnya rasa percaya diri korban, hilangnya kemampuan untuk bertindak, gangguan tidur, gangguan makan, ketergantungan obat hingga yang paling mengkhawatirkan adalah kekerasan psikis dapat memunculkan rasa ingin bunuh diri terhadap korbannya (<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-kekerasan-psikis-sebagai-tindak-pidana-1t624e97e997e02?page=2>).

**Tabel : 8.2. Bentuk-bentuk Kekerasan di Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 dan 2022**

Bentuk Kekerasan	2021			2022		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Fisik	3	33	36	15	53	68
Fisik Lainnya	0	7	7	3	7	10
Psikis	4	46	50	17	64	81
Psikis Lainnya	1	17	18	3	11	14
Seksual	0	9	9	0	14	14
Seksual Lainnya	2	21	23	0	21	21
Penelantaran	7	24	31	16	58	74
TTPO	0	0	0	0	1	1
ABH	12	0	12	4	5	9
Perkawinan Anak	0	0	0	0	0	0
Perebutan Kuasa Asuh Anak	15	24	39	13	36	49
Kasus Lainnya	6	21	27	11	64	75
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>202</b>	<b>252</b>	<b>82</b>	<b>334</b>	<b>416</b>

Sumber : PPTPPA Kota Denpasar, 2023

World Health Organization (WHO) memaparkan bahwa satu dari tiga perempuan di seluruh dunia pernah menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun seksual, yang dilakukan oleh pasangannya. Artinya, sekitar 30 persen perempuan pernah mengalami peristiwa tak menyenangkan itu. Jika dilihat dari persentase korban kekerasan menurut jenis kelamin, pada tahun 2021 dan tahun 2022 lebih banyak terjadi pada perempuan.

Pada tahun 2021 sebanyak 90,2% dan pada tahun 2022 sebanyak 80,2%.

**Tabel : 8.3. Persentase Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022**

Tahun	Laki-laki (%)	Perempuan (%)
2021	9,8	90,2
2022	20	80

Sumber : PPTPPA Kota Denpasar, 2023

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), ada 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan di dalam negeri pada 2022. Berbagai kekerasan tersebut tak hanya secara fisik, tapi juga psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, hingga eksploitasi (<https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>).

Berdasarkan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Bali mencatat bahwa penanganan kasus perempuan sebagai korban pada tahun 2021 mencapai 241 kasus, sedangkan hingga November 2022 ini sudah mencapai 248 kasus, atau mengalami peningkatan sebesar 2,9 persen. Sementara laporan kekerasan terhadap anak mengalami kenaikan sebesar 19 persen pada tahun 2022. Dimana sebelumnya pada tahun 2021 terjadi 73 kasus, dan kini telah naik

menjadi 87 kasus per November 2022 (<https://www.nusabali.com/berita/131463/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-bali-meningkat>).

**Tabel : 8.4. Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani oleh Dinas P3A Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022**

Tahun	Laki-laki (%)	Perempuan (%)
2021	36	64
2022	33	67

Sumber : PPTPPA Kota Denpasar, 2023

Pada Tabel 8.4 terlihat persentase kekerasan pada anak di Kota Denpasar pada anak laki-laki di tahun 2021 sebesar 36% dan anak perempuan sebesar 64% di tahun 2021. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan kekerasan pada anak perempuan sebesar 3%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan pada anak-anak masih terjadi dominan pada anak perempuan. Penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan dilakukan dengan berbasis sistem. Sistem yang digunakan yakni melalui pencegahan, pengurangan resiko kerentanan, dan penanganan korban yang terangkum dalam satu sistem data dan informasi. Tentunya pendekatan sistem ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak diantaranya orang tua, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah dan pihak terkait lainnya.

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau para pihak dalam hubungan perkawinan antara suami dengan istri saja, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah 1) anak, termasuk anak angkat dan anak tiri; 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan (misalnya: mertua, menantu, ipar dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga serta 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Siapapun sebetulnya berpotensi untuk

menjadi pelaku maupun korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga pun tidak mengenal status sosial, status ekonomi, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, suku maupun agama (<https://an-nur.ac.id/bentuk-bentuk-kdrt/>).

Terdapat empat tipe kekerasan, di antaranya:

#### 1. Kekerasan fisik

Adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6). Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku di antaranya: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekek, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat korban kdrt menjadi trauma dalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman.

#### 2. Kekerasan psikis

Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7). Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.

### 3. Kekerasan seksual

Adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi (pasal 8): (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

### 4. Penelantaran rumah tangga

Adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (pasal 9). Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomik yang dapat diindikasikan dengan perilaku di antaranya seperti : penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang

bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya.

Secara keseluruhan jumlah KDRT di Kota Denpasar pada tahun 2022 meningkat 84,92% dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2021 dan 2022 jenis KDRT yang paling tinggi adalah psikis. Sedangkan jenis KDRT paling rendah adalah seksual.

**Tabel : 8.5. Jumlah KDRT di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022**

Jenis KDRT	2021	2022
KDRT (Fisik)	36	64
KDRT (Psikis)	50	81
KDRT (Seksual)	9	14
KDRT (Penelantaran)	31	74
Jumlah	126	233

Sumber : PPTPPA Kota Denpasar, 2023

Adanya kekerasan membutuhkan penanganan Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat. Layanan Penanganan Pengaduan perempuan dan



anak korban kekerasan meliputi: prosedur penanganan pengaduan langsung, prosedur penanganan pengaduan tidak langsung, dan prosedur penanganan penjangkauan. Mekanisme rujukan sebagai tindak lanjut penanganan korban pemantauan korban yang dirujuk.

Dilihat dari penanganan pengaduan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak didapatkan terjadi peningkatan penanganan. Yang dimaksud dengan pengaduan langsung adalah pelapor (korban/keluarga/orang lain/kelembagaan masyarakat/ institusi) datang secara langsung mengadukan/melaporkan adanya tindak kekerasan yang dialaminya sendiri/orang lain/ keluarganya/ komunitasnya/ institusinya. Sedangkan pengaduan tidak langsung adalah pelapor (korban atau keluarga) melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya sendiri atau anggota keluarganya melalui media telepon/hotline, surat/email ataupun faximili. Termasuk pengaduan tidak langsung yaitu laporan yang dilakukan/dirujuk oleh masyarakat dan/atau lembaga lain mengenai adanya tindak kekerasan yang dialami oleh korban. Untuk penjangkauan korban (*outreach*), jika korban tidak bisa datang langsung, tetapi harus segera ditindaklanjuti maka petugas akan mengkoordinasikan dengan lembaga layanan yang relevan dengan sifat kedaruratan pelapor. Petugas menginformasikan layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan korban dan tugas serta kapasitas lembaga, dimana tempat dan waktu kejadian. Bila pelapor setuju

(*consent*) maka akan ditindaklanjuti (<https://dp3appkb.kalteng.go.id/layanan-publik/sop-penanganan-pengaduan-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan.html>). Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di Kota Denpasar pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 55,56%, yang terdiri dari penanganan untuk korban anak perempuan dan anak laki-laki.

**Tabel : 8.6. Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Tahun 2021 dan 2022**

Korban Kekerasan	Tahun	
	2021	2022
Perempuan	-	-
Anak Perempuan	17	25
Anak Laki-laki	1	3
Jumlah	18	28

Sumber : PPTPPA Kota Denpasar, 2023

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. TPPO juga merupakan kejahatan pidana

yang berdampak pada laki-laki, perempuan dan anak-anak dalam berbagai bentuk dan cara yang kerap terjadi diseluruh Indonesia. Mereka dieksploitasi dalam berbagai jenis sektor termasuk diantaranya pertanian, konstruksi, pariwisata, pekerjaan domestik, industri hiburan dan pekerjaan seks, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan lainnya. Orang-orang dapat diperdagangkan baik antar lintas batas negara maupun antar provinsi dalam suatu negara. Korban perdagangan orang dapat beragam baik dalam hal usia, asal wilayah atau latar belakang etnis, dan pendidikan. Tetapi terdapat sebuah kemiripan karakteristik yang cenderung dimiliki para korban yakni bentuk kerentanan dan upaya isolasi. Faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan di Indonesia antara lain adalah kemiskinan, pengangguran, ketidaksetaraan gender, dan celah kemudahan pemalsuan dokumen (<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/02e85-petunjuk-teknis-pendataan-dan-pelaporan-tppo.pdf>).

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan itu.

Pada Tabel 8.7 terlihat bahwa di Kota Denpasar hanya ada 1 orang anak perempuan yang masuk dalam daftar TPPO di tahun 2022. Untuk menjamin langkah sinergi dan berkesinambungan dalam pencegahan dan penanganan TPPO yang melibatkan Kementerian/Lembaga, sudah disusun Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024 (RAN PPTPPO 2020-2024) yang meskipun masih dalam proses pengundangan, namun pengimplementasian upaya pencegahan dan penanganan TPPO tetap berjalan.

**Tabel : 8.7. Jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022**

Tahun	Anak Perempuan	Anak Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2021	0	0	0	0
2022	1	0	0	1

Sumber : PPTPPA Kota Denpasar, 2023

## 8.2 Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)

Persoalan gelandangan dan pengemis telah menjadi isu nasional kesejahteraan sosial. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang

Kesejahteraan Sosial yang memberikan ruang bagi terbukanya pemenuhan kesejahteraan tak terkecuali gelandangan dan pengemis (Yusrizal & Asmara, 2020). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sementara itu, pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Banyak ditemukan gepeng yang berada di kota-kota besar adalah warga pendatang dari pedesaan. Alasan menjadi gepeng juga bermacam-macam. Mulai dari sulitnya mencari pekerjaan di daerah pedesaan, lahan tanah yang tandus dan gersang sehingga tidak dapat bercocok tanam, serta rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang menyebabkan seseorang berpindah ke daerah perkotaan untuk menjadi gepeng. Urbanisasi dilakukan karena kota dirasa menjanjikan masa depan yang lebih baik bagi para gepeng. Tidak seperti daerah pedesaan yang minim lapangan pekerjaan dan perekonomian yang relatif sepi, daerah perkotaan dianggap paling cocok untuk dijadikan tujuan menjadi gepeng. Gelandangan adalah seorang yang hidup dalam keadaan yang

tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengembara ditempat umum sehingga hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat. Sedangkan pengemis adalah seorang yang mendapat penghasilan dengan meminta minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.

Berdasarkan Tabel 8.8 jumlah gepeng di Kota Denpasar pada tahun 2022 didominasi oleh kelompok umur 19 tahun keatas. Terdapat 81 orang laki-laki dan 49 orang perempuan.

**Tabel : 8.8. Jumlah Gepeng Menurut Jenis Kelamin yang Terjaring dan Telah Dibina Dipulangkan ke Daerah Asal Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022**

Kelompok Umur	2022		
	L	P	Jumlah
0-4 Tahun	8	9	17
5-9 Tahun	11	4	15
10-14 Tahun	19	13	32
15-18 Tahun	17	8	25
19 Tahun Keatas	81	49	130
Jumlah	136	83	219

Sumber : Dinas Sosial Kota Denpasar, 2023

Meskipun hingga saat ini berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah, swasta, dan masyarakat belum menunjukkan hasil

yang memuaskan atau mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis baru namun paling tidak sudah ada penanganan meskipun tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Tetapi satu hal penting yang harus dilakukan diingat dalam penanganan gelandangan dan pengemis yaitu tetap memanusiakan manusia. Menurut Arief (2010, *dalam* Yusrizal & Asmara, 2020), pendekatan humanistis dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis sangat penting dikedepankan. Hal ini berarti pencegahan perbuatan mengelandang dan mengemis tidak hanya lewat pemberian pidana/hukuman yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat meningkatkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. Meskipun pemberian pidana/hukuman juga tetap dibutuhkan, namun sebaiknya tetap memperhatikan unsur kemanusiaan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga kehidupan manusia. Oleh karena itu, pendekatan humanistis yang mengedepankan harkat dan martabat mereka juga harus tetap dipegang teguh agar hak-hak mereka pun terjaga dan mampu mengembalikan fungsi sosial mereka di masyarakat.

### **8.3 Lansia (Lanjut Usia) PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)**

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) memperkirakan tahun 2025, lebih dari seperlima penduduk Indonesia tergolong lanjut usia (lansia), yaitu penduduk umur 60 tahun atau lebih. BPS memperkirakan hampir 60 persen lansia di Indonesia tergolong miskin, dan merupakan 27 persen dari total penduduk miskin. Disamping itu, rata-rata pendidikan lansia di Indonesia hanya Sekolah Dasar tanpa memiliki pekerjaan tetap. Jumlah lansia yang relatif banyak ini jangan sampai menjadi beban pembangunan tetapi hendaknya menjadi aset pembangunan.

Dalam usaha menjadikan lansia sebagai aset pembangunan, pemahaman yang mendalam dari berbagai aspek yang berkaitan dengan lansia menjadi sangat

penting. Pemahaman ini diperlukan mengingat para lansia mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda dengan penduduk pada umumnya. Umumnya, lansia mengalami penurunan kondisi fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Keadaan ini cenderung berpotensi menimbulkan masalah kesehatan secara umum maupun kesehatan jiwa secara khusus pada lansia. Selanjutnya, Kuntjoro menyebutkan ada lima faktor yang mempengaruhi kesehatan jiwa lansia, yaitu (a) penurunan kondisi fisik, (b) penurunan fungsi dan potensi seksual, (c) perubahan aspek psikososial, (d)



perubahan berkaitan dengan pekerjaan, dan (e) perubahan dalam peran sosial di masyarakat. Jika masalah-masalah ini tidak ditangani secara baik, lansia akan menjadi beban pembangunan, bukan asset pembangunan.

Bali menjadi salah satu provinsi dengan fenomena bertambah banyaknya penduduk lanjut usia (lansia). Hal ini menunjukkan angka harapan hidup penduduk Bali terus meningkat. Bali menempati peringkat keempat dengan jumlah penduduk lansia terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Provinsi Bali memiliki populasi lansia sebanyak 568.380 jiwa dari 4.292.154 jiwa penduduk atau sekitar 12,37 persen.

**Tabel : 8.9. Jumlah Lansia PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022**

NO	Kecamatan	Usia 60 Tahun		Total
		L	P	
1	Denpasar Utara	54	119	173
2	Denpasar Timur	29	53	82
3	Denpasar Selatan	24	34	58
4	Denpasar Barat	14	24	38
Jumlah		121	230	351

Sumber : Dinas Sosial Kota Denpasar, 2023

Berdasarkan data diatas, jumlah lansia PPKS di Kota Denpasar pada tahun 2022 adalah 351 orang, terdiri dari 121 orang laki-laki dan 230 orang perempuan. Terjadi ketimpangan gender

dalam jumlah lansia tersebut. Daya tahan hidup seorang perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Program perlindungan pemerintah pusat yang digulirkan saat ini melalui Kementerian Sosial menyelenggarakan dua program bantuan sosial bagi lansia, yaitu :

1. Program Bantuan Bertujuan Lanjut Usia (Bantu LU)

Program ini bertujuan untuk memberikan rehabilitasi sosial, pendampingan, dukungan teknis, dan dukungan aksesibilitas bagi lansia agar dapat memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya. Sasaran dari program ini yaitu lansia yang tinggal sendiri, bersama pasangan, baik yang potensial maupun yang tidak potensial. Program ini diberikan bukan pada lansia penerima PKH. Pada tahun 2019, besaran bantuan ini untuk setiap lansia yaitu Rp. 2.400.000 per tahun yang disalurkan melalui rekening milik lansia itu sendiri atau wali yang telah ditunjuk.

2. PKH Komponen Lansia

Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2016 memasukan lansia sebagai komponen penerima manfaat. Setiap KPM PKH yang memiliki anggota keluarga lansia mendapatkan tambahan bantuan dana. Lansia penerima manfaat program PKH diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup. Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan lansia sebagai penerima manfaat PKH diantaranya yaitu, minimal

satu kali dalam satu tahun memeriksakan kesehatan, mengakses layanan *home care* dan *day care*.

*Home care* mengacu pada perawatan yang diberikan oleh para profesional di rumah ada pasien lanjut usia yang mencakup berbagai kegiatan, dari perawatan preventif sampai akhir kehidupan (Thome, *et al.*, 2003). Perawatan di rumah biasanya dilakukan oleh perawat, beberapa staf dengan berbagai tingkat pendidikan dan pelatihan, beberapa bahkan tidak memiliki pelatihan kesehatan formal (Bing-Jonsson, *et al.*, 2016). Sedangkan Day Care adalah sebuah program yang menyediakan perawatan bagi para usia lanjut yang membutuhkan pengawasan atau perhatian keperawatan dalam jangka waktu singkat. Pelayanan ini dapat dimanfaatkan bagi lanjut usia (lansia) untuk dirawat secara harian dengan mengikuti kegiatan fisik, mental dan social yang telah dirancang oleh klinik. Layanan Day Care ini terdiri atas Day Care 24 jam dan Day Care 1/2 hari. Para lansia atau keluarga yang menginginkan orang tuanya mengikuti layanan day care, dapat menyampaikan jumlah hari layanan yang diinginkan.

# BAB IX

## PENUTUP

### 9.1 Simpulan

Ditinjau dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, publik dan lain-lain dapat disimpulkan sebagai berikut.

#### 1. Pendidikan

- a. Ditinjau dari APS, anak usia 7-15 tahun hampir seluruhnya bersekolah, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara usia 16 tahun ke atas, untuk laki-laki berkisar antara 75 hingga 83 persen sementara untuk perempuan berkisar 68 hingga 87 persen. APS penduduk laki-laki cenderung mengalami penurunan pada semua kelompok umur sepanjang periode 2020-2022.
- b. APM SD pada penduduk laki-laki sebesar 98,79 persen sementara pada penduduk perempuan 95,75 persen. Artinya, pada tahun 2022 sekitar 98,79 persen penduduk laki-laki dan 98,79 persen penduduk perempuan yang berumur 7-12 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SD sederajat. Sama halnya dengan APM SD, APM SMP untuk penduduk laki-laki angkanya juga lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Sebaliknya pada jenjang SMA, APM penduduk laki-laki lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. Siswa putus sekolah

tingkat SD dan SMP masih terjadi. Di Kecamatan Denpasar Barat menduduki posisi paling tinggi.

- c. Ditinjau dari APK, target APK tingkat SD/MI tahun 2022 adalah 104 namun bisa terealisasi 102,49. Sementara itu untuk APK jenjang pendidikan SMP/MTs targetnya sama dengan jenjang SD yakni 104 namun hanya terapai 92,05, berarti masih jauh dari target. Berbeda dengan APK tingkat SMA/MA/SMK tercapai 106,92, melewati nilai target 103,33. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.
- d. Dilihat dari jumlah siswa, terjadi pemerataan di jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Yang menarik kondisi saat ini sepertinya agak berbeda dengan tahun sebelumnya dimana semakin tinggi jenjang pendidikan maka jumlah siswa perempuan semakin sedikit, namun saat ini di Kota Denpasar tampak semakin tinggi jenjang pendidikan jumlah siswa perempuan semakin tinggi. Ini artinya tidak ada lagi diskriminasi terhadap anak perempuan di bidang pendidikan.

## 2. Kesehatan

- a. Jumlah angka kelahiran bayi di Kota Denpasar berdasarkan jenis kelamin dan empat wilayah kecamatan pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan terjadi

- peningkatan. Peningkatan secara signifikan terjadi khususnya pada bayi berjenis kelamin laki-laki.
- b. Dilihat dari jumlah balita terjadi peningkatan jumlah balita sebanyak 7.176 balita atau setara dengan 12%. Peningkatan atau bertambahnya jumlah balita di dominasi oleh daerah Denpasar Selatan baik pada tahun 2021 dan 2022. Adapun kecamatan dengan jumlah angka balita terendah ialah Denpasar Timur. Sejalan dengan angka kelahiran bayi, jumlah balita dengan jenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan balita jenis kelamin perempuan.
  - c. ASI eksklusif dari tahun 2021 berjumlah 1.214 turun menjadi 1.019 pada tahun 2022. Penurunan tersebut mencapai angka 195 kasus atau setara dengan 16,1%. Status gizi di Kota Denpasar tergolong baik selama dua tahun terakhir ini.
  - d. Cakupan imunisasi bayi di Kota Denpasar dari tahun 2021-2022 mengalami peningkatan 2.096 atau setara dengan 3,2 persen dalam satu tahun. Namun demikian data setiap kecamatan menunjukkan bahwa penurunan hanya terjadi di kecamatan Denpasar Selatan.
  - e. Secara kuantitatif jumlah dokter umum berjenis kelamin perempuan meningkat sejumlah 34 dokter di tahun 2022 menjadi 55 dokter. Sedangkan untuk dokter umum

berjenis kelamin laki-laki mengalami penurunan sejumlah 13 dokter di tahun 2022 menjadi 33 dokter.

- f. Ditinjau dari alat kontrasepsi, di Kota Denpasar jumlah laki-laki dan perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 61.560 orang. Penggunaan kontrasepsi terbanyak adalah AKDR/IUD/Spiral sebanyak 23.446 orang.
- g. Ditinjau dari pelayanan air bersih, semua kecamatan terlayani air bersih diatas 50%. Kecamatan Utara menduduki posisi paling tinggi dalam pelayanan air bersih yaitu 79,07% pada tahun 2021 dan Kecamatan Denpasar Timur terlayani 73,63% pada tahun 2022.

### 3. Ekonomi

- a. Terjadi ketimpangan gender terkait dengan jumlah penduduk usia produktif pada tahun 2021 dan 2022. Jumlah penduduk usia produktif perempuan untuk tahun 2021 dan 2022 lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia produktif laki-laki. Terjadi peningkatan hanya sebesar 0,64% untuk perempuan dan 0,48% untuk laki-laki.
- b. Ditinjau menurut status pekerjaan, secara umum pilihan masyarakat untuk menjadi buruh/karyawan/pegawai memiliki persentase tertinggi, yaitu sekitar 57,62 persen pada tahun 2021 dan 60,95 persen pada tahun 2022, dimana laki-laki masih mendominasi.

- c. Jumlah tenaga penyuluh pertanian lebih banyak didominasi oleh perempuan sehingga terjadi ketimpangan gender.
- d. Selama periode tahun 2019 hingga tahun 2021, TPAK laki-laki memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. Lebih rendahnya TPAK perempuan ini dinilai wajar, mengingat secara umum perempuan bukanlah tumpuan ekonomi keluarga, apalagi setelah menikah kebanyakan perempuan akan mengurus rumah tangga. Terkait dengan tenaga kerja asing, tidak terjadi ketimpangan gender yang signifikan.
- e. Jumlah tenaga kerja asing pendatang mengalami penurunan kecil sebesar 2,42% dari tahun 2021 ke tahun 2022. Jumlah tenaga asing perempuan lebih sedikit dibandingkan tenaga asing laki-laki. Menurunnya jumlah tenaga asing di Kota Denpasar sebagai salah satu dampak dari pandemic Covid-19.
- f. Jumlah tenaga pada Dinas Lingkungan Hidup di Kota Denpasar masih didominasi oleh laki-laki sejumlah 917 orang.
- g. Kondisi yang sama terjadi pada jumlah juru parker dimana masih didominasi oleh laki-laki. Terjadi ketimpangan gender yang tinggi.
- h. Jumlah tenaga kerja yang terserap di usaha rekreasi dan usaha pariwisata di Kota Denpasar adalah 413 laki-laki



dan 158 perempuan. Terjadi ketimpangan gender dalam sektor ini.

- i. Dilihat dari jumlah penanggung jawab usaha akomodasi, jenis usaha rumah makan paling banyak di Kota Denpasar. Terdapat 1.493 orang laki-laki dan 1.627 orang perempuan. Tidak terjadi ketimpangan gender yang besar antara laki-laki dan perempuan.
- j. Berdasarkan tenaga kerja yang diserap pada bidang usaha hotel dan restaurant, pekerja yang bekerja di hotel bintang masih didominasi laki-laki yaitu 3.432 orang dan 1.149 perempuan.
- k. Di bidang jasa, usaha salon kecantikan lebih didominasi perempuan yaitu 128 orang dan laki-laki sebanyak 23 orang. Usaha salon kecantikan lebih banyak diminati oleh perempuan.

#### 4. Sektor Publik

- a. Di bidang eksekutif, jumlah ASN di Kota Denpasar secara keseluruhan selama dua tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 5,95%. Kondisi ini menunjukkan belum banyaknya penerimaan ASN selama masa pandemi dan diikuti dengan pegawai yang pensiun. Pada golongan II-IV telah terjadi ketimpangan gender yang signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Ketimpangan yang tajam terjadi pada golongan III, dimana jumlah ASN perempuan lebih banyak dibandingkan ASN laki-laki. Berdasarkan unit kerja,

terjadi ketimpangan yang signifikan di tingkat PAUD dan SD.

- b. Jumlah pegawai Non-ASN laki-laki pada tahun 2021 sebanyak 4.245 orang lebih banyak dibandingkan perempuan sebanyak 3.955 orang. Begitupula pada tahun 2022 baik pegawai Non-ASN laki-laki mengalami kenaikan, namun pegawai Non-ASN perempuan mengalami penurunan.
- c. Jumlah ASN yang sudah mengikuti diklat meningkat. ASN perempuan yang mengikuti Diklat lebih banyak dibandingkan ASN laki-laki dari tahun 2021-2022. Tercatat pada tahun 2021 jumlah ASN yang mengikuti Diklat adalah 2.080 orang laki-laki (39,73%) dan 3.155 orang perempuan (60,23%). Sedangkan pada tahun 2022 terdiri atas 2.178 laki-laki (36,93%) dan 3.719 orang perempuan (63,07%). Terjadi ketimpangan gender meskipun tidak terlalu signifikan.
- d. Berdasarkan persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kota Denpasar tahun 2021, paling banyak yang berpangkat Pembina Tk. I yaitu sebesar 18,10% pada tahun 2021 dan 11,72% pada tahun 2022. Sedangkan persentase terkecil berada pada posisi pangkat Juru yaitu 0,03% dan Pembina Utama yaitu 0,05%.

- e. Secara legislatif, menunjukkan kesenjangan gender yang amat sangat signifikan. Kondisi ini dikarenakan dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang ternyata hanya ada 4 orang perempuan saja dan berasal dari PDIP, Demokrat, Golkar, dan PSI.
- f. Terdapat 35 orang LO (Liaison Officer) di Kota Denpasar, yang terdiri dari 26 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Keterwakilan perempuan sebanyak 26%. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterwakilan ini masih dibawah 30%. Upaya *go politics* harus ditingkatkan.
- g. Dilihat dari jumlah Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) di Kota Denpasar, hanya 25% keterlibatan perempuan. Berbeda halnya dalam Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD), keterlibatan perempuan sudah mencapai 48,84%. Hal ini menunjukkan sudah terjadi ketimpangan gender di tingkat kelurahan/desa.
- h. Jumlah anggota KPU di Kota Denpasar sebanyak 5 orang, terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ini menunjukkan 40% sudah terwakilkan oleh perempuan.
- i. Jumlah PPK di Kota Denpasar pada tahun 2022 adalah 20 orang yang terdiri atas 17 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Masih dibawah 30% keterlibatan perempuan dalam PPK yaitu sebesar 15%.

- j. Ditinjau dari jumlah Panitia Pemungutan Suara, terjadi ketimpangan gender yang signifikan di setiap kecamatan. Secara keseluruhan terdapat 129 orang anggota PPS pada tahun 2022 yang terdiri atas 104 orang laki-laki dan 25 orang perempuan. Kaum perempuan lebih cenderung kecil untuk terlibat dalam PPS karena diperlukan fisik yang lebih besar untuk tugas ini. Keterlibatan perempuan sebagai PPS di masing-masing kecamatan adalah 24% (Denpasar Barat); 22% (Denpasar Utara); 22% (Denpasar Timur) dan 17% (Denpasar Selatan).
- k. Jumlah Pantarlih di Kota Denpasar adalah 1.888 orang yang terdiri dari 1.206 laki-laki dan 682 perempuan. Keterwakilan perempuan sudah berada diatas 30%. untuk masing-masing kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar Barat sebanyak 36%, Kecamatan Denpasar Utara sebanyak 38%, Kecamatan Denpasar Timur sebanyak 39% dan Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 33%.
- l. Berdasarkan perspektif yudikatif, persentase jumlah hakim, polisi, dan advokat masih didominasi oleh laki-laki. Terjadi ketimpangan gender. Untuk jumlah jaksa dan notaris tidak terjadi ketimpangan gender yang signifikan. Jumlah hakim di Kota Denpasar tahun 2022 adalah 0,58% laki-laki dan 0,13% perempuan. Jumlah jaksa laki-laki 0,45% dan 0,48% jaksa perempuan. Jumlah polisi di Kota Denpasar terdiri atas 75,80% laki-laki dan 8,39%

perempuan. Terjadi ketimpangan gender pada profesi polisi. Jumlah advokat 5,79% laki-laki dan 1,73% perempuan. Jumlah notaris di Kota Denpasar terdiri atas 3,46% laki-laki dan 3,20% perempuan.

## 5. Lain-lain

- a. Kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga masih menjadi kasus kekerasan paling tinggi. Terdapat 115 orang pada kasus kekerasan perempuan di tahun 2021 dan 166 orang pada tahun 2022. Untuk kasus korban kekerasan pada anak perempuan dan anak laki-laki mengalami peningkatan masing-masing sebesar 91,95% dan 66% dari tahun 2021 sampai tahun 2022.
- b. Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di Kota Denpasar pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 55,56%, yang terdiri dari penanganan untuk korban anak perempuan dan anak laki-laki.
- c. Jumlah gepeng di Kota Denpasar pada tahun 2022 didominasi oleh kelompok umur 19 tahun keatas. Terdapat 81 orang laki-laki dan 49 orang perempuan.
- d. Jumlah lansia PPKS di Kota Denpasar pada tahun 2022 adalah 351 orang, terdiri dari 121 orang laki-laki dan 230 orang perempuan. Terjadi ketimpangan gender dalam

jumlah lansia tersebut. Daya tahan hidup seorang perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

## **9.2 Rekomendasi**

Program dan kebijakan yang dihasilkan oleh pihak stakeholders masih bias gender, padahal kebutuhan dan pengalaman hidup perempuan dan laki-laki jelas berbeda. Oleh karenanya, penting untuk melakukan analisa gender agar bisa menemukan kebutuhan perempuan dan laki-laki yang belum terpenuhi, dan dapat mengeluarkan program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran. PUG merupakan salah satu strategi untuk mengintegrasikan perspektif dan pandangan dalam melakukan analisa gender dalam proses pembangunan. Terdapat tujuh strategi penguatan kelembagaan tersebut, diantaranya: penguatan komitmen, penguatan kebijakan, penguatan kelembagaan, penguatan sumber daya manusia dan anggaran, penguatan data terpilah, penguatan instrument PPRG, dan penguatan partisipasi masyarakat.

Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, pemerintah Indonesia membidik empat sektor utama yakni di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta terkait pencegahan kekerasan. Di samping itu, langkah strategis disiapkan untuk mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development

Goals (SDG's), terutama tujuan kelima yaitu kesetaraan gender. Pertama, di bidang pendidikan. Pemerintah mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun serta menyediakan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin melalui Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan. Kedua, di sektor kesehatan, pemerintah fokus untuk memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu, anak, dan remaja, mengakselerasi usaha perbaikan nutrisi, mengintegrasikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum pendidikan, mendorong pengetahuan dan keterampilan berkeluarga, serta memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana. Ketiga, di bidang ketenagakerjaan, pemerintah sebaiknya fokus untuk memperluas kesempatan kerja, mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja, menyesuaikan gaji dengan mekanisme pasar, memperbaiki keterampilan dan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan untuk perempuan, dan menguatkan implementasi kebijakan tenaga kerja yang mengakomodasi kesetaraan gender. Terakhir, yang keempat ialah terkait pencegahan kekerasan. pemerintah sebaiknya menargetkan peningkatan pemahaman atas definisi kekerasan dan penyelundupan perempuan, menyediakan perlindungan hukum bagi kasus kekerasan terhadap perempuan, dan meningkatkan efektivitas pelayanan bagi penyintas anak dan perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2023. Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar 2022. Badan Pusat Statistik, Denpasar.
- Bing-Jonsson P.C., Hofoss D., Kirkevold M., Bjørk I.T. & Foss C. (2016) Sufficient competence in community elderly care? Results from a competence measurement of nursing staff. BMC
- Elliott, C. M. (Ed.). (2007). Global empowerment of women: Responses to globalization and politicized religions. Routledge.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). Rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024:Indonesia berprestasi menengah - tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Diakses 12 September 2019 dari <https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024%20Revisi%2014%20Agustus%202019.pdf>
- Klasen, S., & Lamanna, F. (2009). The impact of gender inequality in education and employment on economic growth: New evidence for a panel of countries. Feminist



- Economics, 15(3), 91-132. doi:  
<https://doi.org/10.1080/13545700902893106>.
- Muhammad Arif Fahrudin Alfana, Desta Fauzan, Warastri Laksmiasri, Ayu Rahmaningtias (2015). Dinamika Pembangunan Manusia Berbasis Gender Di Indonesia. Seminar Nasional Geografi UMS 2015.
- Ni Kadek Sri Utari, I Gede Setiawan Adi Putra, Nyoman Parining (2020). Strategi Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Sanur Asri Lestari dalam Pengembangan Urban Farming di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan. *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata* ISSN:2685-3809 Vol. 9, No. 3, Desember 2020. Hal. 384-393.
- Seguino, S. (2000). Accounting for gender in Asian economic growth. *Feminist Economics*, 6(3), 27-58. doi:  
<https://doi.org/10.1080/135457000750020128>.
- Sumodiningrat, G. (1999). Pemberdayaan masyarakat dan jaring pengaman sosial. Gramedia Pusataka Utama.
- Thome B., Dykes A.K.&Hallberg I.R. (2003) Home care with regard to definition, care recipients, content and outcome: systematic literature review. *Journal of Clinical Nursing* 12(6), 860–872.
- World Bank. (2011). World development report 2011: Conflict, security, and development. World Bank. Diakses 12 September 2019 dari

<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/438>

9.

Yusrizal & Romi Asmara. (2020). “Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara)” Jurnal Ilmu Hukum Reusam ISSN 2338-4735/E-ISSN 27225100 Volume VIII Nomor 1 (Mei 2020). Nangore Aceh Darussalam : Universitas Malikussaleh.

